

**KESIAPAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
KOTA PAGAR ALAM DALAM IMPLEMENTASI
KURIKULUM YANG MENGACU PADA KERANGKA
KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Pendidikan (M.Pd)
Ilmu Pendidikan Agama Islam**

OLEH :

ALIP KAMARON

NIM : 2163020873

**PROGRAM PASCASARJANA
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2018**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu Telp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana (S2)
IAIN Bengkulu
Di
Bengkulu

Assalamua'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

"KESIAPAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) KOTA PAGAR ALAM DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM YANG MENGACU PADA KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)"

Yang ditulis oleh :

Nama : Alip Kamaron
NIM : 2163020873
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Telah di terima sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd)

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb

Bengkulu, September 2018
Direktur PPs IAIN Bengkulu,

Prof. Dr. J. Rohimin, M.Ag
NIP. 196403311991031001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)**

Jl. Raden Fatahi Pagar Dewa Kota Bengkulu Telp. (0736) 53848/Fax. (0736) 53848

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS**

Tesis yang berjudul :

**KESIAPAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBİYAH (STIT) KOTA PAGAR ALAM
DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM YANG MENGACU PADA
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)**

Nama : ALIP KAMARON

NIM : 2163020873

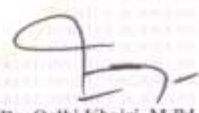
Tanggal lulus : 25 Juli 2018

Bengkulu, Agustus 2018

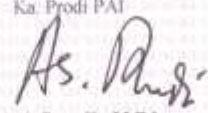
Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Zulkarnain Bah, M.Pd
NIP. 196201011994031005


Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd
NIP. 198107202007101007

Mengetahui,
Ka. Prodi PAI


Dr. A. Suradi, M.Pd
NIP. 197601192007011018



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu Telp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

KESIAPAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) KOTA PAGAR ALAM
DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM YANG MENGACU PADA
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

Penulis

ALIP KAMARON
NIM : 2163020873

Dipertahankan di depan Tim penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 25 Juli 2018

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Mawardi Lubis, M.Pd (Ketua/Penguji)	29-08-2018	1.
2	Dr. A. Suradi, M.Ag (Pembimbing/Sekretaris)	3-09-2018	2.
3	Dr. Zubaedi, M.Pd (Penguji Utama)	4-09-2018	3.
4	Dr. Boyung Surahman, M.Pd (Pembimbing/Penguji)	20 Agustus 2018	4.

Bengkulu, Agustus 2018
Direktur PPs IAIN Bengkulu,



Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M.Ag.MH
NIP. 196005071992021001

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196405311991031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alip Kamaron

NIM : 216 302 0873

Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Judul Tesis : Kesiapan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam dalam Melaksanakan Kurikulum yang Mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd) dari Program Pascasarjana (S.2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2018
Saya yang menyatakan,



Alip Kamaron
NIM. 216 302 0873

MOTTO

Jika yang kamu kerjakan itu mendekatkan kamu kepada Allah
maka syukurilah, karena banyak orang yang melakukan pekerjaan
sementara Allah jauh darinya.

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang
tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan
saat mereka menyerah.

- Thomas Alva Edison

PERSEMBAHAN

Karya Jesis ini Penulis Persembahkan untuk:

✚ **Program Pascasarjana IAIN Bengkulu**

Semoga semakin maju, berkembang dan jaya selamanya

✚ **Orang Tua Tercinta Ayah Maryono, DS dan Ibu Kantiasih**

Yang selalu mendukung dan mendo'akan keberhasilan penulis

✚ **Istri tercinta, Karyawati, SE**

Terima kasih atas do'a yang di panjatkan untuk penulis hingga mencapai keberhasilan dalam menuntut ilmu di IAIN Bengkulu

✚ **Buah hatiku Azarine Putri Akifah**

Semoga menjadi anak solehah yang berbakti kepada orang tua, taat beribadah dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa

✚ **Adik-adik penulis**

Noto Joyo Raharjo, Citra Wulan Sari, Si Kembar Riski Pangestu dan Rukun Pangestu, Eticka Anggraini dan Si Bungsu Faiqotul Mahfaza

**Kesiapan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam
dalam Implementasi Kurikulum yang Mengacu pada Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)**

ABSTRAK

Alip Kamaron
NIM. 216 302 0873

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 73 Tahun 2013, mengharuskan Perguruan Tinggi untuk melakukan redesign kurikulum yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Banyak perguruan tinggi yang belum siap menghadapi perubahan desain kurikulum tersebut seperti halnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam. Berangkat dari latar belakang tersebut, yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimanakah kesiapan pengurus dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di STIT Kota Pagar Alam, 2). Bagaimanakah kesiapan dosen dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di STIT Kota Pagar Alam dan 3). Bagaimanakah kesiapan sarana dan prasarana dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di STIT Kota Pagar Alam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan desain penelitian studi kasus dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kesiapan pengurus dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di STIT Kota Pagar Alam masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator bahwa 1). Pengurus belum pernah mengikuti workshop, pelatihan atau diklat tentang penyusunan kurikulum berbasis KKNI, 2). Belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai kurikulum yang mengacu kepada KKNI, dan 3). Belum mempunyai panduan penyusunan kurikulum tentang KKNI. Kesiapan dosen dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di STIT Kota Pagar Alam juga tergolong masih rendah dan belum siap, hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemahaman dosen-dosen STIT tentang kurikulum yang mengacu kepada KKNI, sistem pengajaran yang disampaikan oleh para dosen masih cenderung secara konvensional. Dari segi sarana dan prasarana dapat dikatakan sudah cukup memadai dalam implementasi kurikulum yang mengacu kepada KKNI.

Kata Kunci: *Implementasi Kurikulum, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)*

**Readiness Higher Education of Islamic Studies (STIT) Pagar Alam
in the Implementation of the Curriculum to the
Indonesian Qualification Framework (IQF)**

ABSTRACT

Alip Kamaron
NIM. 216 302 0873

The issuance of Presidential Regulation (Perpres) of the Republic Indonesia Number 8 Year 2012 and the Regulation of the Minister of Education and Culture (Permendikbud) Number 73 Year 2013, requires the University to redesign the curriculum referring to the Indonesian Qualification Framework (IQF). IQF is a framework of competency qualification that can match, equalize and integrate between the field of education and the field of job training and work experience in the framework of giving recognition of work competence in accordance with the structure of work in various sectors. This research is to analyze, 1). How is the readiness of the board in the implementation of the curriculum to the IQF in Higher Education of Islamic Studies (STIT) Pagar Alam, 2). How is the readiness of lecturers in the implementation of curriculum to IQF in Higher Education of Islamic Studies (STIT) Pagar Alam and 3). How is the readiness of facilities and infrastructure in the implementation of curriculum to IQF in Higher Education of Islamic Studies (STIT) Pagar Alam. Qualitative method was used in this research, data collection technique using interview, observation and documentation. Data analysis techniques with reduction, presentation and clarification. To search for data validity, was uses triangulation technique. The results is showed that readiness of the board in the implementation of the curriculum to IQF in Higher Education of Islamic Studies (STIT) Pagar Alam is still relatively low, it can be seen from some indicators that 1). The management has never attended a workshop, training on the preparation of IQF based curriculum, 2). Never had any socialization regarding curriculum to IQF, and 3). Do not have a guide for curriculum IQF. The readiness of lecturers in the implementation of curriculum to IQF in Higher Education of Islamic Studies (STIT) Pagar Alam is also still low and not ready, it can be seen from the lack of understanding of lecturers about curriculum IQF, teaching system which is conveyed by lecturers still tend to be conventional. In terms of facilities and infrastructure can be said is sufficient in the implementation of a curriculumIQF.

Keywords : *Implementation of Curriculum, Indonesian Qualification Framework (IQF)*

استعداد مدرسة الطرية لمدينة باغر عالم في تنفيذ المناهج بالإشارة إلى إطار المؤهلات الوطني لإندونيسيا

ملخص

Alip Kamaron
NIM. 216 302 0873

صدور قرار رئيس الجمهورية (مرسوم) من جمهورية إندونيسيا عدد ٨ عام ٢٠١٢ واللائحة وزير التربية والتعليم والثقافة رقم ٧٣ لعام ٢٠١٣، يتطلب الكلية لإعادة تصميم المنهج يشير إلى إطار المؤهلات الوطنية الإندونيسية. هو سلم الكفاءة والمؤهلات إطار لتسوية، مساواة، ودمج مجالات التعليم والتدريب المهني والخبرة في العمل من أجل الجائزة العمل وفقا لاعتراف من اختصاص هيكل العمالة في مختلف القطاعات. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى استعداد كلية (ستيت) باجار علم في تنفيذ المنهج يشير إلى. هذه الدراسة هو البحث ودراسة الحالة النوعي تصميم البحوث لتقنيات جمع البيانات باستخدام المقابلات والملاحظة والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات مع الحد من البيانات، وعرض البيانات وتوضيح البيانات. للبحث عن صلاحية البيانات، يستخدم الباحث تقنية التثليل لتقنية المصدر والتثليل. نتائج هذه الدراسة توضح أن استعداد الإدارة في تنفيذ المنهج يشير ستيت في باغار عالم لا يزال منخفضا نسبيا، يمكن أن ينظر إليه من العديد من المؤشرات أن (١). وقد شارك المجلس أبدا في ورشة العمل أو التدريب أو التدريب على تطوير المناهج الدراسية القائمة على (٢). لم يكن هناك أي تنشئة حول المناهج التي تشير إلى (٣). لا يوجد لديك دليل لإعداد المناهج الدراسية حول. محاضر الجاهزية في تنفيذ المنهج الذي يشير إلى في ستيت باجار علم أيضا لا يزال منخفضا ولم أعد، يمكن أن ينظر إليه من عدم وجود فهم المحاضرين ستيت حول المناهج يشير إلى KKNi، ونظام التدريس التي يتم نقلها من قبل أعضاء هيئة التدريس لا يزال تميل إلى أن تكون تقليدية. في يمكن أن يقال حيث المرافق والبنية التحتية

الكلمات المفتاحية: مناهج التعليم العالي

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil ‘Alamiin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, berkat izin dan kehendakNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul *Kesiapan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam dalam Implementasi Kurikulum yang Mengacu Kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)*. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan alam, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, amiin.

Studi ini dilandasi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 73 Tahun 2013, yang mengharuskan Perguruan Tinggi untuk melakukan redesain kurikulum yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Berangkat dari latar belakang tersebut, yang hendak dicari jawabannya dalam studi ini adalah 1). Bagaimanakah kesiapan pengurus dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di STIT Kota Pagar Alam, 2). Bagaimanakah kesiapan dosen dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di STIT Kota Pagar Alam dan 3). Bagaimanakah kesiapan sarana dan prasarana dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di STIT Kota Pagar Alam. Untuk itu tesis ini disusun agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Penyusunan tesis ini banyak sekali melibatkan berbagai pihak yang telah membantu, oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M.Ag selaku rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan izin, dorongan dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah banyak memberikan motivasi dan ilmu yang sangat berharga selama mengikuti perkuliahan sampai dengan penulisan tesis ini selesai.
3. Bapak Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag selaku Asisten Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan bantuan dalam memudahkan selama proses perkuliahan selama ini.
4. Bapak Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd, selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Pascasarjana IAIN Bengkulu sekaligus sebagai pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, mengarahkan memberikan dukungan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Ibu Nova Tri Evriani, M.Pd, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di kampus STIT tersebut.
7. Bapak Hendi Kariyanto, S.Pd., M.Pd.I, selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam yang telah banyak membantu, meluangkan waktu dalam rangka memberikan data dalam penelitian ini.
8. Bapak, Ibu Dosen dan staf Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.
9. Orang tua tercinta Ayah Maryono, DS dan Ibu Kantiasih yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'a terbaik yang tentu takkan bisa penulis balas. Semoga Allah memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin.
10. Istri tercinta, Karyawati, SE, terima kasih atas dukungan moril, perhatian, kasih sayang dan semangat yang selama ini diberikan, sehingga penulis tidak merasa lelah dan putus asa untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
11. Untuk adik-adik penulis, Noto Joyo Raharjo, Citra Wulan Sari, Si Kembar Riski Pangestu dan Rukun Pangestu, Eticka Anggraini dan Si Bungsu Faiqotul Mahfaza, terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, dan motivasi serta doanya.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam kata pengantar ini. Semoga amal kebaikan, doa dan bantuan selama ini kepada penulis dapat menjadi catatan timbangan kebaikan di akhirat kelak.

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis khususnya dan bagi kemajuan dan perjuangan menyampaikan ilmu pendidikan Islam. Kritik dan saran yang konstruktif terbuka bagi penyempurnaan dan perbaikan dimasa yang akan datang, serta mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan.

Bengkulu, Juni 2018
Penulis,

Alip Kamaron
NIM. 2163020873

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
TAJRID	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Batasan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Penelitian yang Relevan	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kurikulum	14
1. Pengertian Kurikulum	14

2. Jenis-jenis Kurikulum	21
3. Komponen-komponen Kurikulum	23
B. Implementasi	32
1. Pengertian Implementasi	32
2. Implementasi Kurikulum	34
3. Tahapan Implementasi Kurikulum	38
C. Kurikulum Pendidikan Tinggi	40
D. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	45
1. Pengertian KKNI	45
2. Peran KKNI	46
3. Jenjang Kualifikasi pada KKNI	47
4. Tujuan KKNI	52
E. Langkah-langkah Menyusun Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT)	55
1. Analisis SWOT Lembaga	56
2. Analisis Kebutuhan (<i>Tracer Study</i>)	59
3. Penetapan Profil Lulusan	60
4. Rumusan Capaian Pembelajaran	64

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	94
B. Tempat dan Waktu Penelitian	94
C. Sumber Data	95
D. Teknik Pengumpulan Data	96
1. Observasi	96

2. Wawancara	99
3. Dokumentasi	100
E. Teknik Pengolahan Data	101
F. Pengujian Keabsahan Data	103

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Sekoah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam	106
B. Hasil Penelitian	114
C. Pembahasan	120

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	145
B. Saran	146

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Contoh cara penulisan unsur keterampilan umum dalam capaian pembelajaran	69
Tabel 2.2	Contoh cara penulisan unsur keterampilan khusus dalam Rumusan Capaian Pembelajaran	69
Tabel 2.3	Tingkatan Capaian Pembelajaran	72
Tabel 2.4	Parameter dan unsur deskripsi KKNI	77
Tabel 2.5	Contoh pemetaan materi pembelajaran	80
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Penjenjangan KKNI melalui 4 jejak jalan (<i>pathways</i>) serta kombinasi ke empatnya	5
Gambar 2.2	Langkah-langkah penyusunan kurikulum	57
Gambar 2.3	Alur Penyusunan Profil	61
Gambar 2.4	Profil Lulusan	64
Gambar 2.5	Penetapan Capaian Pembelajaran	67
Gambar 2.6	Rumusan Capaian Pembelajaran Universitas	73
Gambar 2.7	Rumusan Capaian Pembelajaran Tingkat Program Studi	75
Gambar 2.8	Rumusan Deskripsi KKNI pada Tingkat Program Studi	76
Gambar 2.9	Deskriptor KKNI level 6	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

Lampiran 3. Surat Penunjukan Pembimbing Tesis

Lampiran 4. Daftar Alumni dan Mahasiswa Baru STIT Pagar Alam

Lampiran 5. Daftar Nama Ketua STIT Pagar Alam

Lampiran 6. Daftar Sarana dan Prasarana STIT Pagar Alam

Lampiran 5. Keadaan Pengurus, Dosen dan Pegawai STIT Pagar Alam

Lampiran 6. Hasil Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan menjadi cita-cita bagi setiap umat manusia, karena pendidikan merupakan salah satu media untuk mengangkat derajat manusia, bangsa dan negara sekaligus menyadarkan mereka untuk menuju pada kebahagiaan dan kesempurnaan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, bahwasannya Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman terutama bagi mereka yang berilmu pengetahuan yang luas dengan beberapa derajat. Adapun bunyi ayatnya adalah sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan sebuah negara, bahkan pendidikan dapat dijadikan sebagai sebuah indikator bagi kemajuan masyarakat dalam negara tersebut. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda

pembangunan nasional, atas kesadaran itu alokasi anggaran pendidikan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Oleh karenanya pendidikan harus mampu memberikan perubahan yang lebih baik bagi kehidupan manusia. Demikian juga dengan pengelolaan pendidikan yang harus semakin baik dari waktu ke waktu.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan penerapan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman yang semakin modern. Pada dasarnya kurikulum bersifat dinamis, karena kurikulum itu sendiri terkait erat dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya.¹ Dengan demikian, kurikulum harus mampu beradaptasi pada berbagai perubahan dan perkembangan yang ada. Maka perubahan dalam sebuah kurikulum pendidikan merupakan suatu yang sangat mungkin terjadi. Kurikulum akan secara terus menerus mengalami perubahan agar mampu menjawab tantangan perubahan zaman, dan untuk mempersiapkan peserta didik yang mampu bersaing di masa yang akan datang sesuai dengan tuntutan pada dunia kerja.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 36 disebutkan bahwa pengembangan

¹ Imas Kurniasih dan Berlin Sani, *Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 2013*, (Kata Pena, 2014), h. 3

kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.² Oleh karena itu, salah satu faktor keberhasilan mencapai tujuan pendidikan ditentukan dengan bagaimana pengelola pendidikan dapat menerapkan kurikulum dengan sebaik mungkin. Dalam hal ini dibutuhkan kesiapan yang matang.

Dalam sejarah pendidikan tinggi di Indonesia sudah beberapa kali mengadakan perbaikan kurikulum, pada tahun 1994 kurikulum pendidikan tinggi disebut Kurikulum Berbasis Isi (KBI). Disebut kurikulum berbasis isi karena mengutamakan ketercapaian penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) atau penguasaan materi. Penetapan kurikulum 1994 sebagai KBI ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* Pasal 36

Pada tahun 2000, atas amanah UNESCO melalui konsep *The Four Pillars of Education*, yaitu *Learning to Know*, *Learning to Do*, *Learning to Be* dan *Learning to Live Together*, kurikulum berbasis isi ini direkonstruksi menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Disebut KBK karena kurikulum era tahun 2000 dan 2002 ini lebih mengutamakan ketercapaian kompetensi, bukan isi. Pada tahun 2010 barulah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi (KBK).³

Selanjutnya pada tahun 2012 terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus mengacu pada KKNI. Hal ini bukan berarti KBK tidak berlaku lagi, sebab tidak ada proses rekonstruksi perubahan kurikulum sebagaimana pergantian KBI menjadi KBK. Oleh karena itu, KBK harus dikembangkan dengan mengacu pada KKNI, bukan direkonstruksi atau diganti dengan kurikulum yang baru. KBK yang direkonstruksi mengacu atau berbasis pada KKNI disebut dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT). Pengembangan KBK berbasis KKNI ini mulai diperundangkan tahun 2014 dan harus diimplementasikan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.⁴

KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka

³ Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum Perguruan Tinggi Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*, (Rosda, 2015), h. 71

⁴ Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum...* h. 71

pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.⁵ KKNI menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi.

Setiap jenjang kualifikasi dalam KKNI terdiri dari empat parameter utama, yaitu (a) keterampilan kerja, (b) cakupan keilmuan/pengetahuan, (c) metode dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/pengetahuan tersebut, serta (d) kemampuan manajerial. Keempat parameter tersebut dirumuskan dalam bentuk deskripsi yang kemudian deskripsi tersebut dikenal dengan istilah deskriptor genetik KKNI.⁶ Maka dengan ini pengelola perguruan tinggi dengan segenap kemampuan yang dimiliki diharuskan mampu mencetak mahasiswa yang sesuai dengan jenjang kualifikasi yang sesuai dengan KKNI.

Keselarasannya mutu dan perjenjangan antara produk lulusan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dengan kriteria tenaga kerja yang diharapkan oleh masyarakat pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera. Keluhan kesenjangan antara jumlah, mutu, kemampuan lulusan terhadap kriteria yang dibutuhkan oleh dunia kerja sering mengemuka. Perdebatan apakah gelar atau ijazah atau sertifikat kompetensi yang lebih bermakna untuk mencerminkan kualifikasi pencari kerja sering tidak menemui titik temu yang saling menguntungkan.⁷

⁵ Republik Indonesia. Perpres No. 8 tahun 2012 pasal 1 ayat 1

⁶ Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum Perguruan Tinggi ...*, h. 25

⁷ Juknis Pengembangan Kurikulum KKNI STAIN Curup h.5-6 tahun 2014

Terkait dengan kondisi tersebut, implementasi KKNi dalam pengembangan kurikulum PTAI menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mengejar ketertinggalan yang di hadapi PTAI baik skala nasional maupun internasional. Dengan di jadikannya KKNi sebagai rujukan dalam pengembangan kurikulum pada PTAI, lulusan PTAI diharapkan dapat memenuhi tuntutan pasar kerja dan kebutuhan *stakeholders* lainnya serta dapat berkiprah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan pergaulan internasional.⁸

Dalam implementasi kurikulum yang mengacu kepada KKNi pada perguruan tinggi pasti akan memiliki hambatan, baik itu sumber daya manusia, strategi, sistem informasi dan fasilitas kampus yang masih memiliki kekurangan. Perubahan itu sendiri tidaklah begitu sulit sepanjang pihak yang berwenang setuju, tetapi yang amat penting dipertimbangkan adalah implikasi dari perubahan itu antara lain tenaga pengajar, SDM, fasilitas dan sarana prasarana.

Permasalahan serupa nampaknya juga dialami oleh salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam yang telah berdiri sejak tahun 2004, berdasarkan wawancara sementara dengan ketua prodi PAI yang bernama Hendi Kariyanto, di kampus STIT Kota Pagar Alam ini penerapan kurikulum berbasis KKNi masih belum terlaksana dengan baik, namun demikian ijazah para alumni angkatan tahun 2016 sudah disertakan

⁸ Juknis Pengembangan Kurikulum KKNi..., h.6

dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang menerangkan bahwa pada STIT Kota Pagar Alam menerapkan KKNi level 7.⁹

Kalau melihat peraturan tentang jenjang KKNi pada perguruan tinggi, untuk jenjang strata satu seharusnya menerapkan KKNi level 6, level 7 digunakan untuk pendidikan profesi. Dari fakta ini penulis melihat adanya perbedaan penafsiran oleh para pengurus STIT Kota Pagar Alam terhadap peraturan tentang implementasi KKNi pada perguruan tinggi. Penulis berasumsi kurangnya persiapan SDM menjadi alasan dalam hal ini. Implementasi kurikulum berbasis KKNi menuntut dukungan tenaga yang terampil dan berkualitas agar menghasilkan *output* yang berkualitas pula.

Tidak hanya pengurus perguruan tinggi yang dituntut untuk terampil dan berkualitas dalam implementasi kurikulum yang mengacu kepada KKNi, dosen harus lebih siap lagi karena merupakan unsur pelaksana dalam implementasi kurikulum di dalam kelas. Berdasarkan wawancara singkat bersama salah satu dosen di STIT Kota Pagar Alam yang bernama Abdul Haris bahwa para dosen khususnya Bapak Abdul Haris sendiri justru baru mendengar adanya KKNi pada perguruan tinggi, saya selaku dosen tidak pernah mendapat sosialisasi atau diikutsertakan dalam pelatihan atau workshop KKNi.¹⁰ Para dosen harusnya memahami dan mampu menerapkan konsep kurikulum berbasis KKNi kepada mahasiswa, pengajaran berdasarkan konsep KKNi mengharapkan pembelajaran berbasis *student centre*.

⁹ Wawancara bersama Hendi Kariyanto (Kaprodi PAI STIT Pagar Alam), Senin, 27 Nov 2017

¹⁰ Wawancara bersama Abdul Haris, dosen STIT Pagar Alam, Selasa, 28 Nov 2017

Senada dengan Bapak Abdul Haris, dosen lain yang bernama Bapak Nasrun Efendi dan Ibu Wulan Saari menerangkan ketidaktahuan tentang adanya perubahan pada kurikulum pendidikan tinggi, tidak ada sosialisasi, workshop atau pelatihan mengenai kurikulum yang mengacu kepada KKNI pada perguruan tinggi, pembelajaran selama ini kami lakukan seperti biasa dengan sistem tanya jawab dan penugasan.¹¹ Dari hasil wawancara singkat ini sepertinya persiapan para dosen yang mengajar di STIT Kota Pagar Alam untuk implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI tergolong belum siap karena mereka tidak mengetahui tentang KKNI. Hal ini akan menjadi kajian penulis untuk mengulasnya dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menganalisis sejauhmana kesiapan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), penelitian ini penulis beri judul **“Kesiapan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam dalam Implementasi Kurikulum yang Mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi suatu masalah penelitian sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pelaksanaan kurikulum yang mengacu pada KKNI pada perguruan tinggi swasta

¹¹ Wawancara bersama Nasrun Efendi, dosen STIT Pagar Alam, Selasa, 28 Nov 2017

2. Permendikbud nomor 73 Tahun 2013 mewajibkan setiap program studi untuk menyusun kurikulum, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dengan mengacu pada KKNI
3. Komitmen perguruan tinggi dalam melaksanakan kurikulum yang mengacu pada KKNI masih rendah
4. Pengurus STIT Pagar Alam belum pernah mendapat atau mengikuti pelatihan tentang kurikulum yang mengacu pada KKNI
5. Para dosen belum pernah mendapatkan pelatihan tentang kurikulum berbasis KKNI di STIT Kota Pagar Alam
6. Sistem pengajaran yang disampaikan oleh dosen belum mengarah pada KKNI, cenderung hanya menyampaikan materi saja

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesiapan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI?

D. Batasan Masalah

Mengingat rumusan masalah di atas, serta karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, agar pembahasan ini lebih terarah dan tercapainya sasaran sebagaimana yang dimaksud dalam judul penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada analisis mengenai:

1. Bagaimana kesiapan pengurus dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di STIT Kota Pagar Alam?

2. Bagaimana kesiapan dosen dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di STIT Kota Pagar Alam?
3. Bagaimana kesiapan sarana dan prasarana dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di STIT Kota Pagar Alam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesiapan implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di STIT Kota Pagar Alam, secara rinci sebagai berikut tujuannya:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimanakah kesiapan pengurus prodi PAI STIT Kota Pagar Alam dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimanakah kesiapan dosen prodi PAI dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di STIT Kota Pagar Alam.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimanakah kesiapan sarana prasarana penunjang perkuliahan yang dimiliki prodi PAI dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di STIT Kota Pagar Alam.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam, memperjelas, maupun memperluas cakupan teori yang

sudah ada tentang kurikulum pendidikan, khususnya di Perguruan Tinggi Islam, untuk mewujudkan terselenggaranya kurikulum di Perguruan Tinggi yang mengacu pada KKNI secara menyeluruh.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kesiapan sebuah program studi dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI
- b. Bagi STIT Kota Pagar Alam, dapat menjadi gambaran sudah sejauhmana kesiapan pengurus prodi PAI dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI
- c. Bagi dosen, sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdasarkan tuntutan kurikulum yang mengacu pada KKNI
- d. Bagi IAIN Bengkulu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hasil penelitian di perpustakaan mengenai kesiapan sebuah program studi dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI
- e. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kajian untuk dikembangkan lebih jauh lagi

G. Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang penulis akan bahas diantaranya adalah :

1. Tesis yang ditulis oleh Primastuty, tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penyusunan Kurikulum KKNI Jenjang Pendidikan S1 Program Studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Prodi Administrasi Publik jenjang S1 FIA UB melibatkan berbagai aktor kebijakan seperti para pimpinan, guru besar dan doktor dan semua dosen yang ada sesuai dengan Tugas Pokok Fungsi (TUPOKSI). Selanjutnya faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan kurikulum KKNI adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, walaupun dalam kenyataan di lapangan dukungan disposisi masih belum optimal. Selanjutnya, metode pengukuran CP terhadap mahasiswa yang biasanya diterapkan oleh Prodi Administrasi Publik jenjang S1 FIA UB adalah dengan cara 1) kuis, 2) diskusi kelompok, 3) kerja kelompok, 4) UTS dan UAS. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Prodi Administrasi Publik FIA UB sudah mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNI sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹²
2. Prosiding yang ditulis oleh Nan Rahminawati, Agus Halimi dan Imam Pamungkas tahun 2015 yang berjudul “Analisis dan Evaluasi terhadap Kurikulum Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Islam Bandung Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)”. Dalam prosiding ini dijelaskan bahwa tentang profil lulusan,

¹² Primastuty Ilmia Hidayatul Insani, “*Implementasi Kebijakan Penyusunan Kurikulum KKNI Jenjang Pendidikan S1 Program Studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*”. (Tesis Fakultas Ilmu Administrasi Univ. Brawijaya. Malang. 2017)

capaian pembelajaran semester yang ditetapkan untuk mata kuliah PAI I-VII di Universitas Islam Bandung. Hasil dari penelitian itu adalah dokumen kurikulum PAI I-VII berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan menyusun terlebih dahulu profil lulusan, capaian pembelajaran, materi, dan rencana pembelajaran semester (sebagai dokumen pembelajaran). Agar dokumen kurikulum ini dapat diimplementasikan, kiranya bagi lembaga terkait, khususnya bagi Lembaga Studi Islam dan Pengembangan Kepribadian (LSIPK) UNISBA, kurikulum mata kuliah PAI I-VII yang telah disusun berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)¹³

3. Jurnal yang ditulis oleh Lili Marliyah tahun 2015 yang berjudul “Analisis Kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Strategi Meningkatkan Standar Kualitas SDM melalui Pendidikan Formal, Informal dan Non formal)” Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa proses implementasi program KKNI baru pada tahap implementasi awal yaitu baru pada tahap sosialisasi dan tahap awal pengembangan KKNI. Selain itu keterjangkauan proses implementasi melalui saluran komunikasi media masa masih terbatas baik secara kuantitatif dan kualitatif. Proses sosialisasi dan implementasi KKNI efektif dilakukan terbatas pada tingkat kelembagaan atau organisasi di lingkungan pemerintahan, terutama jajaran terkait lembaga atau Kemendiknas dan Kemnakertrans

¹³ Nan Rahminawati, Agus Halimi dan Imam Pamungkas, “*Analisis dan Evaluasi terhadap Kurikulum Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Islam Bandung Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)*”. (Prosiding Fakultas Tarbiyah Univ. Islam Bandung. 2015).h.755

serta pemangku kepentingan lain yang terkait dan berada di lapisan atas sosial masyarakat. Perubahan sosial yang telah terjadi dari inovasi KKNI adalah perubahan yang mendasar pada penataan kurikulum pembelajaran, termasuk perubahan model pembelajaran dan perubahan sistem evaluasinya, sedangkan perubahan yang mungkin dan terus akan terjadi adalah perubahan secara bertahap meningkatnya jumlah sumber daya yang bermutu, dan berdaya saing serta aksesibilitas tenaga kerja dipasar tenaga kerja, juga meningkatnya mobilitas akademik dan pengakuan negara lain terhadap Negara Indonesia baik secara bilateral, regional maupun internasional.¹⁴

4. Jurnal yang ditulis oleh Ali Akbar Jono tahun 2016 yang berjudul “Studi Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di LPTK se Kota Bengkulu”. Dengan kesimpulan pada lima perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi bahasa Inggris, yaitu: (a) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Bengkulu (UNIB); (b) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB); (c) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Terbuka Bengkulu (UT); Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu; dan FKIP Universitas Hazairin, ditemukan bahwa dengan kondisi dan persiapan yang dilakukan oleh masing-masing LPTK program studi pendidikan bahasa Inggris yang ada di kota Bengkulu

¹⁴ Lili Marliyah tahun, “Analisis Kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Strategi Meningkatkan Standar Kualitas SDM melalui Pendidikan Formal, Informal dan Non formal)”, (Jurnal, Majalah Ilmiah Pawiyatan Vol. XXII, 2015), h. 102

menunjukkan bahwa dari lima LPTK hanya FKIP Universitas Bengkulu yang memiliki kesiapan dalam menyelenggaraan pendidikan dengan penerapan kurikulum berbasis KKNI. Sementara keempat LPTK lainnya, yaitu; FKIP UPBJJ-UT Bengkulu, FKIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu belum siap menerapkan kurikulum berbasis KKNI karena terkendala pada beberapa hal teknis internal kelembagaan.¹⁵

5. Prosiding yang ditulis oleh Sabar Narimo tahun 2015 yang berjudul “Membangun Daya Saing Lulusan Pendidikan (Akuntansi) Bertumpu pada Penguatan Kurikulum Berbasis KKNI”. Dalam prosiding ini dijelaskan bahwa daya saing merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menghadapi tantangan masa depan. KKNI, hadir untuk menyongsong perwujudan daya saing Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan di era global, diantaranya adalah : 1) Berlakunya pasar bebas (WTO, AEC, APEC, CAFTA) 2) kemajuan teknologi informasi, 3) konvergensi ilmu pengetahuan dan teknologi, 4) ekonomi berbasis pengetahuan, 5) pergeseran kekuatan ekonomi dunia, 6) mutu, relevansi, daya saing dan transformasi sektor pendidikan. Lulusan Pendidikan tinggi perlu dibekali dengan kemampuan yang bisa digunakan untuk membangun daya saing, diantaranya adalah pengetahuan dan ketrampilan profesional yang kompetitif, baik dalambidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan berbahasa asing, teknologi informasi, penguatan

¹⁵ Ali Akbar Jono, “*Studi Implementasi Kurikulum Berbasisi KKNI pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di LPTK se Kota Bengkulu*”, (Jurnal Manhaj, Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu Vol. 4, 2016)

karakter maupun kemampuan global, sehingga lulusan pendidikan tinggi mampu untuk bersaing di tingkat nasional.¹⁶

6. Jurnal Ilmiah PGMI yang ditulis oleh Hendri Purbo Waseso tahun 2017 yang berjudul “Penerapan Kurikulum Berbasis KKNi pada Prodi PGMI di UNSIQ Jawa Tengah”. Dalam jurnal ini dijelaskan kurikulum berbasis KKNi relatif baru dan tidak sedikit dari perguruan tinggi Indonesia yang menghadapi hambatan-hambatan dalam penerapannya sehingga capaian pembelajaran yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa menjadi kurang optimal. Pada prodi PGMI UNSIQ Jawa Tengah yaitu Perencanaan yang dilakukan dosen belum sepenuhnya mengacu pada kurikulum berbasis KKNi, pelaksanaan pembelajaran sudah berorientasi pada *student center learning*. Jika dilihat dari peran dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan belum berjalan efektif, dan penilaian pembelajaran sudah memenuhi tiga aktivitas dasar penilaian yaitu dosen memberi tugas, mahasiswa menunjukkan kinerjanya, dinilai berdasar kriteria dan instrument yang telah dibuat. Khusus untuk instrument penilaian tidak dimiliki oleh semua dosen.¹⁷
7. Jurnal yang ditulis oleh Khairiah tahun 2015 yang berjudul “Pengaruh Implementasi Kurikulum berbasis KKNi terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan PTAIN”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Impementasi/

¹⁶ Sabar Narimo, “*Membangun Daya Saing Lulusan Pendidikan (Akuntansi) Bertumpu pada Penguatan Kurikulum Berbasis KKNi*”, (Prosiding, Seminar Nasional Pendidikan Akuntansi dan Keuangan FKIP Univ. Muhammadiyah Surakarta, 2015), h. 432

¹⁷ Hendri Purbo Waseso, “*Penerapan Kurikulum Berbasis KKNi pada Prodi PGMI di UNSIQ Jawa Tengah*”, (Jurnal Ilmiah PGMI Vol.3, Univ. Sain Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah, 2017), h. 33

Pelaksanaan KKNi melalui beberapa tahapan yaitu menyusun capaian pembelajaran, Merumuskan merumuskan profil lulusan program studi, perumusan standar kompetensi lulusan *learning outcomes*, perumusan capaian pembelajaran program studi (Program *Learning Outcomes*/PLO), perumusan capaian Pembelajaran mata kuliah (*Course Learning Outcomes*/CLO), menemukan konsep kunci dan kata kunci pada capaian pembelajaran mata kuliah, pengembangan RPKPS (Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester). Peningkatan mutu PTKIN dipengaruhi oleh implementasi/penerapan kurikulum KKNi melalui tiga faktor utama yaitu (1) Kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti kualitas tenaga kependidikan, biaya dan sarana belajar; (2) Mutu proses belajar mengajar yang mendorong siswa belajar efektif; dan (3) Mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, dan sikap keterampilan.¹⁸

Dari ketujuh hasil penelitian relevan yang telah dilakukan yang tersebut pada paragraf di atas, penulis yakin bahwa penelitian mengenai Kesiapan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam dalam Implementasi Kurikulum yang Mengacu pada KKNi, belum ada yang mengulasnya.

¹⁸ Khairiah, "Pengaruh Implementasi Kurikulum berbasis KKNi terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan PTAIN", (Jurnal Nuansa Vol. VIII, IAIN Bengkulu, 2015), h. 171

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Kurikulum

1. Pengertian Kurikulum

a. Pengertian secara etimologis

Secara etimologi kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu *curir* atau *curere* yang merupakan istilah bagi tempat berpacu, berlari dalam sebuah perlombaan yang telah dibentuk seperti rute yang harus dilalui oleh peserta perlombaan.¹⁹ Istilah kurikulum sendiri berasal dari dunia olahraga terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi Kuno di Yunani yang mempunyai arti jarak yang harus ditempuh oleh para pelari dari garis *start* sampai ke garis *finish*. Sedangkan kurikulum dalam bahasa Perancis berasal dari kata *courier* yang berarti berlari.²⁰

Dalam bahasa Arab kurikulum disebut dengan istilah مَنْهَاجٌ (*manhaj*) yang berarti jalan terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan atau dalam bahasa Arab di sebut dengan مَنْهَاجُ الدِّرَاسَةِ (*manhaj al-dirasah*)

¹⁹ Ali Mudhofir, *Aplikasi Pengembangan KTSP dan Materi Ajar dalam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta. PT. Rajagrafindo, 2011), h. 1

²⁰ Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2013), h. 2

adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan.²¹

b. Pengertian secara terminologi

Menurut Harold B. Albery, menyatakan bahwa “*all of the activities that are provided for the students by the school*”.²² Sedangkan menurut Willian B. Ragan mengemukakan bahwa “*the curriculum has mean teh sucject taught in school or the course of study*”.²³ Kesimpulan dari pernyataan tersebut mengatakan bahwa kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik, peserta didik harus mempelajari dan menguasai seluruh mata pelajaran, seluruh mata pelajaran dipelajari di sekolah dan tujuan akhirnya yaitu mendapatkan pengakuan proses belajar dalam bentuk ijazah.

Kurikulum dalam istilah pendidikan sebagaimana pendapat Ronald C. Doll “*The curriculum of school is the formal and informal content and proces by which learner gain knowledge and understanding, develop, skill and alter attitudes appreciations and value under the auspice of that school*” (kurikulum sekolah adalah muatan dan proses, baik secara formal maupun informal yang diperuntukan bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan dan

²¹ Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan; Suatu Analisa Psikologi Pendidikan*, (Jakarta, Pustaka Al-hikmah, 1986), h. 176

²² Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2009), h. 3

²³ Willam B. Ragan, *Modern Elementary Curruculum*, (New York: Chicago: San Fransisco, Holt Rinehart and Wiston, 1996), h. 32

pemahaman, mengembangkan keahlian dan mengubah apresiasi sikap dan nilai dengan bantuan sekolah).²⁴

Sedangkan S. Nasution menyatakan bahwa kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya.²⁵ Menurut Nana Saodih, kurikulum adalah program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan, yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis, diberikan kepada peserta didik dibawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi serta kompetensi sosial peserta didik.²⁶

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.²⁷

Dari beberapa definisi di atas, maka yang dimaksud dengan kurikulum adalah segala sesuatu yang wajib diikuti oleh peserta didik yang berpengaruh terhadap pembentukan perkembangan secara efektif,

²⁴ Rusman, *Manajemen Kurikulum*...h. 2

²⁵ S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 94

²⁶ Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h.3

²⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 19.

kognitif dan psikomotorik yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tertentu.

2. Jenis-Jenis Kurikulum

Dalam bukunya yang berjudul *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Abdullah Idi menyebutkan jenis-jenis kurikulum sebagai berikut:²⁸

1). *Separated Subject Curriculum*

Kurikulum ini dipahami sebagai kurikulum mata pelajaran yang terpisah satu sama lainnya. Kurikulum mata pelajaran terpisah berarti kurikulumnya dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang kurang mempunyai keterkaitan dengan mata pelajaran lainnya. Konsekuensinya, anak didik harus semakin banyak mengambil mata pelajaran. Kurikulum mata pelajaran (*subject curriculum*) terdiri dari mata pelajaran (*subject*) yang terpisah-pisah, dan *subject* itu merupakan himpunan pengalaman dan pengetahuan yang diorganisasikan secara logis dan sistematis oleh para ahli kurikulum (*experts*).

2). *Correlated Curriculum*

Kurikulum ini mengandung makna bahwa sejumlah mata pelajaran dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga ruang lingkup bahan yang tercakup semakin luas. Sebagai contoh, pada mata pelajaran fiqih dapat dihubungkan dengan mata pelajaran al-Qur'an Hadis. Pada saat anak didik mempelajari sholat, dapat dihubungkan

²⁸ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 141

dengan pelajaran al-Qur'an (surah al-Fatihah, dan surat lainnya) dan hadis yang berhubungan dengan sholat, dan lain sebagainya.

3). *Broad Field Curriculum*

Kurikulum ini kadang-kadang sering disebut kurikulum *fusi*. Taylor dan Alexander menyebutkan dengan sebutan *the field of subject matter*. Broad fields menghapuskan batas-batas dan menyatukan mata pelajaran yang berhubungan erat. Hilda Taba mengatakan bahwa *the broad fields curriculum is essentially an effort to automatization of curriculum by combining several specific areas large fields* dengan pengertian the broad fields curriculum adalah usaha meningkatkan kurikulum dengan mengkombinasikan beberapa mata pelajaran sebagai contoh sejarah, geografi, ilmu ekonomi, dan ilmu politik disatukan menjadi ilmu pengetahuan social (IPS).

4). *Integrated Curriculum*

Kurikulum terpadu (*integrated kurikulum*) merupakan suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan pelajaran dari berbagai macam pelajaran. Integrasi diciptakan dengan memusatkan pelajaran pada masalah tertentu yang memerlukan solusinya dengan materi atau bahan dari berbagai disiplin atau mata pelajaran. Kurikulum jenis ini membuka kesempatan yang lebih banyak untuk melakukan kerja kelompok, masyarakat dan lingkungan sebagai sumber belajar, mementingkan perbedaan individual anak didik, dan dalam

perencanaan pelajarannya siswa diikutsertakan. Kurikulum memiliki sejumlah pengetahuan secara fungsional dan mengutamakan proses belajarnya. Yang dimaksudkan cara memperoleh ilmu secara fungsional adalah karena ilmu tersebut dikelompokkan berhubungan dengan usaha memecahkan masalah yang ada. Sebagai contoh, dengan belajar membuat radio, anak didik sekaligus mempelajari hal-hal lain yang berkaitan dengan listrik, siaran, penerimaan, dan sebagainya.²⁹

3. Komponen-Komponen Kurikulum

Kurikulum sebagai sistem keseluruhan memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen tersebut diantaranya adalah: a). Tujuan b). Konten c). Metode d). Organisasi dan e). Evaluasi.

a). Tujuan Kurikulum

Tujuan kurikulum setiap satuan pendidikan harus mengacu ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam skala yang lebih luas, kurikulum merupakan suatu alat pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Kurikulum menyediakan kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk melakukan proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai target tujuan

²⁹ S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993), h. 111

pendidikan nasional khususnya dan sumber daya manusia yang berkualitas umumnya. Tujuan ini dikategorikan sebagai tujuan umum kurikulum.³⁰

Tujuan merupakan hal yang ingin dicapai oleh lembaga secara keseluruhan, meliputi tujuan *domain kognitif*, *domain afektif* dan *domain psikomotorik*. Hal ini dicapai dalam rangka mewujudkan lulusan dalam satuan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan (*kognitif*), sikap (*afektif*) dan keterampilan (*psikomotor*) disebut tujuan lembaga (*institusional*). Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan yang berkaitan dengan setiap bidang studi disebut tujuan kurikuler.³¹

b). Konten Kurikulum

Konten kurikulum merupakan standar isi yang mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, hal ini berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Konten kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran, yang termasuk dalam standar isi adalah: kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang

³⁰ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara :2010). h. 24

³¹ Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada:1993), h.4

pendidikan. Standar Isi ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 22 Tahun 2006.³² Standar isi ini meliputi lingkup materi dan tingkat kompetensi yang mencakup kerangka dasar dan struktur keilmuan, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan akademik. Adapun standar isi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:³³

(1) Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Kurikulum merupakan suatu perangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan dan tujuan maupun pendekatan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kerangka dasar dan struktur kurikulum merupakan rambu-rambu yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman penyusunan kurikulum.

(2) Beban Belajar

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan beban belajar adalah sebagai berikut:

- (a). Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan sistem satuan kredit semester (SKS) ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

³² Khaeruddin, Mahfud Junaedi, dkk, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jogjakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 53

³³ E. Mulyasa, *Kurikulum Yang Disempurnakan Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h.25

(b). Beban SKS minimal dan maksimal bagi program pendidikan tinggi ditetapkan dengan peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP, sedangkan beban SKS efektif diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

(3). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.³⁴

(4). Kalender Pendidikan/ Akademik

Kalender pendidikan meliputi permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Adapun hari libur dapat berbentuk jeda tengah semester selama- lamanya satu minggu dan jeda antar semester. Kalender pendidikan/ akademik untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

c). Metode

Metode dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu metode dalam pengertian luas dan metode dalam pengertian sempit. Metode dalam pengertian sempit artinya cara yang digunakan untuk menyampaikan suatu materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Sedangkan metode dalam arti luas berarti tidak hanya sekedar cara

³⁴ E. Mulyasa, *Kurikulum yang Disempurnakan*, ..., h.25

mengajar tetapi lebih dari itu yaitu membicarakan mengenai bagaimana membangun nilai, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan peserta didik.³⁵

Ada beberapa metode atau strategi yang dapat digunakan dalam mengajar. Rowntree membagi metode atau strategi mengajar tersebut atas *Exposition-Discovery Learning* dan *Group-Individual Learning*. Ausubel and Robinson membaginya atas strategi *Reception Learning-Discovery Learning* dan *Rote Learning-Meaning Learning*.³⁶

a). *Reception/ Exposition Learning-Discovery Learning*

Reception dan *Exposition* sesungguhnya mempunyai makna yang sama, hanya berbeda dalam pelakunya. *Reception Learning* dilihat dari sisi siswa sedangkan *exposition* dilihat dari segi guru. Dalam *exposition* atau *reception learning* keseluruhan bahan ajar disampaikan kepada siswa dalam bentuk akhir atau bentuk jadi, secara lisan maupun tertulis. Siswa tidak dituntut untuk mengolah atau melakukan aktivitas lain kecuali menguasainya. Dalam *discovery learning* bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, mengkategorikan, menganalisis, mereorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut siswa

³⁵ Lias Hasibuan, *Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hlm. 39-40

³⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*h. 107-108

akan menguasainya, menerapkan serta menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya.³⁷

b). *Rote learning-Meaningful learning*

Dalam *rote learning* bahan ajar disampaikan kepada siswa tanpa memperhatikan arti atau maknanya bagi siswa. Siswa menguasai bahan ajar dengan menghafalkannya. Dalam *meaningful learning* penyampaian bahan mengutamakan maknanya bagi siswa.³⁸

c). *Group Learning-Individual Learning*

Pelaksanaan *discovery learning* menuntut aktivitas belajar yang bersifat individual atau dalam kelompok-kelompok kecil.³⁹

d). Organisasi Kurikulum

Organisasi kurikulum terdiri dari beberapa bentuk, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri.

- a) Mata Pelajaran Terpisah-pisah (*Isolated Subjects*)
- b) Mata Pelajaran Berkorelasi (*correlated*)
- c) Bidang Studi (*broadfield*)
- d) Program yang Berpusat pada Anak (*childcentered*)
- e) *Core Program*
- f) *Electic Program*

e). Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu komponen kurikulum, karena

³⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*h. 107

³⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*h. 108

³⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*h. 108

kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Dengan evaluasi dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan dan keberhasilan pembelajaran. Berdasarkan informasi tersebut, dapat dibuat keputusan tentang kurikulum itu sendiri, pembelajaran, kesulitan dan upaya bimbingan yang perlu dilakukan.⁴⁰

Terdapat beberapa jenis evaluasi kurikulum yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik evaluasi diantaranya adalah:

- (1) Evaluasi Konteks
- (2) Evaluasi Dokumen
- (3) Evaluasi Proses
- (4) Evaluasi Produk/ Hasil

Keempat evaluasi tersebut didasarkan atas kegiatan yang dilakukan dalam proses pengembangan suatu kurikulum. Evaluasi konteks berbeda dengan evaluasi dokumen, proses, dan hasil belajar. Evaluasi konteks adalah evaluasi terhadap lingkungan dimana kurikulum tersebut dikembangkan dan akan dilaksanakan. Konteks adalah lingkungan sosial, ekonomi, budaya, seni, politik, pelaksanaan kehidupan beragama, teknologi dan fisik. Sedangkan evaluasi dokumen adalah suatu produk rekayasa dan sumber informasi untuk evaluasi dokumen adalah orang yang terlibat pada pekerjaan menghasilkan dokumen kurikulum dan yang menggunakan dokumen

⁴⁰ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*,...h.29

kurikulum. evaluasi proses berkenaan dengan aktivitas yang dilakukan secara terjadwal dan tidak terjadwal dimana komunikasi dan interaksi yang berbeda terjadi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses. Sedangkan evaluasi hasil memiliki karakteristik dimana fokus evaluasi dimunculkan dalam berbagai bentuk hasil belajar yang dimiliki peserta didik.⁴¹

(1) Evaluasi Konteks

Evaluasi terhadap konteks berkaitan dengan berbagai aspek yang melahirkan suatu dokumen kurikulum. dalam situasi tertentu orang melakukan evaluasi mengenai tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan dan sering disebut dengan istilah *need assessment*. *Need assessment* adalah salah satu bentuk evaluasi konteks. *Need assessment* dilakukan untuk menentukan apa yang diperlukan masyarakat yang akan dipenuhi oleh suatu lembaga.¹⁸

Selain *need assessment* evaluasi jenis ini adalah evaluasi mengenai kesesuaian antara ide kurikulum dengan lingkungan sosial-budaya dimana suatu kurikulum akan dilaksanakan. Sebagai contoh, evaluasi yang harus dilakukan oleh lembaga terhadap konteks yang diperlukan ketika akan mengembangkan kurikulum. Selain itu, evaluasi terhadap fasilitas yang dimiliki lembaga, kondisi kerja, jumlah tenaga pengajar termasuk kualifikasi dan beban tugas pengajar, keadaan fisik lembaga dan

⁴¹ Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 136

sumber belajar yang dimiliki oleh lembaga. Evaluasi konteks diarahkan juga pada dukungan masyarakat terhadap lembaga. Dukungan masyarakat berupa bantuan dana, bantuan fasilitas dan partisipasi dalam kegiatan belajar.⁴²

(2) Evaluasi Dokumen

Evaluasi dokumen terdiri dari evaluasi terhadap dokumen yang dihasilkan oleh Pemerintah dan dokumen kurikulum yang dihasilkan oleh satu satuan pendidikan terhadap dokumen kurikulum berkenaan dengan proses pengembangan dokumen. Evaluasi kesinambungan dalam evaluasi dokumen kurikulum berkenaan dengan kesinambungan anatar standar kompetensi, kompetensi dasar dengan komponen dokumen kurikulum lainnya seperti tujuan, konten, proses pembelajaran dan assesmen hasil belajar.⁴³

(3) Evaluasi Proses

Interaksi dan komunikasi selalu menjadi fokus utama evaluasi proses. Suasana kelas, kelengkapan fasilitas belajar dan mengajar, jadwal, tugas yang harus dilakukan pengajar dan peserta didik baik di dalam maupun di luar kelas dan dukungan masyarakat menjadi fokus yang mulai menarik perhatian banyak kajian evaluasi kurikulum selain fokus utamas. Faktor lain yang mendapatkan perhatian adalah aspek biaya. Kajian terhadap biaya

⁴² Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum...*h.137

⁴³ Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum...*h.138

operasional dalam melaksanakan proses adalah sesuatu yang dikaji dengan benefit yang diperoleh atau dengan hasil belajar yang dimiliki peserta didik.⁴⁴

(4). Evaluasi Produk/ Hasil

Hasil dibedakan atas dua istilah yaitu *output* dan *outcomes*. *Output* diartikan sebagai hasil langsung yang dimiliki peserta didik dari suatu proses pembelajaran di suatu satuan pendidikan. Sedangkan *outcomes* adalah hasil setelah beberapa saat yang bersangkutan menyelesaikan proses pendidikannya di suatu satuan pendidikan. Evaluasi hasil didasarkan pada kategori hasil belajar. Kategori hasil belajar yang umumnya dikenal dan banyak digunakan adalah hasil belajar Benjamin S. Bloom yang dikenal dengan istilah *Taxonomy Bloom*.⁴⁵

B. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Menurut Nurdin implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk

⁴⁴ Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum...*h.140

⁴⁵ Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum...*h.142

mencapai tujuan kegiatan.⁴⁶ Menurut Mulyasa implementasi adalah “proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindak praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai sikap”.⁴⁷

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.⁴⁸

Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.⁴⁹

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.⁵⁰ Grindle, memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas

⁴⁶ Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002). H. 70

⁴⁷ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Rosdakarya, 2010). h.93

⁴⁸ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, h. 21.

⁴⁹ Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses 13 April 2018

⁵⁰ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, h. 148.

implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi, “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.⁵¹

Dari berbagai defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Implementasi Kurikulum

Sebuah kurikulum yang telah dikembangkan tidak berarti jika tidak diimplementasikan, dalam artian digunakan secara aktual di sekolah dan di kelas. Dalam implementasi ini, tentu saja harus diupayakan penanganan terhadap pengaruh faktor-faktor tertentu, misalnya kesiapan sumber daya, faktor lingkungan, dan lain-lain.

⁵¹ Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, 1983, hlm 139.

Fase implementasi kurikulum sudah banyak didiskusikan tokoh dan pakar pendidikan. Hamalik mengutip pendapat Miller dan Seller menyatakan bahwa kurikulum merupakan suatu penerapan konsep, ide, program atau tatanan kurikulum kedalam praktik pembelajaran atau berbagai aktivitas baru, sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah.⁵² Kemudian Saylor dan Alexander dalam Nurdin, berpendapat bahwa implementasi sebagai proses pengajaran, mereka mengemukakan bahwa biasanya pengajaran adalah implementasi kurikulum desain, yang mencakup aktivitas pengajaran dalam bentuk interaksi antara guru dan siswa dibawah naungan sekolah.⁵³

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, dengan senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang. Implementasi kurikulum juga merupakan aktualisasi suatu rencana atau program kurikulum dalam bentuk pembelajaran.

Implementasi kurikulum dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Menurut Hamalik, faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum yaitu

⁵² Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Rosdakarya, 2009).h. 237

⁵³ Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi*,...h. 72

karakteristik kurikulum, strategi implementasi dan karakteristik pengguna kurikulum.⁵⁴ Karakteristik kurikulum mencakup tujuan, fungsi, sifat, serta ruang lingkup bahan ajar. Dengan mengetahui karakteristik suatu kurikulum maka implementasi kurikulum dapat disesuaikan dengan karakteristik kurikulum tersebut. Faktor selanjutnya yaitu karakteristik pengguna kurikulum. Dalam hal ini guru yang memegang peran utama karena guru yang menerapkan secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Maka karakteristik ini meliputi beberapa aspek yang harus dimiliki guru yaitu pengetahuan tentang kurikulum, keterampilan, serta kemampuan guru menerjemahkan kurikulum dalam pembelajaran. Sementara untuk strategi implementasi kurikulum dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti seminar, penataran, diskusi profesi, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendorong efektifnya penggunaan kurikulum di sekolah.

Sementara itu, Mulyasa mengutip pendapat Mars mengenai tiga faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum yaitu dukungan dari pimpinan lembaga pendidikan, dukungan dari para guru, dan dukungan dari dalam diri guru yang merupakan unsur yang paling utama.⁵⁵ Dengan demikian, dalam pengimplementasian kurikulum diperlukan komitmen semua pihak yang terlibat dan didukung oleh kemampuan profesional guru sebagai salah satu pengguna kurikulum. Karena pada dasarnya keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, maka

⁵⁴ E. Mulyasa, *Kurikulum yang Disempurnakan*,...h. 94

⁵⁵ E. Mulyasa, *Kurikulum yang Disempurnakan*, ...h. 94

banyak pihak yang terkait dalam dunia pendidikan seperti orang tua, sekolah, masyarakat maupun pemerintah. Tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, kurikulum akan dirasa sulit untuk diimplementasikan.⁵⁶

Namun dari beberapa faktor tersebut, guru yang menjadi faktor utama karena guru yang mengimplementasikan kurikulum secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi kurikulum di sekolah sangat ditentukan oleh faktor guru, karena bagaimanapun baiknya sarana pendidikan jika guru tidak melaksanakan tugasnya dengan baik maka implementasi kurikulum tidak akan berjalan dengan baik.⁵⁷

Implementasi kurikulum mencakup semua kegiatan melaksanakan desain atau dokumen kurikulum, meliputi pembelajaran, pelatihan, bimbingan, pengelolaan kelas, pemberian tugas, evaluasi, kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler, pengembangan media dan fasilitas belajar mengajar, dan lain sebagainya. Secara sempit implementasi kurikulum berkenaan dengan kegiatan pembelajaran, pembelajaran teori dan praktik di kelas, di luar kelas dan di luar sekolah, penugasan, bimbingan dan evaluasi hasil belajar.⁵⁸

Implementasi kurikulum seharusnya menempatkan pengembangan kreativitas siswa lebih dari penguasaan materi. Dalam kaitan ini, siswa ditempatkan sebagai subjek dalam proses pembelajaran.

Komunikasi dalam pembelajaran yang multi arah seharusnya

⁵⁶ E. Mulyasa, *Kurikulum yang Disempurnakan*,... h. 96

⁵⁷ E. Mulyasa, *Kurikulum yang Disempurnakan*,... h. 96

⁵⁸ E. Mulyasa, *Kurikulum yang Disempurnakan*,... h. 97

dikembangkan sehingga pembelajaran kognitif dapat mengembangkan kemampuan berfikir siswa tidak hanya penguasaan materi saja.

Selain itu, pembelajaran sebaiknya dikembangkan dengan menekankan pada aktivitas siswa untuk mencari pemahaman akan objek, menganalisa dan merekonstruksi sehingga terbentuk pengetahuan baru dalam diri siswa. Oleh karena itu, pembelajaran bukan hanya mentransfer atau memberikan informasi, namun lebih bersifat menciptakan lingkungan yang memungkinkan siswa dapat berfikir kritis dan membentuk pengetahuan.

3. Tahapan Implementasi Kurikulum

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis. Sebelum diimplementasikan, rancangan sebuah kurikulum perlu diuji coba dan disosialisasikan. Menurut Arifin, uji coba di lapangan bertujuan untuk mengetahui kemungkinan pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum, hambatan atau masalah apa yang akan terjadi, bagaimana upaya mengatasi hambatan atau pemecahan masalah tersebut.⁵⁹ Dengan adanya tahap uji coba ini diharapkan kurikulum benar-benar dapat diterapkan sesuai dengan tujuan kurikulum tersebut.

Sosialisasi dalam implementasi kurikulum sangat penting dilakukan untuk mencapai keberhasilan penerapan suatu kurikulum. Menurut Mulyasa, “seharusnya pemerintah mengembangkan desain yang

⁵⁹ Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Rosdakarya, 2011). h. 44

jelas dan menyeluruh agar konsep kurikulum yang diimplementasikan dapat dipahami oleh para pelaksana secara utuh, tidak ditangkap secara parsial, keliru atau salah paham”.⁶⁰ Hal tersebut bertujuan agar semua pihak yang terlibat dalam implementasi di lapangan paham dengan perubahan yang harus dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga mereka memberikan dukungan terhadap perubahan kurikulum yang dilakukan. Oleh karena itu, sosialisasi merupakan langkah penting yang akan menunjang dan menentukan keberhasilan perubahan kurikulum sehingga sosialisasi perlu dilakukan secara matang kepada berbagai pihak agar kurikulum baru yang ditawarkan dapat dipahami dan diterapkan secara optimal.

Setelah kurikulum diuji coba dan disosialisasikan kepada berbagai pihak terkait, maka selanjutnya kurikulum siap diimplementasikan. Menurut Hamalik, implementasi kurikulum mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengembangan program mencakup program tahunan, semester atau catur wulan, aulanan, mingguan dan harian. Selain itu, ada juga program bimbingan dan konseling atau program remedial.
- b. Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan

⁶⁰ E. Mulyasa, *Kurikulum yang Disempurnakan*,... h. 48

lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik tersebut.

- c. Evaluasi proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum catur wulan atau semester serta penilaian akhir formatif dan sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum.⁶¹

C. Kurikulum Pendidikan Tinggi

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki empat tahapan pokok, yaitu *input*, *process*, *output* dan *outcomes*. Pertama adalah tahap *input* yang baik memiliki beberapa indikator, antara lain; nilai kelulusan yang baik di berbagai aspek penilaian, namun yang lebih penting adalah adanya sikap dan motivasi belajar yang memadai.

Kedua adalah tahap proses pembelajaran (*process of learning*) yang baik memiliki beberapa unsur yang harus diterapkan, antara lain: (1) Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang jelas, (2) Organisasi PT yang sehat, (3) Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel, (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja, (5) Kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia akademik dan non akademik yang handal, serta profesional, (6) Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai. Tahap ini

⁶¹ Omar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, ...h. 238

merupakan perjuangan PT dalam menciptakan tenaga yang sesuai dengan profil lulusan PT.

Tahap terakhir yaitu *output* dari pembelajaran pendidikan tinggi. Tahap ini mempunyai beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan PT, yaitu : (1) IPK, (2) lama studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasarkerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan kepercayaan PT di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (*input*).

Beberapa konsep atau peran kurikulum pada lembaga pendidikan tinggi sebagai berikut:

- a. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi.
- b. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁶²

⁶² Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 19

- c. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.⁶³

Berdasarkan beberapa konsep tentang kurikulum tersebut, kurikulum terdiri atas seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, maupun bahan kajian, pelajaran, penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan.

Kurikulum pendidikan tinggi mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Apabila dirunut kebelakang, perubahan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia ber-paradigma shift, yaitu Pertama, pada tahun 1994, kurikulum Perguruan Tinggi menggunakan Kurikulum Berbasis Isi (KBI) yang berorientasi pada pokok-pokok sistem nasional dan bersifat menguatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana Peraturan Mendikbud RI No. 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Kedua, pada tahun 2000-2010 kurikulum perguruan tinggi mengalami pergeseran parasigma menuju konsep Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada pasal 97 ayat 1.⁶⁴

⁶³ Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014, Pasal 1 Butir 6, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

⁶⁴ Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum Pendidikan Tinggi Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. (Bandung: Rosdakarya, 2016). h. 70

Adapun implementasi kurikulum di Perguruan Tinggi mencakup tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.⁶⁵ Penjabarannya sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses mempersiapkan kegiatan pembelajaran secara sistematis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, seperti menyusun silabus dan satuan acara perkuliahan.⁶⁶ Silabus dan SAP merupakan salah satu indikator profesionalisme dosen yang senantiasa menyiapkan proses pembelajarannya agar pembelajaran dapat efektif, efisien dan menarik.⁶⁷

Silabus adalah rancangan tertulis serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar.⁶⁸ Sedangkan SAP merupakan penjabaran dari silabus secara lebih operasional dan terperinci yang dijadikan pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.⁶⁹

SAP ditujukan pada awal semester oleh dosen sebelum memulai perkuliahan, hal ini dapat membantu dosen dan mahasiswa dalam persiapan selama proses perkuliahan karena didalamnya terdapat rincian

⁶⁵ Anik Ghufroon, *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Kajian Kritis terhadap Implementasi dan Implikasinya*, Majalah Ilmiah Pondasi Pendidikan (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, 2003), h. 3

⁶⁶ Bintoro Tjokroamidjoyo, *Perencanaan Pembangunan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1977). h. 12

⁶⁷ Arief Furchan dan Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi Agama Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 98

⁶⁸ Ella Yulaelawati, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Bandung: Pakar Raya, 2000), h. 123

⁶⁹ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 268

dari silabus pembelajaran mata kuliah. SAP pun merupakan salah satu bentuk akuntabilitas atau jaminan kualitas dosen dalam menjalankan tugasnya.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan mewujudkan apa yang telah direncanakan dalam pembelajaran di kelas. Pelaksanaan pembelajaran erat kaitannya dengan kurikulum karena harus menyesuaikan dengan karakteristik kurikulum yang digunakan. Pelaksanaan juga merupakan inti dari kurikulum. Dalam kurikulum KBK, pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran, model pembelajaran, prosedur pembelajaran dan pengelolaan peserta didik dan pengelolaan kelas.⁷⁰

c. Evaluasi

Evaluasi sangat bergantung pada model kurikulum yang ditentukan. Berlakunya kurikulum baru pada perguruan tinggi ikut menentukan model evaluasi yang digunakan karena evaluasi merupakan salah satu bagian komponen kurikulum. Adapun model penilaian atau evaluasi pada kurikulum KBK dikenal dengan istilah penilaian berbasis kelas (PBK).⁷¹ PBK merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan dan penggunaan informasi tentang proses dan hasil belajar mahasiswa. PBK menggunakan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan,

⁷⁰ Sukiman, *Pengembangan Kurikulum...*h. 181

⁷¹ Depdiknas, *Penilaian Berbasis Kelas*, (Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2002), h. 1

bukti-bukti, akurat dan konsisten secara terpadu dalam kegiatan pembelajaran.⁷²

D. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

1. Pengertian KKNI

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait sistem pendidikan nasional yang memungkinkan hasil dari sebuah pendidikan tinggi yang dilengkapi dengan perangkat yang memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di dunia. KKNI menurut Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 adalah kerangka yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.⁷³

Sedangkan menurut Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyetarakan, mengintegrasikan capaian pembelajaran di jalur pendidikan formal maupun informal atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi. Adapun capaian pembelajaran yang dimaksud yaitu internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan terstruktur mencakup keahlian/ bidang tertentu atau pengalaman kerja.

⁷² Depdiknas, *Penilaian Berbasis Kelas...* h. 2

⁷³ Perpres Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI Pasal 1 Ayat 1

2. Peran KKNI

Secara umum KKNI diharapkan dapat melahirkan suatu sistem penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan di Indonesia dan memiliki peran sebagai berikut :⁷⁴

1. KKNI harus mampu secara komprehensif dan berkeadilan menampung kebutuhan semua pihak yang terkait dengan ketenagakerjaan serta memperoleh kepercayaan masyarakat luas
2. KKNI diharapkan memiliki jumlah jenjang dan deskripsi kualifikasi yang jelas dan terukur serta secara transparan dapat dipahami oleh pihak penghasil dan pengguna tenaga kerja baik di tingkat nasional, regional maupun internasional
3. KKNI yang akan dikembangkan harus bersifat lentur (*flexible*) sehingga dapat mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan keilmuan, keahlian dan keterampilan di tempat kerja serta selalu dapat diperbaharui secara berkelanjutan. Sifat lentur yang dimiliki KKNI harus dapat pula memberikan peluang seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai jenjang kualifikasi yang sesuai melalui berbagai jalur pendidikan, pelatihan atau pengalaman kerja termasuk perpindahan dari satu jalur ke jalur kualifikasi yang lain.
4. KKNI hendaknya menjadi salah satu pendorong program-program peningkatan mutu baik dari pihak penghasil maupun pengguna tenaga

⁷⁴ Tim KKNI Kemenristek Dikti, *Dokumen 001 KKNI*, (Dirjen Pemberdayaan dan Kemahasiswaan: Kemenristek Dikti, 2015), h. 6-7

kerja sehingga kesadaran terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia dapat diwujudkan secara nasional.

5. KKNI harus mencakup pengembangan sistem penjaminan mutu yang memiliki fungsi pemantauan (*monitoring*) dan pengkajian (*assessment*) terhadap badan atau lembaga yang terkait dengan proses-proses penyetaraan capaian pembelajaran dengan jenjang kualifikasi yang sesuai.
6. KKNI harus secara akuntabel dapat memberikan peluang pergerakan tenaga kerja dari Indonesia ke negara lain atau sebaliknya.
7. KKNI harus dapat menjadi panduan bagi para pencari kerja yang baru maupun lama dalam upaya meningkatkan taraf hidup atau karir ditempat kerja masing-masing.
8. KKNI diharapkan dapat menguatkan integrasi dan koordinasi badan atau lembaga penjaminan atau peningkatan mutu yang telah ada, seperti Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Badan Akreditasi Nasional (BAN), Badan Nasional Sertifikasi Pekerja (BNSP), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan lain-lain.
9. KKNI diharapkan mencakup sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sedemikian sehingga dapat menjamin terjadinya fleksibilitas pengembangan karir atau peningkatan jenjang kualifikasi.

3. Jenjang Kualifikasi pada KKNI

KKNI menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9

sebagai kualifikasi tertinggi. Penetapan jenjang 1 sampai 9 dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari sisi penghasil (*supply push*) maupun pengguna (*demand pull*) tenaga kerja. Deskripsi setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi negara secara menyeluruh, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum, dan lain-lain, serta aspek aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika, yaitu komitmen untuk tetap mengakui keragaman agama, suku, budaya, bahasa dan seni sebagai ciri khas bangsa Indonesia.⁷⁵

Penjenjangan kualifikasi pada KKNI dengan jenjang sembilan sebagai jenjang tertinggi tidak serta-merta berarti bahwa jenjang tertinggi KKNI tersebut lebih tinggi dari jenjang kualifikasi yang berlaku di Eropa (8 jenjang) dan Hongkong (7 jenjang) atau sebaliknya lebih rendah dari jenjang kualifikasi yang berlaku di Selandia Baru (10 jenjang). Hal ini lebih tepat dimaknai bahwa jenis kualifikasi pada KKNI dirancang untuk memungkinkan setiap jenjang kualifikasinya bersesuaian dengan kebutuhan bersama antara penghasil dan pengguna lulusan, kultur pendidikan/ pelatihan/ kursus di Indonesia saat ini dan gelar lulusan setiap jalur pendidikan yang berlaku di Indonesia.⁷⁶

⁷⁵ Tim KKNI Kemenristek Dikti, *Dokumen 001 KKNI*, ..., h. 6

⁷⁶ Tim KKNI Kemenristek Dikti, *Dokumen 001 KKNI*, ..., h. 7

Di dalam pengembangannya, jenjang-jenjang kualifikasi pada KKNI merupakan jembatan untuk menyetarakan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal dengan kompetensi kerja yang dicapai di dunia kerja, melalui pelatihan berbasis kompetensi (*Competence Based Training = CBT*) atau program peningkatan jenjang karir. Secara skematik pencapaian setiap jenjang atau peningkatan ke jenjang yang lebih tinggi pada KKNI dapat dilakukan melalui empat tapak jalan (*pathways*) atau kombinasi dari keempatnya. Tapak jalan tersebut seperti diilustrasikan pada Gambar-1 terdiri dari tapak jalan melalui pendidikan formal, pengembangan profesi, peningkatan karir di industri, dunia kerja atau melalui akumulasi pengalaman individual.⁷⁷

Dengan pendekatan tersebut maka KKNI dapat dijadikan rujukan oleh 4 (empat) pemangku kepentingan yang menggunakan pendekatan masing-masing dalam peningkatan jenjang kualifikasi. Misalnya, sektor pendidikan formal dapat menggunakan KKNI sebagai rujukan dalam merencanakan sistem pembelajaran perguruan tinggi di Indonesia sehingga dapat dengan tepat memposisikan kemampuan lulusannya pada salah satu jenjang kualifikasi KKNI dan memperkirakan kesetaraannya dengan jenjang karir di dunia kerja.⁷⁸

Dari sisi lain, pengguna lulusan, asosiasi industri atau dunia kerja secara umum juga dapat merujuk KKNI untuk memperkirakan kualifikasi yang dimiliki oleh pencari kerja dan memposisikannya pada jenjang

⁷⁷ Tim KKNI Kemenristek Dikti, *Dokumen 001 KKNI, ...*, h. 7

⁷⁸ Tim KKNI Kemenristek Dikti, *Dokumen 001 KKNI, ...*, h. 7

karir serta memberikan remunerasi yang sesuai. Hal yang sama juga dapat dilakukan oleh penjenjangan keprofesian di ranah asosiasi profesi. Pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat luas juga diakui memiliki jenjang kualifikasi tertentu dalam KKNi karena memiliki pengalaman otodidak yang memenuhi atau sesuai dengan deskripsi kualifikasi pada jenjang tertentu. Konsep dasar KKNi tersebut mengandung makna kesetaraan dan pengakuan yang disepakati bersama antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu KKNi harus dilengkapi dengan mekanisme dan aturan-aturan yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan adanya saling pengakuan.

Dalam ranah pendidikan, dunia kerja dan keprofesian, mekanisme dan aturan-aturan tersebut mungkin telah ada dan disusun dengan baik, akan tetapi untuk ranah masyarakat luas hal ini memerlukan panataan yang komprehensif dengan memperhatikan unsur-unsur mutu, akuntabilitas dan integritas.⁷⁹



Gambar 2.1 Penjenjangan KKNi melalui 4 jejak jalan (pathways)⁸⁰

⁷⁹ Tim KKNi Kemenristek Dikti, *Dokumen 001 KKNi*, ..., h. 8

⁸⁰ Tim KKNi Kemenristek Dikti, *Dokumen 001 KKNi*, ..., h. 8

Secara konseptual, setiap jenjang kualifikasi dalam KKNI disusun oleh enam parameter utama yaitu (a) Ilmu pengetahuan (*science*), (b) pengetahuan (*knowledge*), (c) pengetahuan praktis (*know-how*), (d) keterampilan (*skill*), (e) afeksi (*affection*) dan (f) kompetensi (*competency*). Ke-enam parameter yang terkandung dalam masing-masing jenjang disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut Deskriptor Kualifikasi. Dengan demikian ke-9 jenjang kualifikasi dalam KKNI memuat deskriptor-deskriptor yang menjelaskan kemampuan di bidang kerja, lingkup kerja berdasarkan pengetahuan yang dikuasai dan kemampuan manjerial.

Uraian tentang parameter pembentuk setiap Deskriptor KKNI adalah sebagai berikut:⁸¹

1. Kemampuan di bidang kerja. Komponen ini menjelaskan kemampuan seseorang yang sesuai dengan bidang kerja terkait, mampu menggunakan metode/cara yang sesuai dan mencapai hasil dengan tingkat mutu yang sesuai dan memahami kondisi atau standar proses pelaksanaan pekerjaan tersebut.
2. Lingkup kerja berdasarkan pengetahuan yang dikuasai, dimaksudkan bahwa deskriptor kualifikasi harus menjelaskan cabang keilmuan yang dikuasai seseorang dan mampu mendemonstrasikan kemampuan berdasarkan cabang ilmu yang dikuasainya tersebut.

⁸¹ Tim KKNI Kemristek Dikti, *Dokumen 001 KKNI, ...*, h. 9

3. Kemampuan manajerial, menunjukkan bahwa deskriptor kualifikasi harus menjelaskan lingkup tanggung jawab seseorang dan standar sikap yang dimilikinya untuk melaksanakan pekerjaan di bawah tanggung jawabnya tersebut.

Penjenjangan dalam KKNi memiliki karakteristik. dimana dalam sSetiap deskriptor KKNi untuk pada jenjang kualifikasi yang sama dapat mengandung atau terdiri dari komposisi unsur-unsur keilmuan (*science*), pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*know-how* atau *understanding*) dan keterampilan (*skill*) yang bervariasi satu dengan yang lain. Hal ini berarti pula bahwa setiap capaian pembelajaran suatu pendidikan dapat memiliki kandungan keterampilan (*skill*) yang lebih menonjol dibandingkan dengan keilmuan-nya (*science*), akan tetapi diberikan pengakuan penjenjangan kualifikasi yang setara.

Karakteristik lainnya adalah jenjang kualifikasi yang semakin tinggi akan memiliki deskriptor KKNi yang semakin berkarakter keilmuan (*science*), sedangkan semakin rendah suatu kualifikasi akan semakin menekankan pada penguasaan keterampilan (*skill*).⁸²

4. Tujuan KKNi

Pengembangan KKNi memiliki tujuan yang bersifat umum dan khusus. Tujuan umum mencakup hal-hal yang dapat mendorong integrasi antara sektor-sektor terkait, sedangkan tujuan khusus mencakup aspek-

⁸² Tim KKNi Kemenristek Dikti, *Dokumen 001 KKNi, ...*, h. 9

aspek strategis pengembangan kerangka dan jenjang kuaifikasi tersebut.

Kedua tujuan tersebut diuraikan berikut ini:⁸³

a). Tujuan Umum

1. Meningkatkan komitmen nasional untuk menghasilkan sumberdaya manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing internasional;
2. Mendorong peningkatan mutu dan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional;
3. Membangun proses pengakuan dan kesetaraan kualifikasi yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja yang diakui oleh dunia kerja nasional dan internasional;
4. Meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Mendorong meningkatnya mobilitas pelajar, mahasiswa, dan tenaga kerja antara negara berbasis kesetaraan kualifikasi.

b). Tujuan Khusus

1. Memperoleh korelasi positif antara mutu luaran, capaian pembelajaran dan proses pendidikan di semua tingkat termasuk di tingkat perguruan tinggi;

⁸³ Tim KKNi Kemristek Dikti, *Dokumen 002 KKNi, ...*, h. 4-5

2. Mendorong penyesuaian capaian pembelajaran dan penyetaraan mutu lulusan pendidikan terhadap tingkat kualifikasi yang sesuai dan diakui oleh pengguna lulusan;
3. Menciptakan pedoman-pedoman pokok bagi sekolah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan aturan dan mekanisme pengakuan terhadap hasil pembelajaran lampau (*Recognition of Prior Learning*) atau kekayaan pengalaman yang dimiliki seseorang;
4. Menciptakan jembatan saling pengertian antara penghasil dan pengguna lulusan dari proses pendidikan dan pelatihan sehingga secara berkelanjutan dapat membangun kapasitas dan meningkatkan daya saing bangsa dalam sektor sumberdaya manusia;
5. Memberi panduan bagi pengguna lulusan untuk melakukan penyesuaian kualifikasi dalam mengembangkan program-program pendidikan berkelanjutan (*continuing education programs*) atau belajar sepanjang hayat (*life-long learning programs*);
6. Menjamin terjadinya peningkatan mobilitas dan aksesibilitas tenaga kerja Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional;
7. Memperoleh pengakuan terhadap KKNI dari negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia;

8. Mendorong peningkatan mobilitas dan kerjasama akademik antara pendidikan tinggi di Indonesia dengan pendidikan tinggi negara-negara lain untuk mencapai saling pengertian, solidaritas dan perdamaian dunia.

E. Langkah-langkah Menyusun Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT)

Diberlakukannya KKNi pada Perguruan Tinggi, berimbas kepada perubahan paradigma kurikulum dan manajemen kurikulum, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Perubahan kurikulum pendidikan tinggi dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ke Kurikulum mengacu KKNi atau disebut sebagai Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang merupakan pengembangan KBK berbasis KKNi menuntut adanya reformulasi kurikulum pendidikan tinggi.

Adapun langkah-langkah penyusunan kurikulum pendidikan tinggi berbasis KKNi yaitu *Pertama*, melakukan analisa SWOT lembaga pendidikan tinggi dalam rangka menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, *Kedua*, melakukan analisis kebutuhan akan tenaga kerja dan pasarnya. *Ketiga*, melakukan penetapan profil lulusan yang mengacu pada jenjang kualifikasi KKNi. *Keempat*, merumuskan dan menetapkan kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran, *Kelima*, melakukan pemetaan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, dengan merujuk pada capaian pembelajaran. *Keenam*, pemenuhan standar isi disesuaikan dengan kualifikasi KKNi, *Ketujuh*, penentuan mata kuliah dan besarnya SKS,

dan *Kedelapan*, melakukan penyusunan struktur kurikulum atau mata kuliah dalam setiap semester.⁸⁴

1. Analisis SWOT Lembaga⁸⁵

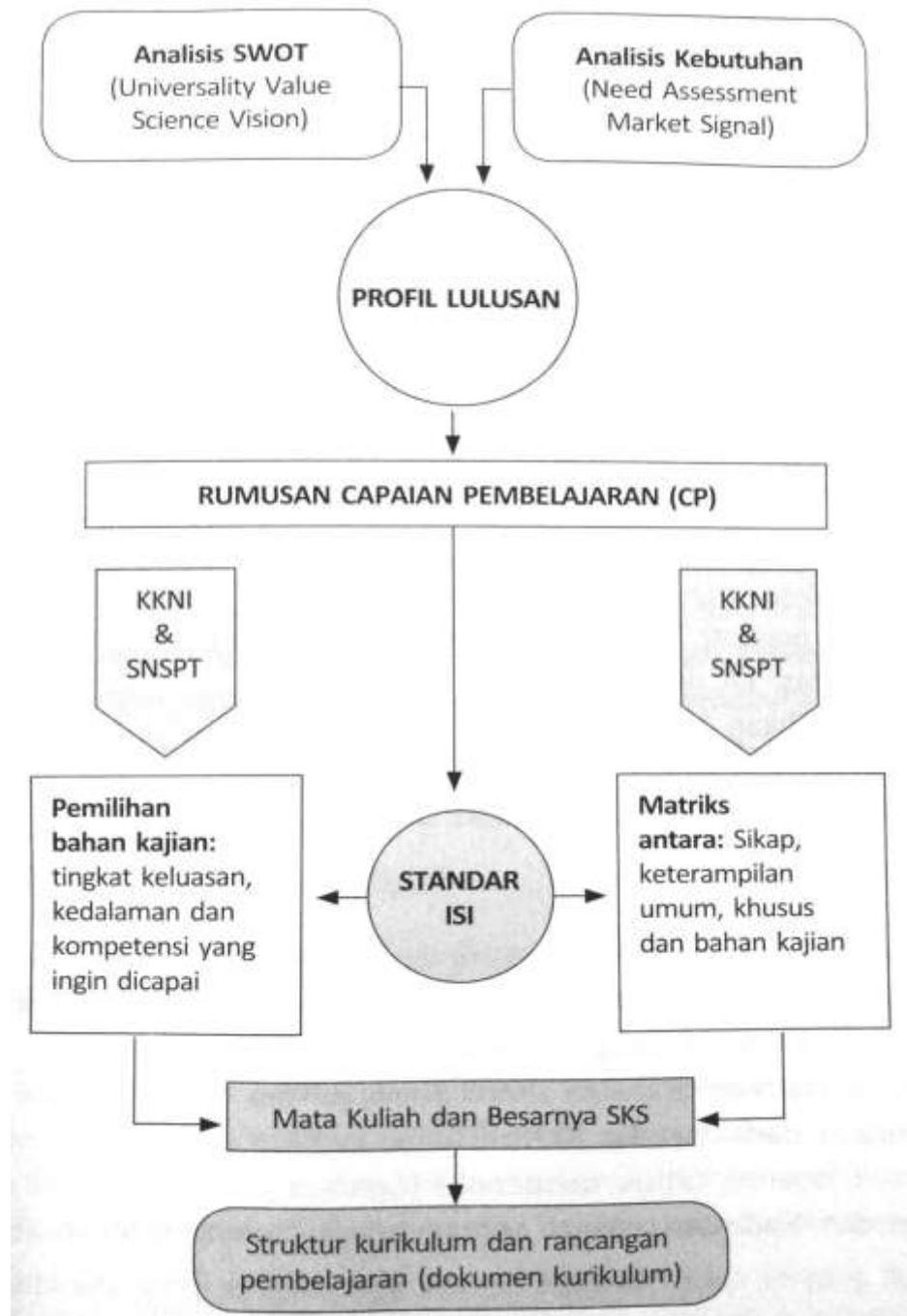
Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan tantangan yang dihadapi lembaga penyelenggara pendidikan tinggi (program studi, jurusan, fakultas, sekolah tinggi/institut/universitas) dalam rangka menghasilkan profil lulusan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berubah secara dinamis dan cepat dengan bekal kompetensi yang diperoleh selama proses pendidikan yang diikuti pada lembaga tersebut. Selain itu, langkah kegiatan yang dilakukan dalam analisis SWOT lembaga adalah mengkaji sejumlah dokumen yang relevan berkaitan dengan landasan filosofis, sosiologis, historis, yuridis, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta perkembangan ekonomi dan dunia industri, termasuk dokumen kurikulum yang sejenis baik dari perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri.

Hasil analisis SWOT lembaga dirumuskan secara operasional dalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, pencapaian serta program lembaga yang terangkum dalam dokumen rencana induk pengembangan (RIP) dan perencanaan strategis serta perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan tersebut menjadi blue print dan acuan

⁸⁴ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*h.74

⁸⁵ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*h.74

dalam pengembangan kelembagaan, akademik dan kemahasiswaan termasuk lulusan.



Gambar 2.2 Langkah-langkah penyusunan kurikulum⁸⁶

⁸⁶ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*.h.75

Scientific vision adalah cara pandang jauh ke depan atau gambaran yang menantang (ideal) tentang keadaan masa depan ke mana dan bagaimana lembaga pendidikan tinggi harus dibawa dan diarahkan agar dapat secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.⁸⁷

Dengan demikian, melalui analisis SWOT akan diketahui posisi kelembagaan pendidikan tinggi dalam konstelasi sistem pendidikan tinggi dalam skala nasional, regional, dan global. Adapun visi harus mengacu pada KKNi di samping itu juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:⁸⁸

- a. singkat, padat, dan mudah diingat;
- b. bersifat inspiratif dan menantang;
- c. sesuatu ideal yang ingin dicapai;
- d. menarik semua yang terkait;
- e. memberikan arah dan fokus yang jelas;
- f. menjadi perekat dan penyatu berbagai gagasan;
- g. berorientasi ke depan;
- h. menumbuhkan komitmen;
- i. menjamin kesinambungan;
- j. memungkinkan perubahan tugas dan fungsi.

⁸⁷ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*h.76

⁸⁸ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*h.76

Misi⁸⁹

- a. Misi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Prodi untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan.
- b. Misi merupakan tindakan untuk mewujudkan visi Prodi itu.
- c. Mengacu pada standar KKNL.
- d. Bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan visi.
- e. Rumusan tindakan sebagai arahan untuk mewujudkan visi.

Tujuan⁹⁰

Tujuan adalah suatu maksud yang akan dicapai atau arah yang akan dituju, yang merupakan *breakdown* dari visi dan misi. Tujuan Prodi merupakan tahapan atau langkah untuk mewujudkan visi-misi dalam jangka waktu tertentu.

2. Analisis Kebutuhan (*Tracer Study*)⁹¹

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah melakukan kajian terhadap tuntutan pasar kerja dan kebutuhan mahasiswa ketika mereka akan memasuki dunia kerja dan mengembangkan pekerjaannya (*market signal*) yang terkait dengan kemampuan kerja (aspek pengetahuan dan keterampilan), sikap dan kepribadian para lulusan. Oleh karena itu, diperlukan informasi yang relevan terkait dengan kebutuhan pengguna lulusan dan tuntutan pasar kerja terkait dengan berbagai kriteria dan persyaratan kerja yang diperlukan.

⁸⁹ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*h.76

⁹⁰ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*h.76

⁹¹ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*h.77

Dengan demikian, melalui analisis kebutuhan (*tracer study*) hasilnya dapat digunakan dalam pengembangan soft skills dan hard skills melalui kurikulum yang didesain, dikembangkan, disusun dan diimplementasikan dalam proses perkuliahan sehingga para lulusan dapat beradaptasi dengan cepat, tepat dan mampu mengembangkan profesinya secara baik dan maksimal dalam dunia kerja yang dimasukinya.

Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan untuk dilakukan analisis kebutuhan (*tracer study*) dalam rangka pengembangan kurikulum baru pada pendidikan tinggi. Dalam praktiknya analisis kebutuhan dapat dilakukan melalui survei alumni dan kebutuhan pengguna, pertemuan dengan pemangku kepentingan dan forum *focus group discussion* (FGD).

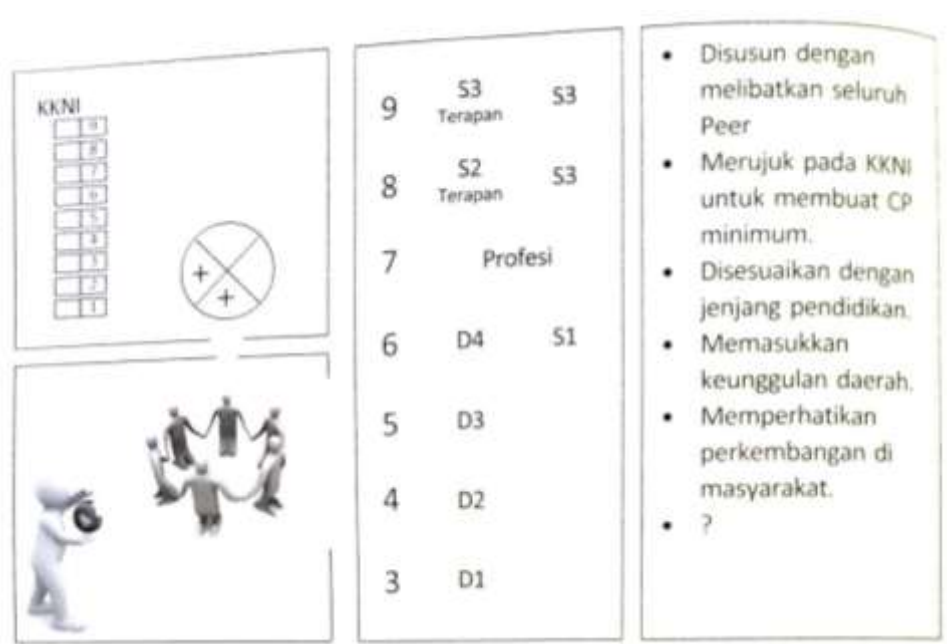
3. Penetapan Profil Lulusan⁹²

Seyogianya profil program studi disusun oleh kelompok program studi sejenis sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Dalam penyusunan profil keterlibatan dari stake holders juga akan memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang nantinya akan menggunakan hasil didiknya. Hal ini menjamin mutu dari profil lulusan.

Penetapan profil lulusan juga harus merujuk setiap jenjang kualifikasi lulusan dalam KKNI. Aspek-aspek yang harus menjadi pertimbangan di antaranya adalah: sikap dan tata nilai, kemampuan,

⁹² Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*.h.77

pengetahuan, tanggung jawab dan hak yang akan menjadi tanggung jawab oleh seorang lulusan. Kesesuaian tersebut dilakukan dengan cara membandingkannya dengan deskriptor generik KKNi. Untuk membangun kekhasan (menonjolkan ciri khas) program studi, dianjurkan agar mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal/daerah.



Gambar 2.3 Alur Penyusunan Profil⁹³

Dengan demikian, rumusan profil akan memuat informasi mengenai kemampuan menjawab persoalan yang muncul di daerah masing-masing, bahkan jika perlu menjadi nilai unggul dari program studi bersangkutan. Demikian halnya dengan perkembangan berbagai sektor yang muncul di masyarakat harus dapat diakomodasikan sehingga turut mewarnai dan memperkaya mewarnai profil lulusan.

⁹³ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*h.78

Profil lulusan yang telah terdefinisi dengan jelas akan menjadi modal utama dalam mengembangkan pernyataan capaian pembelajaran (CP) program studi. Satu program studi setidaknya memiliki satu profil, tetapi jika memuat lebih dari satu akan semakin baik. Berapa jumlah profil maksimum dapat diketahui dengan merujuk pada jenjang pendidikan diperbandingkan dengan deskripsi KKNI. Secara umum, semakin tinggi jenjangnya, berpeluang untuk memiliki jumlah profil lebih banyak.⁹⁴

Profil lulusan adalah deskripsi yang terkait dengan kompetensi (sikap/pengetahuan dan keterampilan) yang dimanifestasikan dalam peran dan fungsi yang dapat dijalankan oleh lulusan perguruan tinggi setelah memasuki kehidupan sosial kemasyarakatan dan dunia kerja. Analisis profil lulusan diperoleh dari hasil tracer study terhadap alumni, analisis need assessment dari stakeholders dan pemakai serta analisis SWOT lembaga sebagai *scientific vision*.⁹⁵

Profil lulusan merupakan *outcome* pendidikan yang dituju. Dengan menetapkan profil lulusan perguruan tinggi dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang dapat diperankan oleh mahasiswa setelah mereka menyelesaikan seluruh program perkuliahan dan kegiatan praktikum di perguruan tinggi/ program studi. Dengan demikian, keberadaan profil lulusan di masyarakat dan dunia kerja dapat dijadikan

⁹⁴ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*h.78

⁹⁵ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*h.79

sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan proses pendidikan yang dijalankan dan akuntabilitas oleh perguruan tinggi.

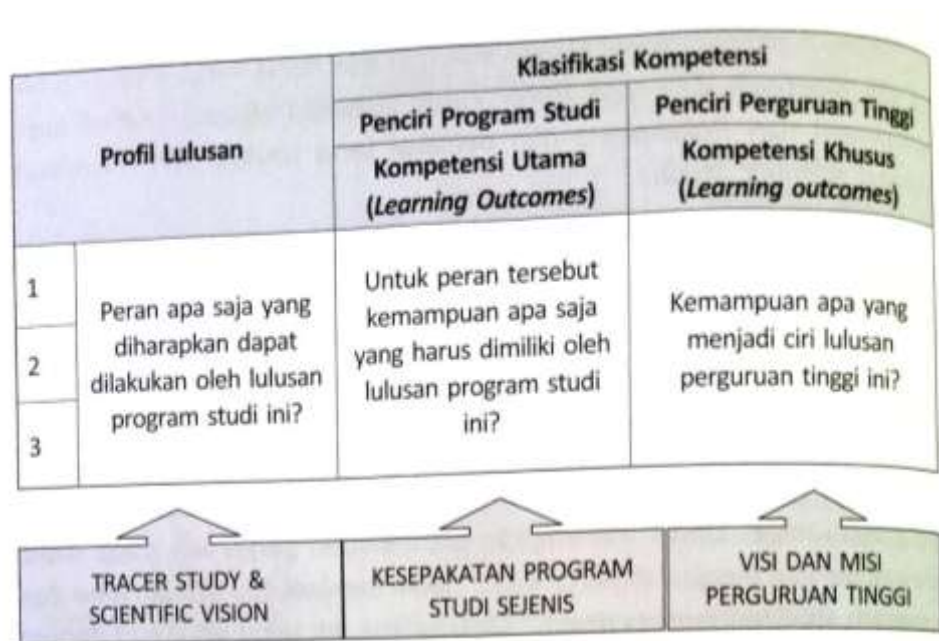
Untuk menetapkan profil lulusan perguruan tinggi dapat diawali dengan menjawab pertanyaan: “akan menjadi apa setelah lulus dari program studi/ perguruan tinggi?” Oleh karena itu, perlu dilakukan dengan kajian akademis tentang orientasi output prodi dengan mengumpulkan data dan informasi tentang berbagai profesi yang diampu oleh para alumni prodi tersebut. Berbagai profesi tersebut kemudian dijabarkan menjadi profesi inti yang seharusnya bagi lulusan suatu program studi dengan disesuaikan pada tuntutan dalam KKNI.⁹⁶

Analisis profil ini didasarkan pada kebijakan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi (Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi, Fakultas dan Jurusan/Program Studi), masukan dari asosiasi profesi terkait dan *stakeholders*. Dalam melakukan analisis profil lulusan seharusnya digunakan analisis terhadap nilai keuniversitasan (*university values*) dan visi keilmuan (*scientific vision*) serta hasil *tracer study* tentang *need assessment* dan *market signal*.

Rumusan profil disarankan menuliskan peran professional dan serangkaian kompetensi (*learning outcomes*) yang harus dimiliki lulusan untuk menjalankan peran tersebut secara profesional, akuntabel, dan berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan

⁹⁶ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*h.79

sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.⁹⁷



Gambar 2.4 Profil Lulusan⁹⁸

Profil lulusan mengacu pada capaian pembelajaran universitas, agar terbentuk kesinambungan proses untuk mencapai visi dan misi universitas. Namun kekhasan lulusan program studi menjadi bagian penting untuk menunjukkan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dari setiap program studi.

4. Rumusan Capaian Pembelajaran⁹⁹

Langkah selanjutnya untuk menyusun kurikulum adalah merumuskan dan menetapkan kompetensi lulusan atau yang dalam KKNI dikenal dengan istilah "Capaian Pembelajaran" (CP) atau *Learning Outcomes* (LO). Deskripsi capaian pembelajaran (CP) menjadi

⁹⁷ PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 26 ayat 4

⁹⁸ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*h.80

⁹⁹ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*h.81

komponen penting dalam rangkaian penyusunan kurikulum pendidikan tinggi (KPT). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa CP/LO merupakan akumulasi atau resultan dari keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studi pada satu program studi tertentu.

Capaian pembelajaran itu sendiri terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu: sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak. Keempat unsur tersebut menjadi kesatuan yang saling terkait satu sama lain dan membentuk sebuah korelasi sebab akibat. Secara umum fungsi CP adalah sebagai berikut :¹⁰⁰

- (a) Sebagai Penciri, Deskripsi, atau Spesifikasi dari Program Studi.
- (b) Sebagai ukuran, rujukan, pembanding pencapaian jenjang pembelajaran dan pendidikan.
- (c) Sebagai pelengkap deskripsi dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).
- (d) Sebagai komponen penyusun kurikulum dan pembelajaran.

Mengingat sifatnya yang dapat berfungsi secara multifungsi tersebut, maka sangat mungkin format deskripsi CP akan sangat beragam sesuai dengan kebutuhan masing-masing prodi. Pada fungsi tertentu CP dapat dideskripsikan secara ringkas, tetapi pada fungsi yang lain CP harus dideskripsikan secara detail. Meskipun demikian, keberagaman format CP sesuai dengan kebutuhan dan fungsi masing-masing tidak

¹⁰⁰ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*h.81

boleh menghilangkan unsur-unsur inti dalam CP itu sendiri, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan demikian, meskipun CP pada program studi tertentu formatnya berbeda, tetap memberikan pengertian dan makna yang sama. Berikut ini dikemukakan unsur-unsur CP yang harus ada.

Pertama, sikap yang diartikan sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat. Kedua, pengetahuan yang dipahami sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat. Ketiga, keterampilan, yang dipahami sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Dalam SN Dikti, unsur keterampilan dibagi menjadi dua, yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, sedangkan keterampilan

husus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.



Gambar 2.5 Penetapan Capaian Pembelajaran¹⁰¹

Dalam KKNi, CP merupakan alat ukur kompetensi yang diperoleh seseorang selama menyelesaikan studi atau proses pembelajaran, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Dengan demikian, CP akan mengidentifikasi unsur-unsur pencapaian belajar tersebut sehingga dapat diidentifikasi jenjang atau derajatnya.

a. Tahap-Tahap Penyusunan Capaian Pembelajaran¹⁰²

Menurut SN-DIKTI atau SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan sikap dan keterampilan umum tersebut telah dirumuskan dalam SN-DIKTI sebagai standar minimal yang harus dimiliki oleh setiap Lulusan sesuai jenis dan jenjang program pendidikannya, sedangkan keterampilan khusus telah disusun oleh forum program

¹⁰¹ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...* h.82

¹⁰² Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum....* h. 83

studi yang sejenis atau diinisiasi dan diusulkan oleh suatu program studi. Hasil rumusan CP dari forum atau program studi dikirim ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI.

Kemudian DIKTI akan melakukan verifikasi melalui tim pakar yang ditunjuk. Hasil akhir rumusan CP oleh DIKTI bersama rumusan CP oleh program studi yang lain akan dimuat dalam laman DIKTI untuk masa sanggah dalam waktu tertentu sebelum ditetapkan sebagai standar kompetensi lulusan (SKL). Adapun ketentuan penyusunan capaian pembelajaran (CP), secara substansi dapat dilakukan melalui tahapan berikut ini.¹⁰³

- (1) Bagi program studi yang belum memiliki rumusan capaian pembelajaran (CP) dapat mencari referensi rumusan capaian pembelajaran ululusan dari program studi sejenis yang memiliki reputasi baik, dan dari sumber lain yang pernah ditulis, misalnya dari: asosiasi profesi, kolegium keilmuan, konsorsium keilmuan, jurnal pendidikan, atau standar akreditasi dari negara lain.
- (2) Bagi program studi yang telah memiliki rumusan capaian pembelajaran (CP) dapat mengkaji, membedakan, membandingkan, dan menyandingkan rumusan capaian pembelajaran yang dimilikinya dengan rumusan capaian

¹⁰³ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*h.83

pembelajaran pada KKNI untuk melihat kelengkapan unsur deskripsi dan kesetaraan jenjang kualifikasinya.

- (3) Menyesuaikan hasil rumusan capaian pembelajaran yang dimiliki masing-masing prodi dengan rumusan sikap dan keterampilan umum yang telah ditetapkan dalam SN-DIKTI.
- (4) Cara penulisan unsur keterampilan umum dan khusus dalam capaian pembelajaran dapat dilakukan dengan panduan.

CARA PENULISAN DESKRIPSI KETERAMPILAN KHUSUS PENGETAHUAN	
1	Mampu melakukan
	Dengan cara (metode)
	Dan dapat menunjukkan hasil
	Dalam (kondisi)
2	Menguasai (tingkat penguasaan, keluasan dan kedalaman) (bidang keilmuan).

Tabel 2.1 Contoh cara penulisan unsur keterampilan umum dalam capaian pembelajaran¹⁰⁴

Unsur-Unsur Deskripsi	Contoh Penyusunan Keterampilan Khusus (CP)			
	Deskripsi Generik Level 6	Unsur deskripsi Prodi Arsitektur (S1)	Deskripsi Keterampilan Khusus Lulusan	
a	Mampu melakukan dengan metode menunjukkan hasil dalam kondisi	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi	Merancang arsitektur proses desain tertentu, dengan CAD, objek arsitektur fiktif kreatif Lingkup lingkungan	Merancang arsitektur dengan memanfaatkan program CAD melalui proses desain berbasis riset hingga menghasilkan karya yang kreatif, sebagai sebuah solusi dan adaptasi terhadap masalah lingkungan yang dihadapi.

Tabel 2.2 Contoh cara penulisan unsur keterampilan khusus dalam Rumusan Capaian Pembelajaran¹⁰⁵

¹⁰⁴ Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum...* h. 84

¹⁰⁵ Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum...* h. 84

b. Rumusan Formulasi Capaian Pembelajaran¹⁰⁶

Ketika formulasi rumusan capaian pembelajaran akan dipergunakan sebagai penciri atau pembeda program studi yang nantinya akan dituliskan pada SKPI, pernyataan CP cenderung ringkas, tetapi mencakup semua informasi penting yang dibutuhkan. Namun, ketika formulasi rumusan capaian pembelajaran dipergunakan untuk mengembangkan kurikulum pada program studi, pernyataan CP justru harus terperinci sehingga dapat menggambarkan kemampuan pada setiap profil yang dituju.

Formulasi rumusan capaian pembelajaran sebagai penciri program studi sering kali dituntut untuk dideskripsikan ringkas mungkin sehingga dapat saja dinyatakan dalam satu paragraf yang mencakup seluruh unturnya. Sejah pengalaman tim KKNi dalam menyusun CP, membuat pernyataan CP ringkas merupakan pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang relatif lebih tinggi dan membutuhkan konsentrasi lebih intens.

Di sisi lain, formulasi rumusan capaian pembelajaran sebagai pengembangan kurikulum sering kali dituntut untuk dideskripsikan secara detail, mulai dari penelusuran profil yang dituju hingga mengantisipasi bahan kajian yang akan disusun. Formulasi rumusan CP pada pengembangan kurikulum jauh lebih mudah daripada CP sebagai penciri program studi di atas.

¹⁰⁶ Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum....* h. 84

Meskipun demikian, formulasi CP sebagai penciri prodi yang sulit dilakukan dan CP sebagai pengembang kurikulum yang mudah dilakukan dapat dikombinasikan sehingga saling mempermudah satu sama lain. Artinya, hasil formulasi rumusan CP untuk mengembangkan kurikulum dapat dipergunakan sebagai perantara dalam menyusun CP sebagai penciri program studi. Caranya adalah merekonstruksi deskripsi terperinci pada CP kurikulum dengan melakukan filterisasi untuk mendapatkan substansi dari setiap pernyataan, sehingga diperoleh kalimat atau paragraf yang konvergen.

c. Alur Menyusun Pernyataan dalam Capaian Pembelajaran¹⁰⁷

Untuk menetapkan capaian pembelajaran dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan "untuk menjadi profil lulusan harus mampu melakukan apa saja?" Pertanyaan tersebut diulang untuk setiap perincian dari rumusan profil lulusan program studi sehingga diperoleh rumusan kompetensi yang lengkap. Capaian Pembelajaran (CP) harus mengandung 4 unsur utama dalam deskripsi KKNI, yakni: (a) deskripsi umum, sebagai ciri lulusan pendidikan tinggi Indonesia, (b) rumusan kemampuan di bidang kerja, (c) rumusan lingkup keilmuan yang harus dikuasai; (d), rumusan hak dan kewajiban manajerial.

¹⁰⁷ Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum...* h. 86

Selanjutnya, capaian pembelajaran dirumuskan dalam tiga tingkatan yaitu: Pertama, capaian pembelajaran pada tingkat universitas atau perguruan tinggi (*university learning outcome*) yang disingkat ULO. Kedua, capaian pembelajaran pada tingkat program studi (*program study learning outcome*) yang disingkat PLO. Ketiga, capaian pembelajaran pada tingkat perkuliahan atau mata kuliah (*course learning outcome*) yang disingkat CLO.

ULO	CAPAIAN PEMBELAJARAN TINGKAT PERGURUAN TINGGI
PLO	CAPAIAN PEMBELAJARAN TINGKAT PROGRAM STUDI
CLO	CAPAIAN PEMBELAJARAN TINGKAT PERKULIAHAN

Tabel 2.3 Tingkatan Capaian Pembelajaran¹⁰⁸

1) *University Learning Outcomes* (ULO)

University Learning Outcomes (ULO) diturunkan dari visi dan misi universitas yang mengandung profil umum lulusan sebagai *competitive* dan *comparative advantage* dari universitas tersebut. Artinya, capaian pembelajaran pada tingkat universitas lebih menampilkan *soft skill* dibandingkan *hard skill* yang harus dimiliki lulusan universitas tersebut.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*h.86

¹⁰⁹ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*h.87



Gambar 2.6 Rumusan Capaian Pembelajaran Universitas¹¹⁰

Di samping itu, setiap Perguruan tinggi dapat menambahkan kemampuan lain pada lulusannya, yang dalam format sebagaimana dalam kurikulum berbasis kompetensi dimasukkan ke dalam klasifikasi “kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya”, atau ke dalam “kompetensi khusus” menurut klasifikasi Standar isi BSNP.

2) Program *Study Learning Outcome* (PLO)¹¹¹

Program *Study Learning Outcome* (PLO) atau capaian pembelajaran pada tingkat program studi merupakan jabaran lengkap profil lulusan yang berkenaan dengan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa; setelah lulus dari program studi tersebut. Capaian pembelajaran pada tingkat ini sedikitnya terdiri dari dua jenis

¹¹⁰ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*.h.87

¹¹¹ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*.h.87

kalimat yang menyatu, yaitu kata kerja (*verb*) dan kata benda (*noun*). Kata kerja (*verb*) pada capaian pembelajaran menunjukkan tingkat pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotorik), sedangkan kata benda (*noun*) pada capaian pembelajaran menunjukkan tingkatan pengetahuan, yakni fakta, konsep, prosedural, dan metakognitif yang dilandasi oleh sikap (afektif) yang tepat dalam melakukan pekerjaan.

Pada intinya, Program *Learning Outcomes* (PLO) adalah sebuah pernyataan yang mengandung spesifikasi program yang memiliki kekhasan berkenaan dengan apa yang harus dicapai oleh mahasiswa pada akhir program. Capaian pembelajaran program studi terhubung dengan jenjang kualifikasi dan sejumlah pengalaman mahasiswa-untuk pencapaian kompetensi pada program tertentu.

Capaian pembelajaran program studi dirumuskan berdasarkan hasil *tracer study* (studi pelacakan) dan analisis kebutuhan dunia kerja yang terkait dengan kompetensi yang dibangun, serta jenjang kualifikasi yang diacu dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Capaian pembelajaran program studi atau dapat disebut pula sebagai kompetensi khusus, mengandung kompetensi yang mendukung dan mengacu pada kompetensi utama, dan menggambarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki untuk dapat dikatakan seorang lulusan memiliki profil lulusan tertentu. Capaian pembelajaran perkuliahan juga merupakan kompetensi turunan dari capaian pembelajaran program studi atau

kompetensi utama yang menjadi penciri keutuhan pencapaian capaian pembelajaran program studi.



Gambar 2.7 Rumusan Capaian Pembelajaran Tingkat Program Studi¹¹²

Rumusan deskripsi generik KKKNI pada tingkat program studi terdiri dari parameter-parameter yang dapat dipilah ke dalam tiga bagian, yaitu: (1) bagian pertama merupakan pernyataan kemampuan di bidang kerja, (2) bagian kedua adalah pernyataan tentang pengetahuan yang wajib dimiliki dan lingkup masalah yang bisa ditanganinya, dan (3) bagian ketiga adalah pernyataan kemampuan manajerial, lingkup tanggung jawab, dan standar sikap yang diperlukan.¹¹³

¹¹² Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*.h.88

¹¹³ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*.h.89



Gambar 2.8 Rumusan Deskripsi KKNi pada Tingkat Program Studi¹¹⁴

Setiap bagian parameter dapat ditandai lewat unsur-unsur deskripsi sehingga unsur-unsur deskripsi inilah yang seharusnya tercakup dalam rumusan *learning outcome* (LO) dari setiap program studi. Rumusan kompetensi lulusan program studi ini, sebagaimana dalam rumusan kurikulum berbasis kompetensi dimaknai sama dengan istilah “kompetensi utama” suatu program studi, yaitu rumusan kompetensi yang merupakan ciri dari lulusan sebuah program studi, sedangkan capaian pembelajaran pada tingkat universitas dimaknai sebagai kompetensi khusus. Jadi, dalam setiap program studi walaupun dalam satu universitas maka, harus memiliki kompetensi utama yang berbeda-beda yang di sesuaikan dengan program studi dan selaras dengan kompetensi universitas.

¹¹⁴ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*.h.89

Dibawah ini tabel parameter dan unsur deskripsi KKNi menurut Sutrisno dan Suyadi:

PARAMETER DAN UNSUR KKNi		
Parameter Deskripsi		Unsur-unsur Deskripsi
Kemampuan di bidang kerja	Mampu melakukan....	Kemampuan di bidang kerja terkait
	Dengan metode....	Interaksi proses, alat dan bahan
	Menunjukkan hasil....	Deskripsi kualitas hasil
	Dalam kondisi....	Standar proses dan hasil kerja
Lingkup Kerja Berdasarkan Pengetahuan yang dikuasai	Menguasai pengetahuan	Lingkup kajian dan cabang ilmu
	Untuk dapat melakukan...	Lingkup kerja
Kemampuan manajerial	Mampu mengelola...	Tingkat manajerial
	Dan memiliki sikap...	Sikap khusus yang dipersyaratkan

Unsur-unsur Deskripsi		Keterangan
1	a. Mampu melakukan	Apa saja yang bisa dikerjakan saat ia lulus prodi ini (diturunkan dari 2b)
	b. Metode/ cara	Diisi metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan di baris 1 a.
	c. Kualitas hasil	Sampai taraf apa hasil yang harus dikerjakan/ dihasilkan.
	d. Kondisi	Dalam kondisi apa kemampuan (a) dilakukan, batas-batasnya.
2	a. Menguasai pengetahuan	Diisi dengan cabang ilmu, atau IPTEKS yang harus dikuasai, untuk menunjang kemampuan pada (1a dan 2b)
	b. Untuk dapat melakukan	a. Tetapkan peran yang diharapkan bisa dilakukan oleh lulusan yang baru lulus b. Dengan peran tersebut kemampuan apa yang harus dimiliki, rumusan kemampuan inilah yang harus dituliskan pada baris (1)
3	a. Mampu mengelola	Kemampuan manajerial dan tingkat tanggung jawab sesuai tingkat yang ada dalam rumusan generik KKNi (sesuai levelnya)
	b. Memiliki sikap	Diisi jika ada syarat sikap (<i>soft skill</i>) khusus untuk melakukan peran yang ditulis (2b) atau sikap yang harus dimiliki untuk bisa menjalankan tugas (1a) dengan baik.

Tabel 2.4 Parameter dan unsur deskripsi KKNi¹¹⁵

¹¹⁵ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...h.90*

3) *Course Learning Outcomes (CLO)*¹¹⁶

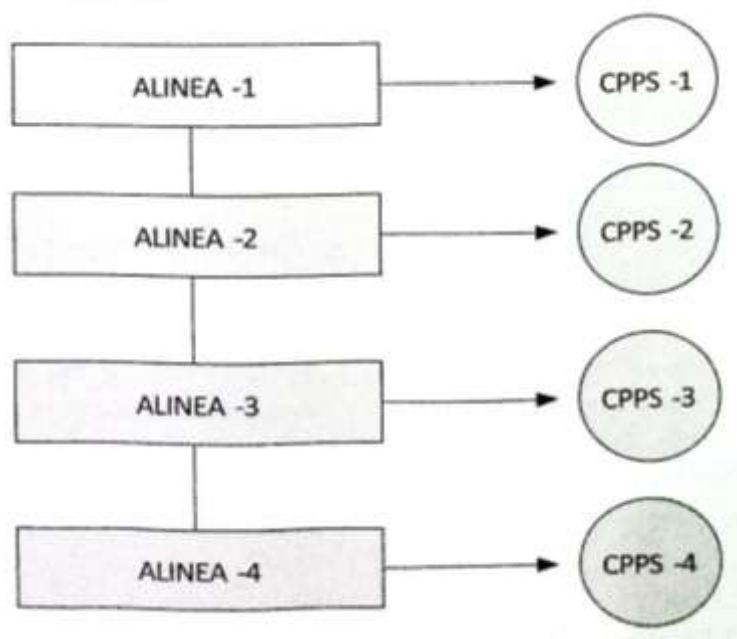
Course Learning Outcomes (CLO) merupakan gambaran umum mengenai apa yang akan mahasiswa ketahui dan apa yang dapat dilakukan mahasiswa di akhir perkuliahan. Capaian pembelajaran perkuliahan ini berbasis kinerja (*performance*) dan berorientasi pada hasil. CLO merupakan gambaran yang bermakna (*significant*) dan terkait dengan apa yang diharapkan dapat dilakukan mahasiswa di dunia nyata, pembelajaran yang benar-benar penting dalam jangka panjang.

CLO menggambarkan apa yang dapat dilakukan mahasiswa di akhir perkuliahan manakala mereka mengintegrasikan pembelajaran dari seluruh perkuliahan yang diperolehnya. Setiap CLO harus sejalan dengan satu atau lebih capaian pembelajaran program studi (PLO) sebagaimana disebutkan di atas. Struktur kalimat dalam perumusan capaian pembelajaran perkuliahan mirip dengan capaian pembelajaran program studi. Namun, alangkah lebih baik jika ditambahkan dengan *audiens* (A) mana yang dituju, perilaku (*behavior* = B) apa yang dapat ditunjukkan oleh mahasiswa (psikomotorik), kondisi (*condition* = C) apa yang harus diciptakan agar pengetahuan (*content knowledge*) dan perilaku yang diharapkan (*intended*) dapat dicapai, dan tingkatan (*degree* = D) apa yang harus dicapai. Tingkatan ini untuk menandai

¹¹⁶ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*.h.91

jenjang (level) kompetensi dan dapat juga menandai jenjang program (D3 hingga 53) di mana kompetensi tersebut di tempatkan.

Deskripsi KKNi level 6



Gambar 2.9 Deskriptor KKNi level 6¹¹⁷

Sebagai contoh dalam kaitan dengan KKNi ditegaskan bahwa lulusan S1 harus memiliki kualifikasi level 6; lulusan profesi harus memiliki kualifikasi level 7; lulusan S2 harus memiliki kualifikasi level 8; dan lulusan S3 harus memiliki kualifikasi level 9. Deskripsi kualifikasi pada setiap level dalam KKNi harus dijabarkan ke dalam rumusan capaian pembelajaran pada setiap program studi melalui forum asosiasi program studi sebagai rumusan kompetensi/capaian pembelajaran minimal yang selanjutnya dijabarkan lebih terperinci oleh program studi pada setiap perguruan tinggi.

¹¹⁷ Sutrisno, Suyadi, *Desain Kurikulum...*.h.91

5. Pemetaan Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran¹¹⁸

Di dalam menetapkan keluasan materi dan kedalaman kajian, yang harus dirujuk adalah capaian pembelajaran yang telah ditetapkan sebagaimana telah dikemukakan di atas. Secara praktis, pemetaan tingkat keluasan dan kedalaman materi dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan, "apa saja materi yang perlu dikaji untuk menguasai capaian pembelajaran tersebut?" Pemetaan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran juga bisa menggunakan pertanyaan lain, seperti: "Untuk mencapai capaian pembelajaran Ilmu apa saja yang diperlukan?" Jawaban dari pertanyaan itu akan menghasilkan informasi secara detail dan mendalam mengenai cakupan sebuah mata kuliah.

Kualifikasi	KKNI	Capaian Pembelajaran Kajian/ Ilmu/ Materi/ Pokok
S-1	Menguasai aplikasi software, teknologi pembelajaran, agar dapat berperan sebagai akademisi dan profesional dalam memecahkan masalah Pendidikan Kewarganegaraan	Konsep kurikulum, strategi pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, teori politik, konsep lembaga negara, prinsip hubungan interpersonal, hukum privat dan publik, konsep ekonomi, ilmu budaya.
D-3	Mampu mengidentifikasi, menggunakan dan memelihara alat uji dan diagnosis untuk melakukan pekerjaan sebagai mekanik ahli sepeda motor	Prinsip pengujian kerja mesin, konsep kerja mesin, prinsip pemindahan energi, sistem rem, sistem penerangan, sistem rangka dan suspensi.
D-4	Mampu melaksanakan kegiatan fungsi-fungsi bisnis sebagai realisasi gagasan bisnis yang memanfaatkan sumber daya bisnis secara efektif dan efisien	Ilmu administrasi, prinsip dan konsep bisnis, konsep manajemen sumber daya, prinsip kualitas dan kontrol, pengelolaan anggaran

Tabel 2.5 Contoh pemetaan materi pembelajaran¹¹⁹

¹¹⁸ Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum....* h. 92

¹¹⁹ Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum....* h. 95

Setelah mendapatkan berbagai kajian ilmu, program studi juga perlu untuk menentukan tingkat kedalaman dari bidang ilmu atau materi yang akan pelajari. Dalam proses menentukan tingkat kedalaman bidang ilmu tersebut harus mengacu pada SN-DIKTI, terutama Permendikbud No. 49 Tahun 2014 pasal 9 yang telah menetapkan kerangka tingkatannya yang harus diacu, yaitu:¹²⁰

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - b. Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - c. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - d. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan

¹²⁰ Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 9

- tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- e. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - f. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
 - g. Lulusan program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/ atau integratif.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Penetapan tingkat kedalaman dan keluasan bidang ilmu sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No. 49 tahun 2014 Pasal 9 di atas dianggap penting agar masing-masing jenjang pendidikan prodi tidak terlalu rendah mempelajari bidang ilmu tertentu, tetapi juga tidak melampaui kualifikasi jenjang di atasnya sehingga dapat distandarkan. Selama ini, masih banyak sebuah program studi menetapkan kedalaman materi di bawah kualifikasi yang seharusnya. Sekadar contoh, lulusan D IV (sarjana terapan), hanya dituntut untuk menguasai konsep umum dan sederhana dalam mempelajari bidang ilmu tertentu. Indikasinya

adalah, pada evaluasi atau uji kompetensi masih digunakan soal yang sifatnya hafalan dan pilihan ganda. Jika hal ini yang terjadi, maka dapat dipastikan bahwa hasil lulusannya akan berada di bawah kualifikasi yang distandarkan KKNI.

Di dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 3 disebutkan bahwa Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif. Dalam hal ini pada program studi yang memiliki jenjang pendidikan berkelanjutan, perlu untuk melakukan desain kurikulum secara berkesinambungan dan integratif dari jenjang ke jenjang. Sebagai contoh, program studi teknik elektro perguruan tinggi A menyelenggarakan dari strata S1, S2 dan S3, maka dalam menetapkan tingkat kedalamannya harus berkeanjutan dan integratif.

Dengan demikian, semakin tinggi jenjang pendidikan akan semakin spesialis, bukan generalis. Selama ini masih banyak perguruan tinggi yang memisahkan penyelenggaraan S1 dengan pascasarjana (S2 dan S3). Akibatnya, semakin tinggi jenjang pendidikan, bukannya semakin spesialis, tetapi malah semakin generalis. Bahkan, terdapat perguruan tinggi yang tingkat kedalaman dan keluasan ilmunya pada jenjang S2 justru tidak nyambung-bahkan cenderung lebih rendah daripada S1-nya.¹²¹

¹²¹ Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum....* h. 95

6. Pemenuhan Standar Isi¹²²

Pemenuhan standar isi yang dimaksudkan di sini adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Mengenai standar isi ini dapat dibaca selengkapnya dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014 pasal 8. Intinya adalah, standar isi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran merujuk pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Tingkat kedalaman merupakan standar pencapaian kemampuan lulusan yang dirancang untuk memenuhi kriteria minimal kompetensi Lulusannya. Adapun tingkat keluasan materi pembelajaran adalah kriteria minimal jumlah dan jenis kajian, atau ilmu maupun cabang ilmu, termasuk pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Selain tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, di dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Pasal 8 ayat (3) juga dijelaskan bahwa kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, Spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dikutipkan permendikbud tersebut. (1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. (2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

¹²² Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum....* h. 97

mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. (3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan Permendikbud no. 49 tahun 2014, khususnya Pasal 8 yang menekankan pada pemanfaatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mengindikasikan bahwa sebuah program studi harus mendesain dan melakukan perencanaan secara terintegrasi antara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan dengan kurikulum pembelajarannya. Pemetaan kajian dalam kurikulum yang dapat dikembangkan dan atau dikupas dalam sebuah penelitian, akan menjadi nilai plus bagi program studi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Adapun penjelasan mengenai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih detail akan dibahas pada bab tersendiri, agar tidak mengganggu mekanisme penyusunan kurikulum ini.

7. Penentuan Mata Kuliah dan Besarnya SKS¹²³

Sebagaimana disebutkan di depan, bahwa setiap kualifikasi dalam KKNi setidaknya memuat unsur keilmuan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Oleh karena itu, penetapan tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian juga harus mencakup unsur-unsur dalam kualifikasi KKNi tersebut. Bertumpu pada hasil analisis antara rumusan kompetensi lulusan serta bahan kajian tersebut, dapat dibentuk

¹²³ Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum....* h. 98

nama mata kuliah tertentu beserta besarnya beban atau alokasi waktu (sks). Selama ini, terdapat dua model mata kuliah, yakni mata kuliah gemuk dan mata kuliah kurus.

a) Mata Kuliah Kurus¹²⁴

Mata kuliah kurus adalah mata kuliah dengan bobot sks kecil, tetapi jumlahnya banyak. Misalnya, jenjang S1 yang terdiri dari 144 sks nama mata kuliahnya bisa mencapai 70 mata kuliah. Sekadar contoh, pada prodi ilmu pendidikan terdapat mata kuliah pengantar psikologi, psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, dan psikologi belajar. Besarnya masing-masing mata kuliah pada umumnya 2 sks. Kelebihan model pembentukan mata kuliah ini adalah mahasiswa banyak tahu berbagai macam bidang ilmu. Namun, kelemahannya adalah mahasiswa tidak pernah tuntas mempelajari bidang ilmu tertentu. Keterbatasan waktu dan jumlah tatap muka menjadikan pengetahuan mahasiswa hanya meluas, tetapi tidak mendalam.

b) Mata Kuliah Gemuk¹²⁵

Mata kuliah gemuk adalah mata kuliah yang memiliki bobot sks besar, sehingga jumlah nama mata kuliahnya menjadi sedikit. Misalnya, jenjang S1 yang terdiri dari 144 sks memungkinkan hanya terdiri dari 40-50 mata kuliah. Sekadar contoh, nama mata kuliah yang satu rumpun sebagaimana disebutkan di atas digabungkan menjadi satu, nama mata kuliah (psikologi pendidikan, misalnya), tetapi dengan

¹²⁴ Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum....* h. 100

¹²⁵ Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum....* h. 100

menambah bobot sks. Jika dicermati dalam SAP (Satuan Acara Perkuliahan) atau RPS (Rencana Perkuliahan Semester), pada pertemuan pertama dan kedua selalu sama, yakni kontrak belajar dan ruang lingkup pembelajaran. Oleh karena itu, jika berbagai mata kuliah yang serumpun digabung akan lebih efektif dan efisien. Sekadar contoh, mata kuliah pengantar psikologi, psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, dan psikologi belajar yang masing-masing 2 sks (jumlah total 8 sks) digabung menjadi satu dengan menambah bobot sks, menjadi 6 sks sekaligus. Dengan demikian dalam satu semester mahasiswa cukup mengambil 3-4 mata kuliah. Model pembentukan mata kuliah ini mempunyai keunggulan, yakni mahasiswa dapat mempelajari bidang ilmu tertentu secara mendalam dan tuntas.

Selanjutnya, perlu diketahui mengenai batas-batas jumlah sks dalam setiap jenjang pendidikan tinggi. Menurut Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Pasal 15 menyatakan bahwa untuk menetapkan besaran sks sebuah mata kuliah, terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti. Dasar pemikiran penetapan besarnya sks sebuah mata kuliah mengikuti *equal credit for equal work philosophy*.¹²⁶ Oleh karena itu, diperlukan perhitungan terhadap beban mata kuliah yang akan dipelajari. Artinya; setiap beban mata kuliah sangat ditentukan oleh keluasan, kedalaman,

¹²⁶ Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum....* h. 102

dan keterperincian bahan kajian yang diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi, serta tingkat penguasaan yang ditetapkan.

Setelah mendapatkan beban/ alokasi waktu untuk sebuah mata kuliah, maka dapat dihitung satuan kredit per semesternya. Caranya adalah dengan membandingkan secara proporsional beban mata kuliah terhadap beban total untuk mencapai sks total yang ditetapkan oleh pemerintah (misalnya untuk program SI dan D IV minimal beban sks sebesar 144 sks). Dalam konteks penentuan keselamatan kurikulum, besarnya sks sebuah mata kuliah atau suatu pengalaman belajar yang direncanakan, dilakukan dengan menganalisis secara simultan beberapa variabel, yaitu (a) tingkat kemampuan yang ingin dicapai; (b) tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari; (c) cara/ strategi pembelajaran yang akan diterapkan; (d) posisi/ letak semester suatu mata kuliah atau suatu kegiatan pembelajaran dilakukan; (e) perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester yang menunjukkan peran/ besarnya sumbangan suatu mata kuliah dalam mencapai kompetensi lulusan.¹²⁷

Secara umum, sks harus dipahami sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu melalui proses pembelajaran atau bahan kajian. Sementara itu, makna sks telah dirumuskan dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Pasal 16, yang menyebutkan bahwa 1 sks:

¹²⁷ Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum....* h. 103

- untuk perkuliahan, responsi dan tutorial di kelas bermakna 50 menit pembelajaran tatap muka di kelas, 50 menit tugas mandiri dan 1 jam tugas terstruktur setiap minggunya;
- untuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup bermakna 100 menit tugas di ruang tutorial atau praktik dan 1 jam tugas mandiri setiap minggunya;
- untuk bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/ atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.¹²⁸

Berdasarkan ketentuan sks di atas, maka bentuk pembelajaran yang akan dirancang harus memperhitungkan makna sks di setiap mata kuliah yang ada. Dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Pasal 15 ayat 3 juga ditekankan bahwa setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 sks. Di samping itu, pada ayat 4 disebutkan bahwa satu semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 minggu. Proses penetapan sks yang akan disajikan dalam struktur kurikulum perlu mempertimbangkan kekuatan lama belajar mahasiswa.

Permendikbud No. 49 Tahun 2014 pasal 17 ayat 1 menyatakan bahwa “Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54

¹²⁸ Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 16

(lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester”. Dengan demikian, struktur kurikulum program studi tidak diperkenankan untuk memberikan beban belajar melebihi 20 sks pada mahasiswa yang berkemampuan biasa.

Untuk menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan standar kualifikasi jenis dan jenjang pendidikan tertentu, pada Permendikbud No. 44 Tahun 2015 Pasal 17 ayat 2 dinyatakan bahwa: Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:

- (a) 36 sks untuk program diploma satu;
- (b) 72 sks untuk program diploma dua;
- (c) 108 sks untuk program diploma tiga;
- (d) 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana;
- (e) 36 sks untuk program profesi;
- (f) 36 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu;
- (g) 42 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua.¹²⁹

Sementara itu, dalam hal masa studi untuk dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu, termasuk memberikan penghargaan pada mahasiswa yang berprestasi, Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Pasal 17 ayat 3-5 mengatur sebagai berikut.

- 1) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

¹²⁹ Permendikbud No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 17 ayat 2

- (a) 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu;
 - (b) 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua;
 - (c) 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
 - (d) 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
 - (e) 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
 - (f) 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan (g) paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.
- 2) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 sks per semester.
- 3) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan Senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.

Semua peraturan di Permendikbud No. 49 Tahun 2014, khususnya Pasal 15-17 tersebut harus dirujuk dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum di program studi.

8. Penyusunan Struktur Kurikulum¹³⁰

Penyusunan struktur kurikulum adalah pengaturan mata kuliah dalam tahapan semester. Secara teoretis terdapat dua macam pendekatan struktur kurikulum, yaitu model serial dan model paralel. Struktur kurikulum serial adalah susunan mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya, mata kuliah disusun dari yang paling dasar (berdasarkan logika keilmuan masing-masing prodi) sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Setiap mata kuliah saling berhubungan satu sama lain sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat. Artinya, mata kuliah yang tersaji di semester awal akan menjadi syarat bagi mata kuliah di atasnya.

Permasalahan yang sering muncul dalam model kurikulum paralel ini adalah, siapa yang harus membuat hubungan antarmata kuliah dan antar semester tersebut? Mahasiswa atau dosen? Jika mahasiswa, mereka belum memiliki kompetensi untuk memahami keseluruhan kerangka keilmuan tersebut. Namun jika dosen, tidak ada yang menjamin terjadinya kaitan tersebut mengingat antara mata kuliah satu dengan yang lain diampu oleh dosen yang berbeda dan sulit dijamin adanya komunikasi yang baik antar dosen-dosen yang terlibat. Misalnya, mata kuliah filsafat umum di sampaikan oleh dosen A. Pada semester berikutnya, mata kuliah filsafat ilmu disampaikan oleh dosen B.

¹³⁰ Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum....* h. 105

Kelemahan inilah yang menyebabkan lulusan dengan model struktur kurikulum serial ini kurang memiliki kompetensi yang terintegrasi. Di samping itu, adanya mata kuliah prasyarat sering menjadi penyebab lambatnya kelulusan mahasiswa karena bila salah satu mata kuliah prasyarat tersebut gagal (tidak lulus), mahasiswa tersebut harus mengulang di tahun berikutnya.

Adapun model struktur kurikulum paralel adalah struktur kurikulum yang menyajikan mata kuliah pada setiap semester sesuai dengan tujuan kompetensinya. Struktur paralel ini secara ekstrem sering dijumpai dalam kedokteran. Model Blok adalah struktur kurikulum paralel yang tidak berdasarkan pembelajaran per semester, tetapi berdasarkan ketercapaian kompetensi di setiap blok. Dengan Semikian, struktur kurikulum paralel juga sering disebut sebagai mode unkuum modular. Disebut modular karena struktur kurikulum paralel tersebut terdiri dari beberapa modul/blok.¹³¹

Meskipun demikian, struktur kurikulum paralel tidak hanya dilaksanakan dengan model Blok semata, tetapi juga bisa dilaksanakan dalam bentuk semesteran, yaitu dengan mengelompokkan beberapa mata kuliah menurut kompetensi yang sejenis. Dengan demikian, setiap semester akan mengarah pada pencapaian kompetensi yang serupa dan tuntas pada semester tersebut, tanpa harus menjadi syarat bagi mata kuliah lain di tahun berikutnya.

¹³¹ Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum....* h. 105-106

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari sisi pengumpulan data jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan dari sisi analisis datanya penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹³²

Dengan kata lain menurut Muhajir,¹³³ penelitian kualitatif ini sebagai strategi dan teknik penelitian yang digunakan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta secara detail dan mendalam. Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada dan sedang berlangsung yang berkenaan dengan kesiapan STIT Kota Pagar Alam dalam Implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti, guna

¹³² Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, CV, 2014), h.6.

¹³³ Muhajir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Alfabeta.1996). h. 29.

memperoleh data yang akurat atau mendekati kebenaran. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di STIT Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan waktu dalam penelitian ini dijadwalkan sebagai berikut:

No	Tahapan	Bulan				
		Feb	Maret	April	Mei	Juni
1	Persiapan	X				
2	Pengumpulan Data		X	X		
3	Pengolahan Data			X	X	
4	Penyusunan Laporan				X	X

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

C. Sumber Data

Sumber data ditentukan berdasarkan kebutuhan dalam menunjang penelitian ini yang disesuaikan dengan pendekatan kualitatif, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data langsung.¹³⁴ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah 1). Ketua STIT, 2). Ketua Prodi PAI, 3). Dosen dan 4). Pegawai administrasi kampus STIT Kota Pagar Alam.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹³⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu dokumen-dokumen, buku-buku panduan kurikulum, RIP, Statuta, visi, misi dan tujuan program studi dan dokumen lain yang terkait dengan implementasi kurikulum.

¹³⁴Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV. Alfabeta.2008).h. 62

¹³⁵Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif ...*.h.62

D. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka sumber data utama dalam penelitian ini berupa tindakan dan kata-kata dari para pengurus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam termasuk dokumentasi lain dan sumber data yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bogdan dan Taylor, bahwa sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan metode dokumentasi.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap subjek penelitian, baik langsung maupun tidak langsung. Metode ini merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang peneliti saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa tersebut bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.¹³⁶ Marshal dalam Sugiyono menyatakan bahwa : *through observation, the researcher learn about behavior and meaning attached to those behavior* (Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut).¹³⁷

¹³⁶ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 116

¹³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.310

Menurut S. Margono dalam Nurul Zuriyah bahwa pengumpulan data dengan observasi pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Metode observasi ini sebagai pengumpul data, dapat dikatakan berfungsi ganda, sederhana, dan dapat dilakukan tanpa menghabiskan banyak biaya.¹³⁸

Pengamatan atau observasi merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teknik ini, memungkinkan bagi peneliti mengenal baik dunia sosial atau objek sosial dan perilaku non verbal yang menjadi fokus penelitian ini. Peneliti dalam waktu tertentu berbaur dengan mahasiswa, pengurus, para dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam yang nantinya menjadi informan. Sedangkan data yang akan penulis ambil antara lain; sarana prasarana, keadaan kantor, mahasiswa ketika sedang kuliah, dosen ketika sedang mengajar, respon mahasiswa ketika dosen sedang mengajar, media yang digunakan dosen ketika sedang mengajar dan kebijakan-kebijakan dari ketua STIT serta kebijakan dari Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam.

Penelitian ini menggunakan dua teknik observasi, yaitu: (1) partisipan penuh dengan menyamakan diri dengan orang yang diteliti, dan (2) partisipan sebagai pengamat. Dua teknik pengumpulan data

¹³⁸ Nurul Zuriyah. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan...*, h. 179

dalam observasi sebagaimana yang penulis paparkan di atas adalah sebagai berikut:

a. Partisipan Penuh (*Participant Observation*)

Teknik pengamatan peran serta (partisipasi penuh). Adalah suatu proses pengamatan bagian dalam yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kegiatan orang-orang yang akan diobservasi. Observer berlaku sungguh-sungguh seperti anggota kelompok yang akan diobservasi.¹³⁹ Pengamatan peran serta merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk melihat dan memahami gejala-gejala yang ada, sesuai dengan makna yang diberikan atau di pahami oleh warga yang ditelitinya. Pada tahap ini peneliti akan mengamati dan sekaligus ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka kesiapan dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNi yang dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam, sehingga nantinya penulis akan dapat memperoleh data yang lebih lengkap, tajam dan sampai pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak ketika pelaksanaan kegiatan yang terdapat pada perguruan tinggi tersebut.

b. Partisipan Sebagai Pengamat (*Partisipan As Observer*)

Pada bagian ini peneliti sebagai pengamat membatasi diri dalam berpartisipasi sebagai pengamat, dan responden menyadari bahwa

¹³⁹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan...*, h. 175-176

dirinya adalah objek pengamatan.¹⁴⁰ Lebih jelas Lexy J. Moleong mengatakan bahwa peneliti hanya sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeranserta tetapi masih melakukan fungsi pengamatan.¹⁴¹

2. Wawancara (*Interviu*)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah informasi penting yang diinginkan oleh seorang peneliti. Wawancara juga merupakan pengumpul informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan untuk kemudian dijawab secara lisan pula. Baik langsung atau dengan menggunakan alat komunikasi. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*Interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).¹⁴²

Wawancara yang penulis lakukan adalah untuk menggali dan mendapatkan informasi lengkap tentang latar belakang pengembangan kurikulum berbasis KKNI, bagaimana hal tersebut diterapkan, bagaimana prestasi para mahasiswa, dan apa saja prestasi yang telah diperoleh oleh STIT Kota Pagar Alam dalam mengimplementasikan kurikulum yang mengacu pada KKNI. Maka dari itu, penulis menggunakan wawancara yang tidak terstruktur, yaitu pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besarnya saja. Pada penelitian ini juga, penulis akan

¹⁴⁰ W. Gulo, *Metode Penelitian...*, h. 116

¹⁴¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004). h 127

¹⁴² Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan...*, h.179

melakukan wawancara langsung dengan para pengelola/ pengurus STIT Kota Pagar Alam sebagaimana telah dijelaskan dalam subjek penelitian.

Dengan demikian, penulis nantinya berharap akan mendapatkan informasi-informasi yang akurat seputar apasaja yang sudah disiapkan oleh STIT Kota Pagar Alam dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNi di kampus ini. Untuk itu, wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam (*Indept Interviu*), yaitu : metode wawancara ini penulis lakukan dengan menggunakan pedoman wawancara agar lebih terarah dan tidak melebar. Wawancara secara mendalam ini dilakukan dengan pengurus STIT Kota Pagar Alam serta dengan beberapa dosen dan mahasiswa sebagai sumber data agar hasil penelitian nantinya benar-benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan benar-benar terjadi dan dilaksanakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah semua tulisan yang dikumpulkan dan disampaikan yang dapat digunakan bila diperlukan. termasuk dalam dokumentasi adalah gambar dan foto-foto. Alat-alat dokumenter diperlukan pada saat wawancara dengan pengelola, para dosen, dan mahasiswa STIT Kota Pagar Alam. Dokumentasi juga berkenaan dengan data mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian yang berupa catatan, transkrip. buku, surat kabar, majalah, prasasti. notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁴³ Sedangkan tujuan dari penggunaan metode

¹⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...*, h.231

dokumentasi ini adalah sebagai pendukung dan pelengkap dari hasil penelitian ini.

Dokumentasi ini dikumpulkan dalam rangka memperkuat data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya, yakni pengamatan terlibat, tidak terlibat dan wawancara. Ketiga metode pengumpulan data tersebut digunakan untuk saling melengkapi antara satu data dengan data yang lainnya dalam rangka mengetahui lebih mendalam tentang kesiapan STIT Kota Pagar Alam dalam Implementasi Kurikulum yang mengacu pada KKNI. Melalui metode ini peneliti akan mendapatkan data seperti: struktur organisasi, gambaran umum STIT Kota Pagar Alam, sejarah berdirinya STIT Kota Pagar Alam, tabel, grafik alumnus, statuta, RIP, visi, misi, kurikulum dan strategi pencapaian tujuan pengembangan kampus dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengolahan Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis terhadap transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.¹⁴⁴ Data yang telah diperoleh dengan cara pengamatan terlibat dan tidak, wawancara semi terstruktur dan dokumenter tersebut diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan, akan tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya dengan cara teks diperluas.

¹⁴⁴ Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan...*, h.217

Miles and Huberman dalam Sugiono mengatakan, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data. Yaitu *data reduction, data display dan conclusion drawing/ verification*.¹⁴⁵ Sedangkan menurut Muslimin dalam Nurul Zuriyah analisa data dilakukan melalui proses analisa domain, analisa taksonomi, analisa komponensial, analisa tema kultural.¹⁴⁶

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagomi, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data ala Moleong.¹⁴⁷

Adapun tahapan-tahapan analisis data dimulai dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai perangkuman, pemilihan hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema pokoknya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁴⁸ Dalam data inilah peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang

¹⁴⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 91

¹⁴⁶ Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*,...h. 217

¹⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,...h.103

¹⁴⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,...h. 93

sedemikian rupa sehingga nantinya kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Display data

Display data adalah penyajian data secara sistematis dengan memberikan kronologisnya dan ditonjolkan pokok-pokoknya sehingga dapat makna secara jelas. Milies and Huberman dalam Sugiono mengatakan: *"the most frequent form of display data for qualitaave research data in the past has been narrative text"* (Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹⁴⁹ Adapun bentuk-bentuk display ini bisa berupa grafik, matrik, network atau bentuk bentuk yang lain, Tujuan diperlukannya display data supaya peneliti dapat menguasai data secara cermat dan tidak tenggelam dengan tumpukan data.

3. Penarikan Kesimpulan dan Veriflkasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.¹⁵⁰

F. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang

¹⁴⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,...h. 95

¹⁵⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,...h. 99

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya.¹⁵¹ Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada di lapangan, baik berupa data-data tertulis seperti, buku, majalah, surat kabar, arsip, surat maupun foto. Sedangkan dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.¹⁵²

Maka dari itu, pengecekan keabsahan data mutlak diperlukan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentunya dengan melakukan verifikasi data. Verifikasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) mengoreksi metodologi yang digunakan untuk memperoleh data; (2) mengecek kembali hasil laporan penelitian yang berupa uraian data dan hasil obyektif yang didukung dengan cross check sehingga hasil penelitian ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Wiliam Wiersma dalam Sugiono mengatakan bahwa: "*Triangulation qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedure*". (Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian

¹⁵¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,...h. 119

¹⁵² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,...h. 123

terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu).¹⁵³

Adapun triangulasi yang digunakan untuk mendukung dan memperoleh keabsahan data sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.¹⁵⁴

Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan; (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pendapat orang awam dan orang yang berpendidikan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, atau dokumentasi.

¹⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, ...*.h.372

¹⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, ...*.h.373

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam

1. Sejarah berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam berdiri dibawah naungan Yayasan Islam Pagar Alam (YIP) yang secara legalitas tercantum dalam Akta Notaris Nomor 10 tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Tien Martini tanggal 16 Oktober tahun 2003. Ketua Yayasan Islam Pagar Alam (YIP) pada saat itu dijabat oleh Bapak Deni Priansyah, sekretaris Bapak A. Nizom dan Bendahara Ibu Nova Tri Evriani. Yayasan ini bergerak dibidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan yang pada tahun 2003 mendirikan pondok pesantren yang bernama Ponpes Al-Azhar Kota Pagar Alam.¹⁵⁵

Melihat perkembangan dunia pendidikan di Kota Pagar Alam yang belum begitu maju dan banyaknya antusias calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang strata satu (S.1) pada saat itu, Yayasan Islam Pagar Alam (YIP) berinisiasi untuk mendirikan perguruan tinggi, dengan modal seadanya pada tahun 2004 Yayasan Islam Pagar Alam (YIP) mendirikan perguruan tinggi yang bernama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam dengan program studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Perguruan tinggi ini mulai beroperasi

¹⁵⁵ Wawancara pribadi dengan Bpk. Sawaludin Nafis, Pagar Alam, 05 Mei 2018.

sejak bulan agustus tahun 2004 karena keterbatasan sarana prasarana maka perkuliahan dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Azhar Kota Pagar Alam yang beralamat di Dusun Limbungan Kec. Pagar Alam Selatan. MI Al-Azhar yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Lukman dibawah naungan Yayasan Masjid Agung Kota Pagar Alam mengizinkan pemakaian ruang kelas untuk proses perkuliahan dengan catatan perkuliahan tidak mengganggu siswa belajar dengan kata lain perkuliahan dilakukan setelah para siswa pulang sekolah yaitu pada pukul 02.00 s.d 17.00 WIB setiap harinya.¹⁵⁶

Pada angkatan pertama tahun 2004 terdapat 35 mahasiswa yang berasal dari Kota Pagar Alam dan mayoritas mahasiswa tersebut merupakan Kepala Sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD). Ketua STIT Pertama dijabat oleh Bapak Deni Priansyah Wakil Ketua I Bidang Akademik Bapak Mujamil, Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan Bapak Win Hartan, dan Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan Bapak Darusalam (Alm).¹⁵⁷

Pada tahun 2005 mahasiswa baru berjumlah 18 orang, karena keterbatasan kelas di MI Al-Azhar maka tempat perkuliahan pindah ke daerah Simpang Bacang dengan status menumpang di kampus Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam (STTP) hal ini atas izin dari Walikota Pagar Alam yang saat itu dijabat oleh Bapak Djazuli Kuris. Perkuliahan tidak lama dilakukan di kampus STTP ini kurang lebih selama satu

¹⁵⁶ Wawancara pribadi dengan Bpk. Sawaludin Nafis, Pagar Alam, 05 Mei 2018.

¹⁵⁷ Wawancara pribadi dengan Bpk. Sawaludin Nafis, Pagar Alam, 05 Mei 2018.

tahun, kemudian pada pertengahan tahun 2005 Yayasan Islam Pagar Alam (YIP) membangun gedung kampus STIT yang terletak di daerah Karang Dalo, pembangunan ini selesai pada tahun 2006, dengan selesainya pembangunan kampus STIT tersebut maka pada tahun 2006 kegiatan perkuliahan dipindahkan kembali ke kampus STIT Pagar Alam di Karang Dalo tersebut.¹⁵⁸

Bangunan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) tersebut berdiri di atas tanah seluas 30x30 M yang merupakan tanah hibah, dalam bangunan kampus dua lantai tersebut terdapat enam lokal belajar, satu masjid, satu rumah penjaga dan satu koperasi. Seiring dengan kesibukan Bapak Deni Priansyah, selaku Ketua Yayasan Islam Pagar Alam (YIP) yang merangkap sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) sekaligus sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Pagar Alam Selatan, jabatan ketua STIT diamanahkan kepada Mujamil.¹⁵⁹

Pada masa kepemimpinan Bapak Mujamil, walaupun sudah memiliki gedung perkuliahan sendiri bukan berarti tidak ada masalah dalam perjalanan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT), masalah utama yang dihadapi pada waktu itu berkenaan dengan izin operasional yang belum turun padahal sudah sejak lama diurus di kantor Dirjen Pendidikan Islam. Berkat kerja keras dan do'a dari para mahasiswa pada waktu itu, tepatnya pada tanggal 8 Maret 2007 barulah keluar Surat

¹⁵⁸ Wawancara pribadi dengan Bpk. Sawaludin Nafis, Pagar Alam, 05 Mei 2018.

¹⁵⁹ Wawancara pribadi dengan Bpk. Sawaludin Nafis, Pagar Alam, 05 Mei 2018.

Keputusan (SK) dari Dirjen Pendis Kemenag Jakarta dengan Nomor SK DJ.1/67/2007 Tentang Izin penyelenggaraan Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Jenjang Strata Satu (S.1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam provinsi Sumatera Selatan.¹⁶⁰

Keluarnya SK izin operasional tersebut berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di kampus STIT ini, hal tersebut terbukti dari lonjakan jumlah mahasiswa dimana pada tahun 2006 mahasiswa baru hanya berjumlah 18 orang sedangkan pada tahun 2007 setelah izin operasional turun mahasiswa baru yang mendaftar naik sebesar 750% yaitu sebanyak 137 orang. Pada tahun 2008 STIT mewisuda mahasiswa angkatan pertama dengan jumlah wisudawan sebanyak 27 orang dan wisuda ini dilakukan di Gedung Balai Kota Pagar Alam.¹⁶¹

Pada tahun 2009 ketua STIT Pagar Alam Bapak Mujamil, yang juga merupakan PNS di lingkungan Kementerian Agama Kota Pagar Alam harus pindah tempat tugas di Kota Palembang, hal ini berarti estafet kepemimpinan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) harus diberikan kepada orang lain. Berdasarkan hasil musyawarah Yayasan dan pengurus STIT waktu itu memutuskan untuk memberikan mandat kepada Bapak Zaenal Abidin, sebagai Ketua STIT. Bapak Zaenal Abidin tidak lama menjabat sebagai ketua STIT kurang lebih selama satu tahun.

¹⁶⁰ Wawancara pribadi dengan Bpk. Sawaludin Nafis, Pagar Alam, 05 Mei 2018.

¹⁶¹ Wawancara pribadi dengan Bpk. Sawaludin Nafis, Pagar Alam, 05 Mei 2018.

Kemudian pada tahun 2010 ketua STIT dijabat oleh Bapak Rahman, yang sebelumnya merupakan dosen tetap.¹⁶²

Pada tahun 2010 Yayasan Islam Pagar Alam (YIP) membeli sebidang tanah seluas 75 x 165 M yang terletak di Jalan Lesung Batu, Jambat Balo, Kel. Ulu Rurah, Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Dengan pertimbangan lokasi yang lebih strategis ketua yayasan berencana akan memindahkan kampus STIT di lokasi ini. Kemudian pada Tahun 2010 dimulailah pembangunan gedung kampus STIT di lokasi ini dengan dana dari yayasan dan dari kas STIT. Pembangunan gedung kampus tersebut selesai pada tahun 2011 dan seluruh aktivitas perkuliahan di pindahkan ke gedung baru ini.¹⁶³

Seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di kampus STIT ini pada tahun 2011 STIT mendapat akreditasi pertama dengan predikat C Berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 07/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 Tanggal 17 Juni 2011 yang berlaku s.d 17 Juni 2016. Bapak Rahman menjabat sebagai ketua STIT selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2010 s.d 2013. Pada tahun 2013 ketua STIT diganti oleh Bapak Nur Khalis. Bapak Nur Khalis memimpin sampai dengan tahun 2014, beliau harus digantikan karena beliau mendapatkan beasiswa program doktor dan harus kuliah di UIN Raden Intan Lampung.¹⁶⁴

Tahun 2014 Ibu Nova Tri Evriani ditunjuk sebagai ketua STIT oleh ketua Yayasan Islam Pagar Alam (YIP) sampai dengan sekarang.

¹⁶² Wawancara pribadi dengan Bpk. Sawaludin Nafis, Pagar Alam, 05 Mei 2018.

¹⁶³ Wawancara pribadi dengan Bpk. Sawaludin Nafis, Pagar Alam, 05 Mei 2018.

¹⁶⁴ Wawancara pribadi dengan Bpk. Sawaludin Nafis, Pagar Alam, 05 Mei 2018.

Ibu Nova sendiri merupakan bendahara yayasan sekaligus istri dari ketua Yayasan Islam Pagar Alam (YIP). Pada kepemimpinan Ibu Nova kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam mengajukan akreditasi kembali dan setelah dilakukan visitasi oleh asessor dari BAN-PT alhamdulillah pada tanggal 29 Juli 2016 status kampus STIT telah berubah menjadi terakreditasi B berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor: 1371/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 status akreditasi ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Juli 2021.¹⁶⁵

2. Identitas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam¹⁶⁶
 1. Nama Penyelenggara : Yayasan Islam Pagar Alam (YIP)
 2. Nomor Akte Yayasan : Nomor 10 Tahun 2003
 3. Nama Ketua Yayasan : H. Deni Priansyah, S.Ag., M.Pd.I
 4. Nama Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT)
Kota Pagar Alam
 5. Program Studi : 1. Pendidikan Agama Islam (PAI)
2. Pend. Guru Madrasah Ibtidaiyah
(PGMI)
3. Pend. Guru Raudhatul Athfal (PGRA)
 6. No Izin Ops prodi PAI : Dj.I/67/2007 Tanggal 8 Maret 2007
 7. No Izin Ops prodi PGMI : No. 5221 Tanggal 25 Sept 2017
 8. Nomor Akreditasi PAI : 1371/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016
 9. Nomor Statistik PTAIS : 0000106

¹⁶⁵ Wawancara pribadi dengan Bpk. Sawaludin Nafis, Pagar Alam, 05 Mei 2018.

¹⁶⁶ Dokumen Arsip Profil Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam

10. Nama Ketua STIT : Nova Tri Evriani, M.Pd.I
11. Alamat Kampus STIT : Jalan Lesung Batu Jambat Balo
Kelurahan Ulu Rurah
Kecamatan Pagar Alam Selatan
Kota Pagar Alam Prov. Sumsel

a. Visi STIT Pagar Alam

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang berusaha mewujudkan insan cendekia yang beriman, bertaqwa, berwawasan luas, kompetitif, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dan mampu mewujudkan pembaharuan manajemen pendidikan Islam.¹⁶⁷

b. Misi STIT Pagar Alam

1. Mengembangkan kemampuan berpikir metodologis, kritis dan dinamis yang berwawasan universal dan global.
2. Mengembangkan ilmu pendidikan islam berbasis research.
3. Mewujudkan Pendidikan Agama Islam yang memiliki potensi melakukan pembaharuan dan pengembangan strategi pembelajaran.
4. Mewujudkan pendidikan agama Islam yang memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat.¹⁶⁸

c. Sasaran STIT Pagar Alam

1. Mahasiswa baru yang memiliki kecenderungan untuk menjadi pendidik agama Islam.
2. Mahasiswa lama yang telah mengikuti perkuliahan.

¹⁶⁷ Dokumen Arsip Profil Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam

¹⁶⁸ Dokumen Arsip Profil Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam

3. Metodologi pengembangan ilmu pendidikan Islam.
 4. Proses pembelajaran yang memiliki muatan perombakan pendekatan, metode maupun strategi pembelajaran.
 5. Sinergitas antara komponen pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat¹⁶⁹
- d. Tujuan STIT Pagar Alam
1. Untuk meningkatkan pendidikan Agama Islam yang mampu merespon perkembangan zaman.
 2. Untuk mewujudkan tenaga pendidik Agama Islam yang mampu melakukan tugas secara professional dan Islami.
 3. Untuk menyiapkan tenaga pendidik Agama islam yang kompeten dalam menguasai metodologi sehingga mampu mengembangkan ilmu pendidikan islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
 4. Untuk menyiapkan lulusan (tenaga pendidikan Agama Islam) yang memiliki kepedulian dalam pembaharuan menejemen pembelajaran pendidikan Agama Islam.
 5. Untuk menyiapkan lulusan (tenaga pendidik Agama Islam) yang memiliki kepedulian melakukan pembenahan pendidikan Agama Islam dan Akhlak di tengah-tengah masyarakat.
 6. Untuk menyiapkan lulusan (tenaga pendidik agama Islam) yang memiliki keunggulan spiritual, intelektual, moral, sosial dan ketrampilan.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Dokumen Arsip Profil Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam

e. Strategi Pencapaian STIT Pagar Alam

1. Menyeleksi calon mahasiswa baru dengan pendekatan kualitas.
2. Melakukan pemberdayaan kepada mahasiswa melalui proses perkuliahan.
3. Memfasilitasi penguatan pendekatan metodologis.
4. Mensosialisasikan dan mengimplementasikan proses pembelajaran yang membelajarkan.
5. Membangun keseimbangan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat)¹⁷¹

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini di peroleh melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun hasil penelitian yang penulis temukan pada objek penelitian adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara penulis kepada Ketua STIT Kota Pagar Alam mengenai kurikulum :

“Kurikulum merupakan urat nadi dari sebuah sistem pendidikan, demikian halnya di STIT Kota Pagar Alam. Kurikulum yang diterapkan di STIT Kota Pagar Alam selama ini mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 yaitu dilaksanakan berbasis kompetensi (KBK). Dalam pelaksanaannya di STIT Kota Pagar Alam kurikulum ini selalu kami evaluasi dalam bidang muatan, metode pengajaran, dan perangkat pengajaran. Bapak, Ibu Dosen sebelum mengajar kami berikan arahan untuk menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan menyiapkan sumber bacaan/ buku-buku referensi perkuliahan”.¹⁷²

¹⁷⁰ Dokumen Arsip Profil Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam

¹⁷¹ Dokumen Arsip Profil Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam

¹⁷² Wawancara pribadi dengan Ibu Nova Tri Evriani, Pagar Alam, 03 Mei 2018.

Lebih lanjut Ibu Nova menjelaskan sebagai berikut:

“Kami melaksanakan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap 4 tahun sekali kecuali apabila memang ada hal-hal yang perlu segera di kaji ulang dalam penerapan kurikulum tersebut maka kami akan adakan evaluasi sesuai dengan kebutuhan. Mengenai peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 73 tahun 2013 yang mewajibkan setiap program studi untuk menyusun kurikulum yang mengacu pada KKNI kami telah berkomitmen akan melaksanakannya dengan mempersiapkan diri mulai dari sekarang, walupun kami belum menyesuaikan kurikulum pendidikan sesuai dengan KKNI namun kami telah memberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi para alumni kami sejak tahun 2016”.¹⁷³

Sementara itu menurut ketua prodi Pendidikan Agama Islam (PAI)

Bapak Hendi Kariyanto dalam kesempatan wawancara, sebagai berikut:

“Kurikulum adalah ruh sebuah pendidikan termasuk pada pendidikan tinggi. Pendidikan tidak akan dapat berjalan tanpa adanya kurikulum. Kurikulum memiliki kemampuan yang dapat memberikan dampak yang sangat positif bagi peserta didik jika diterapkan dengan sebaiknya. Kurikulum memiliki kriteria yang mencakup berbagai aspek seperti, *attitude*, bidang kemampuan kerja/ keahlian, pengetahuan dan manajerial. Kurikulum pendidikan di STIT Pagar Alam terbagi atas 1). Mata Kuliah Umum (MKU), 2). Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK), 3). Mata Kuliah Keahlian (MKK) dan 4). Mata Kuliah Lokal (MKL). Dalam proses perkuliahan para dosen dibekali dengan buku silabus, hal ini diharapkan agar saat mengajar para dosen dapat berpedoman dengan silabus dan agar tidak keluar dari tujuan pendidikan yang di rumuskan program studi”.¹⁷⁴

Sementara mengenai perubahan kurikulum yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Ketua STIT menyatakan demikian :

“Kurikulum dalam penerapannya memang harus mengalami evaluasi demi kesempurnaan dan kesesuaian dengan kebutuhan zaman, sekarang ini sedang hangat di bincangkan mengenai kurikulum yang

¹⁷³ Wawancara pribadi dengan Ibu Nova Tri Evriani, Pagar Alam, 03 Mei 2018.

¹⁷⁴¹⁷⁴ Wawancara pribadi dengan Bpk. Hendi Kariyanto, Pagar Alam, 02 Mei 2018

mengacu kepada KJNI, di STIT sendiri kurikulum yang mengacu kepada KJNI memang belum kami terapkan dikarenakan kami belum pernah mendapat sosialisasi, pelatihan atau workshop mengenai kurikulum berbasis KJNI baik dari Dirjen Pendidikan Islam maupun dari pihak Kopertais. Untuk pedoman KJNI juga kami belum ada saat ini, saya selaku ketua pernah meminta ketua Biro Pendidikan untuk menanyakan hal tersebut ke kopertais Wil. VII Sumbagsel yang beralamat di Palembang namun ternyata di kopertais juga belum ada instruksi untuk menerapkan kurikulum KJNI di perguruan tinggi, ketika kami meminta pedoman KJNI untuk kami pelajari, di kopertais juga ternyata tersedia, kami berharap kopertais dapat membantu kami dalam mengimplementasikan kurikulum yang mengacu kepada KJNI sesuai dengan amanat Permendikbud no 73 tahun 2013”¹⁷⁵.

Sementara itu menurut Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI),

Bapak Hendi Kariyanto, sebagai berikut:

“Kami belum menerapkan kurikulum berbasis KJNI karena beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal misalnya kurangnya pengetahuan tentang KJNI dan belum ada buku pedoman dalam pengembangan kurikulum, sedangkan faktor eksternal misalnya karena memang sejauh ini belum pernah ada pelatihan kurikulum berbasis KJNI dari pihak kopertais, sehingga menunggu-nunggu adanya arahan atau bimbingan dari kopertais dalam pengimplementasiannya”¹⁷⁶.

Mengenai Permendikbud yang mewajibkan setiap prodi untuk menyusun kurikulum yang mengacu kepada KJNI, Bapak Hendi Kariyanto menjelaskan sebagai berikut:

“Sikap kami terhadap Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KJNI) Bidang Pendidikan Tinggi adalah akan mempersiapkan diri terlebih dahulu karena sebenarnya belum ada Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mengatur mengenai kurikulum berbasis KJNI ini karena secara garis koordinasi STIT Kota Pagar Alam berada di bawah naungan Menteri Agama RI. Prodi akan mempersiapkan diri dengan menggali informasi se lengkap-lengkapnya dan mempelajari kebijakan

¹⁷⁵ Wawancara pribadi dengan Ibu Nova Tri Evriani, Pagar Alam, 03 Mei 2018.

¹⁷⁶ Wawancara pribadi dengan Bpk. Hendi Kariyanto, Pagar Alam, 02 Mei 2018

mengenai kurikulum berbasis KKNI ini, kami berharap pihak kopertais dapat melakukan sosialisasi kepada para pengurus dan dosen di STIT Kota Pagar Alam ini”.¹⁷⁷

Mengenai persiapan apa yang sudah dilakukan STIT Kota Pagar Alam dalam mempersiapkan diri untuk implementasi kurikulum berbasis KKNI, Ibu Nova menjelaskan sebagai berikut:

“Kami berusaha mencari pedoman atau panduan tentang kurikulum yang mengacu kepada KKNI, mencari informasi tentang KKNI baik melalui mesin pencari google maupun meminta bimbingan dari pihak kopertais wilayah VII sebagai koordinator perguruan tinggi islam swasta di sumatera bagian selatan, namun kami mengalami kendala karena di kopertais sendiri mengatakan bahwa mereka belum memiliki pedoman resmi mengenai kurikulum yang mengacu kepada KKNI, instruksi dari Dirjen Pendis juga belum ada untuk kami mengadakan sosialisasi mengenai kurikulum yang mengacu kepada KKNI tersebut kata orang kopertais. Jadi kami berusaha memahami dari informasi yang kami dapat dari berbagai sumber salah satunya dari internet”.¹⁷⁸

Penulis juga mewawancarai beberapa dosen dalam penelitian ini, salah satu yang penulis wawancarai yaitu Bapak Darma Sugiarta, Dosen sekaligus menjabat sebagai Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat), beliau mengatakan sebagai berikut:

“Dalam sistem pendidikan nasional kurikulum telah diatur tersendiri, kurikulum merupakan muatan isi, metode, dan segala hal yang dibutuhkan dalam proses pendidikan. Kurikulum yang bagus adalah kurikulum yang mampu mencapai tujuan pendidikan nasional, kurikulum tersebut harus di sesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga para peserta didik mampu bersaing pada era global seperti sekarang ini. Evaluasi kurikulum dari tahun ke tahun selalu di lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Negara kita ini. Perubahan kurikulum ini seharusnya tidak menjadi beban atau masalah bagi pengelola pendidikan. Dengan mempersiapkan diri dan membekali pengetahuan tentang kurikulum tersebut kita akan

¹⁷⁷ Wawancara pribadi dengan Bpk. Hendi Kariyanto, Pagar Alam, 02 Mei 2018

¹⁷⁸ Wawancara pribadi dengan Ibu Nova Tri Evriani, Pagar Alam, 03 Mei 2018.

mengerti dan mampu menyampaikannya dengan baik kepada para peserta didik”.¹⁷⁹

Sementara itu mengenai kurikulum berbasis KKNI pada pendidikan tinggi, ketua LPPM STIT Kota Pagar Alam ini menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“KKNI merupakan penyetaraan lulusan pada pendidikan tinggi yang bertujuan alumni perguruan tinggi dapat bersaing dalam dunia kerja dan dapat memenuhi syarat yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Kita ketahui bahwa semakin hari semakin banyak para pengangguran intelektual di negara Indonesia ini, KKNI di susun berdasarkan fakta tersebut. Namun, dalam realisasinya membutuhkan persiapan yang matang dari semua pihak mulai dari pemerintah, pengelola pendidikan tinggi dan pelaksana pendidikan tinggi/ dosen. Sosialisasi implementasi kurikulum berbasis KKNI ini seharusnya di laksanakan secara merata dari kota sampai ke daerah-daerah. Kalau mencermati kesiapan pendidikan tinggi khususnya pendidikan tinggi yang berada di daerah-daerah, sampai saat ini masih sangat banyak sekali masalah-masalah atau keterbatas dalam proses pendidikannya, seperti keterbatasan dosen tetap, SDM dan sarana prasarana. Dalam penerapan kurikulum berbasis KKNI ini seharusnya lembaga pendidikan tinggi tersebut sudah terbebas dari masalah-masalah yang saya sebutkan di atas”.¹⁸⁰

Beberapa dosen STIT Kota Pagar Alam justru mengatakan belum tahu tentang adanya kurikulum yang mengacu kepada KKNI, bahkan KKNI sendiri meraka banyak yang belum paham hal ini seperti yang di sampaikan oleh beberapa dosen :

Menurut Bapak Nasrun Efendi dari hasil wawancara mengatakan “Saya belum mengetahui tentang adanya perubahan kurikulum pendidikan tinggi yang harus mengacu kepada KKNI, bahkan KKNI sendiri saya baru kali ini mendengarnya”.¹⁸¹

Ketika di tanya apakah pernah Bapak mengikuti pelatihan tentang kurikulum pendidikan tinggi? Jawaban Bapak Nasrun tidak.

¹⁷⁹ Wawancara pribadi dengan Bapak Darma Sugiarta, Pagar Alam, 03 Mei 2018.

¹⁸⁰ Wawancara pribadi dengan Bapak Darma Sugiarta, Pagar Alam, 03 Mei 2018.

¹⁸¹ Wawancara pribadi dengan Bapak Nasrun Efendi, Pagar Alam, 02 Mei 2018.

Senada dengan pendapat Bapak Nasrun Efendi di atas, Bapak Abdul Haris memberikan keterangannya mengenai kurikulum pada pendidikan tinggi:

“Saya menjadi dosen di kampus STIT Pagar Alam ini sudah sejak tahun 2010, dari tahun ke tahun yang saya tahu sering ada evaluasi mengenai kurikulum di STIT ini yang di adakan oleh pengurus melalui ketua prodi, hasil dari evaluasi mengenai kurikulum tersebut biasanya di sampaikan pada saat rapat dosen pada tahun akademik baru. Mengenai pelatihan atau workshop tentang kurikulum selama ini yang saya tahu dan pernah saya ikuti pernah dua kali STIT mengundang pemateri dari Palembang dengan peserta dosen-dosen dan pengurus waktu itu”. Kalau mengenai kurikulum pendidikan tinggi yang mengacu kepada KKNI, saya juga baru mendengar kali ini, jadi saya belum tahu”¹⁸²

Sementara itu dari hasil wawancara dengan dosen yang lain yaitu Ibu Wulan Sari, berpendapat sebagai berikut:

“Kurikulum merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam pendidikan, kurikulum sama dengan pondasi. Apabila pondasinya tidak kuat maka yang lain tidak akan kuat juga. Seharusnya kurikulum ini dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, yang saya tahu kurikulum memang sering berubah-ubah, saya sejutu dengan perubahan itu namun perubahan itu juga harus mampu merupah pola pendidikan yang di sampaikan oleh para pendidik. Jangan sampai kurikulum berubah namun para guru atau dosen masih seperti itu saja cara mengajarya. Sejak saya menjadi dosen dan mengajar di STIT Pagar Alam ini saya satu kali mengikuti pelatihan tentang kurikulum yang di adakan oleh prodi Pendidikan Agama Islam (PAI)”¹⁸³

Ketika ditanya mengenai kurikulum pendidikan tinggi yang mengacu kepada KKNI, Ibu Wulan Sari menjawab sebagai berikut:

“Terus terang saya baru kali ini mendengar istilah KKNI, yang saya tahu selama ini kami mengajar sesuai Silabus dan SAP yang di tentukan oleh pihak kampus. Dari ketua prodi atau dosen-dosen yang lain juga belum pernah saya dengar kurikulum yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Namun apabila

¹⁸² Wawancara pribadi dengan Bapak Abdul Haris, Pagar Alam, 02 Mei 2018.

¹⁸³ Wawancara pribadi dengan Ibu Wulan Sari, Pagar Alam, 02 Mei 2018.

memang harus, maka saya bersedia untuk belajar mengenai kurikulum tersebut”.¹⁸⁴

C. Pembahasan

Dari hasil temuan penelitian di atas penulis dapat menganalisa bahwa Ketua STIT Kota Pagar Alam menempatkan kurikulum sebagai yang utama dalam sebuah pendidikan, Ibu Nova juga mengatakan tidak ada pendidikan tanpa adanya kurikulum.¹⁸⁵ Hal ini berarti kurikulum mempunyai fungsi yang sangat penting untuk menjalankan proses belajar-mengajar. Sementara itu Ketua Prodi Bapak Hendi Kariyanto mengatakan bahwa kurikulum merupakan ruh dari sebuah pendidikan hal ini senada dengan Ibu Nova yang menempatkan kurikulum sebagai urat nadi dari sebuah pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara ketua STIT menyampaikan bahwa di STIT Kota Pagar Alam masih menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sesuai Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010. Menurut Bapak Hendi Kariyanto kurikulum pendidikan di STIT Pagar Alam terbagi atas 1). Mata Kuliah Umum (MKU), 2). Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK), 3). Mata Kuliah Keahlian (MKK) dan 4). Mata Kuliah Lokal (MKL).¹⁸⁶ Muatan kurikulum ini dapat penulis lihat pada silabus program studi, terdapat 53 mata kuliah termasuk KKN dan Skripsi dengan jumlah 152 SKS.¹⁸⁷ Menurut penulis ini sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014

¹⁸⁴ Wawancara pribadi dengan Ibu Wulan Sari, Pagar Alam, 02 Mei 2018.

¹⁸⁵ Wawancara pribadi dengan Ibu Nova Tri Evriani, Pagar Alam, 03 Mei 2018

¹⁸⁶ Wawancara pribadi dengan Bpk. Hendi Kariyanto, Pagar Alam, 02 Mei 2018

¹⁸⁷ Silabus Prodi PAI, Tim Penyusun STIT Pagar Alam, 2015

Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan pada program sarjana minimal menempuh 144 SKS.¹⁸⁸

Namun ketika ditanya apakah ada pedoman tentang pengembangan kurikulum pada prodi PAI di STIT Pagar Alam? Ketua prodi menyatakan bahwa pada prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) di STIT Kota Pagar Alam belum mempunyai panduan pengembangan kurikulum, sama dengan yang disampaikan oleh ketua STIT bahwa penyusunan kurikulum dilakukan dengan mengadopsi kurikulum yang ada pada perguruan tinggi negeri dalam hal ini UIN Raden Fatah Palembang dengan sedikit penyesuaian. Sementara itu dalam STATUTA STIT penulis menemukan peraturan mengenai kurikulum pada pasal 45 tentang kurikulum yaitu “Penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STIT Pagar Alam dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang sesuai dengan sasaran program studi, kurikulum sebagaimana dimaksud berpedoman pada kurikulum Nasional yang diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional dan atau Menteri Agama RI atau kurikulum IAIN dan atau kurikulum STAIN dan atau kurikulum yang di susun oleh STIT Pagar Alam”.¹⁸⁹ Artinya dalam penyusunan kurikulum STIT Kota Pagar Alam berpedoman pada STATUTA.

Sikap Ketua STIT dan Ketua Prodi PAI STIT Pagar Alam mengenai kurikulum yang mengacu kepada KKNi yaitu menunggu bimbingan dan arahan dari pihak kopertais, dalam kesempatan wawancara Ibu Nova dan Bapak Hendi menyebutkan bahwa di STIT Pagar Alam belum pernah

¹⁸⁸ Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 17 Ayat 2

¹⁸⁹ Dokumen Statuta STIT Pagar Alam Tahun 2015 Pasal 45

mendapat undangan tentang sosialisasi kurikulum yang mengacu kepada KKNI, mereka bahkan belum mempunyai pedoman tentang kurikulum pada program studi. Hal ini merupakan masalah yang mendasar yang seharusnya tidak terjadi karena dalam merumuskan kurikulum butuh panduan yang jelas yang di susun secara bersama-sama oleh pengelola pendidikan tinggi. Pedoman kurikulum seharusnya dapat di susun berpedoman pada Undang-undang Pendidikan Tinggi, Undang-undang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri ataupun Peraturan Presiden.

Dengan demikian pendapat ketua prodi di atas menunjukkan sikap tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kurikulum yang mengacu kepada KKNI, mereka mempersiapkan diri sambil menunggu Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang implementasi KKNI pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Mengenai sikap pendidikan tinggi terhadap KKNI ini Sutrisno dan Suyadi dalam bukunya *Desain Kurikulum Perguruan Tinggi Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia* membagi kepada tiga golongan yaitu :¹⁹⁰

1. Sikap Menunggu Peraturan Menteri Agama (PMA)

Menanti Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang implementasi KKNI pada PTKI. Tidak mau menggunakan Permendikbud no 73 tahun 2013 dan Permendikbud No. 49 dan 81 tahun 2014. Dengan alasan masih ada waktu dua tahun untuk melaksanakannya berdasarkan Perpres nomor 8 tahun 2012. Pada Perpres tersebut, yang berlaku masa transisi paling

¹⁹⁰ Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum....* h. 12

lama 5 tahun sejak disahkan, sehingga implementasi KKNI bidang pendidikan tinggi paling lambat 2016/2017. Padahal, tidak ada yang menyiapkan. Untuk jenjang S1, draf PMA ini sudah ada yang menyiapkan, meskipun kurang lengkap. Namun, untuk S2 dan S3 belum ada yang menyiapkan.

2. Sikap Proaktif

Mengimplementasikan KKNI dengan merujuk pada semua perundang-undangan yang terkait dengan KKNI tersebut. Dengan argumen Perpres nomor 8 tahun 2012 harus sudah diterapkan selambat-lambatnya 5 tahun setelah disahkan. Dengan demikian, pembukaan prodi baru harus merujuk pada KKNI, dan akreditasi juga harus merujuk pada KKNI.

3. Sikap Progresif

Sikap progresif adalah sejumlah kebijakan yang diambil oleh para *top leader* atau pemangku kepentingan (dalam konteks perguruan tinggi adalah Wakil Rektor bidang akademik atau wakil dekan bidang akademik) untuk membuat *blue print* pengembangan akademik secara komprehensif dengan mengacu pada KKNI secara keseluruhan. Sikap progresif dalam hal ini juga dapat dimaknai sebagai implementasi KKNI bidang pendidikan tinggi secara menyeluruh dalam jangka panjang maupun pendek.

Dalam kesempatan wawancara Ibu Nova selaku ketua STIT mengatakan berkomitmen akan melaksanakannya dengan mempersiapkan diri mulai dari sekarang, namun dari pengamatan penulis belum menemukan persiapan seperti yang disampaikan oleh Ibu Nova tersebut. Penulis tidak menemukan pedoman kurikulum KKNI, penulis tidak menemukan dokumen rapat atau dokumen tertulis lain yang membahas mengenai perubahan kurikulum yang mengacu kepada KKNI, sementara itu pengajaran yang dilakukan oleh dosen masih cenderung konvensional menggunakan metode diskusi dan tanya jawab.

Perubahan kurikulum harusnya disosialisasikan secara merata oleh pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah, disosialisasikan kepada para pengelola pendidikan dan kepada para pendidik. Menurut Ibu Nova dan Bapak Hendi sejauh ini belum ada sosialisasi dari pemerintah yang sampai ke kampus STIT, bahkan edaran atau salinan perpres dan permendikbud pun harus di cari mandiri melalui mesin pencari *google*. Dalam hal ini peran kopertais sebagai lembaga yang seharusnya mengkoordinir, mengawasi dan membina perguruan tinggi swasta dirasa kurang maksimal. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ibu yang menyampaikan saya selaku ketua pernah meminta ketua Biro Pendidikan untuk menanyakan tentang pedoman tentang kurikulum berbasis KKNI ke kopertais Wil. VII Sumbagsel namun ternyata di kopertais juga ternyata belum tersedia.¹⁹¹

¹⁹¹ Wawancara pribadi dengan Ibu Nova Tri Evriani, Pagar Alam, 03 Mei 2018

Dalam rangka penerapan kurikulum yang mengacu kepada KKNI, pemerintah telah membuat tugas masing-masing lembaga terkait untuk berperan membantu perguruan tinggi melaksanakan kurikulum KKNI tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 pada pasal 10 ayat 2 dan 3 disebutkan secara jelas tentang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal pendidikan tinggi tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi, yaitu: Ayat (2) dalam penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan, Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Melakukan sosialisasi KKNI bidang pendidikan tinggi dan strategi implementasinya kepada para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- b. Mewajibkan perguruan tinggi untuk menerbitkan surat keterangan pendamping ijazah yang menjelaskan kualifikasi lulusan sesuai dengan jenjang KKNI bidang pendidikan tinggi;
- c. Mendorong kementerian teknis dan pemangku kepentingan untuk memberi penghargaan pada lulusan perguruan tinggi berbasis pada kualifikasi;
- d. Menyusun dan mensosialisasikan profil pendidikan tinggi Indonesia yang mencakup informasi program studi yang kualifikasi lulusannya sesuai dengan jenjang kualifikasi pada KKNI bidang pendidikan tinggi;

- e. Berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, kementerian teknis dan lembaga negara lainnya.¹⁹²

Kemudian pada ayat (3) Dalam menerapkan KKNi di bidang kurikulum pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Memberikan masukan, konsultasi, pembimbingan/ pendampingan, mendorong dan memfasilitasi terjadinya proses penerapan KKNi bidang pendidikan tinggi di perguruan tinggi pendidikan tinggi;
- b. menyusun kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi yang mengacu pada KKNi bidang pendidikan tinggi;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan kurikulum oleh program studi terhadap pencapaian jenjang kualifikasi pada KKNi bidang pendidikan tinggi;
- d. Mengevaluasi deskripsi capaian pembelajaran minimal yang diusulkan oleh program studi sebagai dasar penetapan standar kompetensi lulusan program studi oleh Menteri;
- e. Mengevaluasi secara berkala deskripsi capaian pembelajaran minimal yang diusulkan oleh program studi sebagai dasar penetapan standar kompetensi lulusan program studi oleh Menteri;
- f. Mengevaluasi secara berkala deskripsi capaian pembelajaran program studi yang telah ditetapkan sebagai standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagai rujukan nasional bagi program pendidikan terkait;

¹⁹² Permendikbud, RI Nomor 73 Tahun 2013... pasal 10 ayat 2

- g. Bersama tim pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf c, dan Pasal 7 ayat (2) huruf c, menjamin akuntabilitas dan kompatibilitas substansi proposal penyelenggaraan RPL dan usulan capaian pembelajaran dari program studi; dan
- h. Berkoordinasi dengan BAN-PT atau lembaga akreditasi lainnya yang diakui oleh pemerintah baik pada tingkat nasional maupun internasional, BSNP, atau lembaga lain yang menyusun standar pendidikan atau standar kompetensi kerja dan diakui oleh pemerintah baik pada tingkat nasional maupun internasional, lembaga sertifikasi kompetensi, lembaga sertifikasi profesi, asosiasi profesi, asosiasi industri, baik pada tingkat nasional maupun internasional serta badan atau lembaga lain di tingkat nasional yang terkait dengan penjaminan mutu sumber daya manusia pada level kualifikasi 3 sampai dengan 9.¹⁹³

Dari penejelasan Permendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013 di atas dapat penulis berpendapat bahwa seharusnya perguruan tinggi mendapatkan sosialisasi, bimbingan, pendampingan dan fasilitas dari dirjen atau kopertais untuk melaksanakan kurikulum yang mengacu pada KKNI.

Walaupun di STIT Kota Pagar Alam belum menerapkan kurikulum yang mengacu kepada KKNI namun penulis menemukan dokumen yang menyatakan bahwa kurikulum yang dilaksanakan di STIT Pagar Alam berdasarkan KKNI level 7, ini dapat di lihat dari Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan temuan tersebut di benarkan oleh Ibu Nova

¹⁹³ Permendikbud, RI Nomor 73 Tahun 2013... pasal 10 ayat 3

selaku ketua STIT. Menurut Ibu Nova sejak tahun 2016 para alumni telah di bekali dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Menurut penulis seharusnya dalam menerbitkan SKPI ini harus melalui proses yang semestinya yaitu dengan menerapkan kurikulum yang mengacu kepada KKNI. Kebijakan ini menurut Ibu Nova dilakukan berdasarkan Permendikbud Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Sementara itu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menyebutkan bahwa lulusan pendidikan tinggi (Sarjana dan Diploma IV) setara dengan level 6 bukan level 7.¹⁹⁴

SKPI berbeda dengan transkrip akademik, walaupun sama-sama menerangkan mengenai perkuliahan. Bedanya ialah jika transkrip akademik hanya menggambarkan mengenai nilai yang dicapai oleh mahasiswa dari setiap mata kuliahnya, sedangkan SKPI lebih menggambarkan pada apa saja yang dicapai oleh mahasiswa selama perkuliahannya. Pencapaian mahasiswa selama perkuliahannya dapat digambarkan pada kolom *Capaian Pembelajaran Lulusan*, yakni menerangkan kemampuan yang dibutuhkan sebagai prasyarat dalam persaingan dunia kerja dilihat dari latar belakang lulusannya. Misalkan untuk lulusan Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Akuntansi dapat membuat laporan keuangan melalui serangkaian siklus akuntansi dan menganalisisnya.¹⁹⁵

¹⁹⁴ Permendikbud Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, Pasal 1 ayat 2.

¹⁹⁵ <http://blogmfe.blogspot.co.id/2015/12/apa-itu-surat-keterangan-pendamping.html> di akses pada 17 Mei 2018

Capaian pembelajaran juga tidak hanya membahas mengenai kemampuan dalam persaingan kerja semata, namun juga membahas mengenai kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh lulusan dan juga kemampuan sikap yang harus dimiliki oleh lulusan. Hal ini dapat membantu para perekrut kerja (HRD perusahaan) dalam menyeleksi tenaga kerja. Selain beberapa hal mengenai capaian pembelajaran, ada hal lain yang ada di SKPI, yakni aktivitas mahasiswa selama perkuliahan. Hal ini termasuk pada kegiatan seminar dan workshop yang diikuti, prestasi yang pernah diraih, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan akademik.

Sementara itu menurut Dede Rosyada, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.¹⁹⁶ Permendikbud sendiri merupakan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 44 ayat 1 sampai ayat 3, UU Nomor 12 mengharuskan setiap perguruan tinggi memberikan sertifikat kompetensi bagi setiap lulusannya sebagai keterangan resmi tentang kompetensi mereka sekaligus bisa digunakan untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.¹⁹⁷

¹⁹⁶ Dede Rosyada. <http://www.uinjkt.ac.id/id/surat-keterangan-pendamping-ijazah/> di akses pada 17 Mei 2018

¹⁹⁷ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*, Kementerian Sekretariat NegaraRI, Jakarta, 2012

Dengan demikian, UU Nomor 12 tahun 2012 secara tegas mengarahkan agar setiap lulusan perguruan tinggi bisa memasuki pasar kerja. Untuk itu, setiap lulusan pendidikan tinggi harus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah setiap program studi harus mampu memperjelas kompetensi yang diperoleh para mahasiswanya saat mereka lulus menjadi sarjana yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Nantinya, sertifikat ini bisa mereka gunakan untuk memasuki pasar kerja. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), misalnya, menerbitkan sertifikat kompetensi keguruan bagi para mahasiswanya yang sudah lulus sebagai bukti bahwa mereka memiliki kompetensi dalam bidang pembelajaran.¹⁹⁸

Demikian juga Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH), harus menerbitkan sertifikat kompetensi alumni sebagai hakim, pengacara, atau kompetensi lain yang sesuai dengan keahlian sekaligus bisa digunakan alumninya untuk memasuki pasar kerja. Persoalannya adalah bagaimana dengan fakultas-fakultas yang seluruh program studinya mengelola program keilmuan dan tidak pernah mengembangkan program pendidikan keahlian untuk memasuki pasar kerja? Sebab karakter keilmuan yang mereka kembangkan adalah ilmu untuk ilmu, bukan ilmu untuk bekerja. Sebut misalnya program studi Aqidah Filsafat, al-Qur'an dan Tafsir, Ilmu Hadits, Bahasa dan Sastra Arab, Sejarah Kebudayaan Islam, dan lain-lain.¹⁹⁹

¹⁹⁸ Dede Rosyada, <http://www.uinjkt.ac.id/id/surat-keterangan-pendamping-ijazah/...>

¹⁹⁹ Dede Rosyada, <http://www.uinjkt.ac.id/id/surat-keterangan-pendamping-ijazah/...>

Sementara, hampir 60% ilmu yang menjadi kewenangan Kementerian Agama dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama adalah ilmu-ilmu keagamaan yang tidak disertai dengan keterampilan kerja karena karakter keilmuannya. Oleh sebab itu, Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa: Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/ atau memiliki prestasi di luar program studinya.²⁰⁰ Maka, mengacu pada Permendikbud ini, seorang mahasiswa/sarjana bidang al-Qur'an dan Tafsir, misalnya, bisa memiliki sertifikat kompetensi komputer melalui pelatihan yang diperoleh selama belajar dan belum dinyatakan lulus dari program studinya.

Salah satu jalan perbaikan kurikulum dan program pembelajaran adalah *redesign* kurikulum dimana dengannya para mahasiswa berkesempatan melatih diri dalam satu atau dua keterampilan/keahlian sehingga memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar kerja tanpa mengurangi kewajiban belajar pada kompetensi utama program studinya. Pelatihan keterampilan/keahlian merupakan perlakuan formal berbasis kurikulum dan dipertanggungjawabkan dalam transkrip nilai, sertifikat kompetensi dan juga SKPI. Akan tetapi, jika struktur kurikulumnya sudah padat, dan sudah memiliki satu skil khusus sesuai program studi,

²⁰⁰ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 44 ayat 1-3.

namun akan menambhakan kompetensi lain, fakultas boleh membuka kesempatan pada para mahasiswa untuk mengikuti program pelatihan ekstra yang diprogramkan fakultas sebagai program bersertifikat.²⁰¹

Panduan implementasi KKNi bidang pendidikan tinggi sangat diperlukan agar tidak terdapat salah penafsiran dalam implementasinya. Panduan tersebut diharapkan lebih idealis dan akademis, tetapi tetap realistis, dan tidak sekadar yuridis dan legal formal sebagaimana tertuang dalam perundang-undangan pendidikan tinggi. Dengan kata lain, diperlukan desain model implementasi KKNi bidang pendidikan tinggi yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

- (a) Implementasi KKNi bidang pendidikan tinggi yang tidak larut dan tenggelam oleh globalisasi, tetapi mampu mempertahankan jati diri.
- (b) Implementasi KKNi bidang pendidikan tinggi yang tidak sekadar mencetak tenaga kerja, tetapi juga *outcome* yang mampu berkarya.
- (c) Implementasi KKNi bidang pendidikan tinggi yang penuh penghayatan, sehingga memiliki jiwa atau spirit yang menyehatkan, tidak sekadar mengisi kolom-kolom kosong tanpa pemaknaan.
- (d) Dengan memenuhi ketiga kriteria di atas, implementasi KKNi bidang pendidikan tinggi akan disikapi oleh para pengelola pendidikan tinggi secara proaktif bahkan progresif.²⁰²

²⁰¹ Dede Rosyada, [http://www.uinjkt.ac.id/id/surat-keterangan-pendamping-ijazah/...](http://www.uinjkt.ac.id/id/surat-keterangan-pendamping-ijazah/)

²⁰² Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum...* h. 13

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Darma Sugiarta selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIT Kota Pagar Alam penulis mendapatkan informasi bahwa dalam penyusunan kurikulum di STIT Pagar Alam telah ada tim tersendiri tanpa melibatkan LPPM. Ketua LPPM telah mengetahui perubahan kurikulum pendidikan tinggi mengacu kepada KKNI namun menurutnya hal ini perlu waktu untuk dapat dilaksanakan di seluruh perguruan tinggi, dalam melaksanakan suatu program paling tidak membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan pengawasan. KKNI merupakan penyetaraan lulusan pada pendidikan tinggi yang bertujuan alumni perguruan tinggi dapat bersaing dalam dunia kerja dan dapat memenuhi syarat yang dibutuhkan di dalam dunia kerja.²⁰³

Dari pernyataan Bapak Darma di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa KKNI di anggap sebagai salah satu cara untuk menjawab tantangan dunia kerja. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Nasional, pada agustus 2016 terdapat 219.736 pengangguran tingkat akademi/ diploma sedangkan pada agustus 2017 meningkat menjadi 242.937, untuk pengangguran tingkat sarjana pada agustus 2016 sebanyak 567.235 dan pada agustus 2017 mengalami peningkatan menjadi 618.758.²⁰⁴ KKNI diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi yang mampu menjawab tantangan di era global seperti sekarang ini. Diharapkan melalui implementasi KKNI pada pendidikan tinggi ini dapat mengurangi jumlah pengangguran

²⁰³ Wawancara pribadi dengan Bapak Darma Sugiarta, Pagar Alam, 03 Mei 2018.

²⁰⁴ <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/972/pengangguran-terbuka-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-1986---2017.html>. Diakses 14 Mei 2018

secara nasional. Namun, menurut Bapak Darma di atas masih banyak yang harus dipersiapkan oleh lembaga pendidikan tinggi dalam implementasi kurikulum yang mengacu kepada KKNi diantaranya keterbatasan dosen tetap, kurang siapnya SDM dan sarana prasarana.

Dalam realisasinya perubahan kurikulum ini membutuhkan persiapan yang matang dari semua pihak mulai dari pemerintah, pengelola pendidikan tinggi dan pelaksana pendidikan tinggi/ dosen. Sosialisasi implementasi kurikulum berbasis KKNi ini seharusnya di laksanakan secara merata dari kota sampai ke daerah-daerah. Kalau mencermati kesiapan pendidikan tinggi khususnya pendidikan tinggi yang berada di daerah-daerah, sampai saat ini masih sangat banyak sekali masalah-masalah atau keterbatasan dalam proses pendidikannya, seperti keterbatasan dosen tetap, SDM dan sarana prasarana. Dalam penerapan kurikulum berbasis KKNi ini seharusnya lembaga pendidikan tinggi tersebut sudah terbebas dari masalah-masalah yang saya sebutkan di atas.²⁰⁵

Ketua LPPM mengau belum pernah mengikuti workhsop atau pelatihan tentang KKNi namun ketua LPPM sangat mendukung kalau kurikulum pendidikan tinggi disesuaikan dan dievaluasi mengacu kepada KKNi. KKNi merupakan pengelompokan jenjang-jenjang dalam penguasaan materi para mahasiswa sehingga seharusnya antara perguruan tinggi yang di daerah dengan di kota dengan jenjang yang sama mempunyai kualitas minimal alumni yang sama. Dengan demikian akan terjadi pemerataan

²⁰⁵ Wawancara pribadi dengan Bapak Darma Sugiarta, Pagar Alam, 03 Mei 2018.

sebaran mahasiswa dan setiap orang tidak akan ragu lagi dengan kualitas perguruan tinggi karena telah ditetapkan capaian pembelajaran minimalnya.

Dari kutipan hasil wawancara penulis juga menyimpulkan bahwa ketua LPPM memaknai kurikulum sebagai bumbu dalam sebuah pendidikan dimana sebuah pendidikan tidak akan menghasilkan lulusan yang baik jika kurikulumnya tidak baik, melalui kurikulum diharapkan mampu mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Perubahan-perubahan dalam kurikulum dinilai merupakan sesuatu yang wajar karena dalam sebuah program memang harus ada evaluasi. Perubahan tersebut harus dibarengi dengan kesiapan para pelaksana kurikulum yaitu oleh para guru, dosen dan pengelola lembaga pendidikan, perubahan-perubahan ini harusnya merupakan tambahan wawasan bagi para guru atau dosen bukan malah menjadi beban.²⁰⁶

Masalah yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu untuk perbaikan kurikulum di STIT Pagar Alam adalah mengenai pedoman penyusunan kurikulum yang belum tersedia, hal ini dapat menghambat jika akan melakukan penyesuaian kurikulum yang mengacu kepada KKNI, namun dengan adanya bimbingan dari kopertais dan pemerintah diharapkan masalah mendasar ini dapat di selesaikan. Pemahaman tentang kurikulum seharusnya tidak hanya sebagai alat atau rel dalam menjalankan proses pendidikan pada lembaga pendidikan, namun lebih dari itu kurikulum seharusnya menjadi corak yang akan membentuk sebuah kualitas pendidikan. Bukan hanya peran

²⁰⁶ Wawancara pribadi dengan Bapak Darma Sugiarta, Pagar Alam, 03 Mei 2018.

pemerintah yang dibutuhkan di sini, namun juga faktor keseriusan dari pihak pengelola pendidikan tinggi sangat diharapkan, dosen dan sarana prasarana penunjang pendidikan dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui revisi kurikulum pendidikan yang mengacu kepada KKNI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa dosen, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dosen-dosen di STIT Kota Pagar Alam belum mengetahui tentang kurikulum yang mengacu kepada KKNI. Menurut Bapak Nasrun Efendi bahwa beliau baru kali ini mendengar tentang KKNI, tidak jauh berbeda menurut Bapak Abdul Haris dan Ibu Wulan Sari juga mengungkapkan hal yang sama. Dari hasil wawancara kepada Bapak Abdul Haris yang mengaku sudah mengajar menjadi dosen di STIT sejak tahun 2010, bahwa sejak tahun itu baru dua kali di adakan pelatihan tentang kurikulum bagi dosen dan pengurus di STIT Pagar Alam, namun untuk pelatihan tentang kurikulum KKNI belum pernah sama sekali di adakan.

Dari pernyataan di atas dapat penulis simpulkan bahwa para dosen di STIT Pagar Alam belum paham mengenai kurikulum yang mengacu kepada KKNI, ini akan menjadi masalah tersendiri untuk impementasi kurikulum yang mengacu kepada KKNI di STIT Pagar Alam dimana dosen merupakan pelaksana kurikulum yang di harapkan mampu memahami dan melaksanakan kurikulum tersebut dengan baik. Berdasarkan Perpres No.12 tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus mengacu pada KKNI. Pengembangan KBK berbasis KKNI mulai diperundangkan tahun 2014 dan harus diimplementasikan selambat-lambatnya 2 tahun sejak

diperundangkan.²⁰⁷ Itu artinya, STIT Kota Pagar Alam seharusnya telah melaksanakan pengembangan kurikulum dari KBK menjadi KKNI sejak tahun 2016 lalu.

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran terhadap dosen ditemukan bahwa metode pembelajaran yang paling sering digunakan adalah presentasi dan diskusi kelas. Dari hasil observasi terhadap pembelajarannya, mahasiswa mempresentasikan makalah secara kelompok. Kemudian terdapat sesi tanya jawab dan diakhir pembelajaran dosen memberi tambahan materi yang belum dikupas dalam diskusi kelas sebelumnya. Sedangkan hasil wawancara dengan dosen pengampu didapatkan bahwa pembelajaran yang dilakukan difokuskan pada keaktifan mahasiswa sehingga metode yang digunakan adalah presentasi dan diskusi kelas.²⁰⁸

Implementasi KKNI secara efektif tentunya harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan terorganisasi. Kualitas implementasi seperti ini hanya dapat terwujud jika terdapat lembaga khusus yang mampu melaksanakan implementasi KKNI secara lengkap dan menyeluruh. Dalam hal ini berdasarkan dokumen 03 tentang Strategi Implementasi KKNI secara Nasional dari Kemenristekdikti disebutkan harus ada lembaga khusus yang menangani masalah KKNI ini yang dapat dinamai Badan Kualifikasi Nasional Indonesia (BKNI). BKNI memiliki 2 peran utama, yaitu 1). Melakukan koordinasi antara semua pemangku kepentingan yang terkait dengan KKNI dan 2). Melaksanakan KKNI dalam konteks nasional maupun

²⁰⁷ Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum...* h. 2

²⁰⁸ Wawancara bersama Abdul Haris, dosen STIT Pagar Alam, Selasa, 28 Nov 2017

internasional.²⁰⁹ BKNI diharapkan menjalankan tugas-tugas pokok sebagai berikut :²¹⁰

1. Mensosialisasikan KKNi kepada masyarakat dan komunitas internasional.
2. Menyusun pedoman rinci mengenai panduan, mekanisme dan tahapan penilaian kesetaraan berbagai sektor ketenagakerjaan di tingkat nasional dan internasional.
3. Bersama-sama dengan lembaga penjaminan mutu di lingkungan Kemenristekdikti, Kemenakertrans dan asosiasi-asosiasi profesi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu yang sesuai serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKNi di berbagai sektor.
4. Aktif mengkaji dan memberikan saran-saran pengembangan deskriptor pada setiap jenjang kualifikasi KKNi sesuai dengan perkembangan kompetensi tenaga kerja atau perkembangan kualifikasi kerja di dunia internasional.
5. Memberi saran-saran pengembangan jenjang kualifikasi kerja bagi pihak yang berkepentingan baik dari dalam maupun luar negeri.

Sementara itu tugas dan kewenangan BKNI adalah sebagai berikut:²¹¹

1. Pada tahap operasional, BKNI dapat memposisikan diri sebagai lembaga yang memberikan masukan, konsultasi, pembimbingan/pendampingan, mendorong dan memfasilitasi terjadinya proses penerapan KKNi pada institusi-institusi yang akan membutuhkannya secara nasional.

²⁰⁹ Tim KKNi Kemenristek Dikti, *Dokumen 003 KKNi*, (Dirjen Pemberdayaan dan Kemahasiswaan: Kemenristek Dikti, 2015)

²¹⁰ Tim KKNi Kemenristek Dikti, *Dokumen 003 KKNi*,..

²¹¹ Tim KKNi Kemenristek Dikti, *Dokumen 003 KKNi*,..

2. BKNI melalui bidang-bidang dalam struktur organisasi (Gambar 3) secara berkala akan meninjau perangkat KKNi seperti peraturan, deskriptor, panduan, mekanisme sosialisasi, dokumen standar implementasi dan aspek pendukung lainnya, dan melakukan penyesuaian, perubahan atau pengembangan.
3. BKNI juga bertugas untuk aktif mengkaji dan meninjau ulang deskriptor untuk ke 9 (sembilan) jenjang kualifikasi yang terdapat dalam KKNi dengan memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada bidang ketenagakerjaan di dalam dan di luar negeri.
4. Sebagai pusat pelayanan dan informasi, BKNI bertugas menerbitkan panduanpanduan yang dianggap perlu bagi kebutuhan pemangku kepentingan baik berupa informasi tentang mekanisme penerapan KKNi, pedoman PPL, transfer kredit maupun program-program sertifikasi yang terkait dengan KKNi.
5. BKNI bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi KKNi serta program penerapannya kepada semua pemangku kepentingan sehingga sasaran utama KKNi yaitu meningkatkan mutu dan daya saing tenaga kerja Indonesia dapat dicapai dalam waktu yang telah direncanakan. Sosialisasi kepada badan serta lembaga yang melakukan akreditasi institusi pendidikan/pelatihan penghasil tenaga kerja atau kepada insitusi penyelenggara program sertifikasi kompetensi/profesi juga menjadi cakupan wewenang dan tanggung jawab BKNI sehingga adopsi KKNi

kedalam program-program pendidikan/pelatihan tersebut dapat segera terjadi secara nasional.

6. Untuk menjamin pelaksanaan KKNi yang transparan, akuntabel dan memperoleh pengakuan masyarakat luas di dalam maupun di luar negeri, BKNI harus dapat membangun kemitraan dengan BAN, BSNP, BNSP/LSP, asosiasi profesi, asosiasi industri serta badan atau lembaga lain yang terkait dengan penghasil dan pengguna tenaga kerja Indonesia sedemikian sehingga terbangun sebuah koordinasi yang simbiotik mutualistik dalam melakukan program penjaminan mutu berbasis KKNi yang berkelanjutan di bidang-bidang masing-masing. Secara keseluruhan kegiatan penjaminan mutu yang dilakukan masing-masing lembaga atau badan tersebut diharapkan akan mendukung pelaksanaan KKNi yang bermutu pula.
7. BKNI sebagai badan pelaksana KKNi perlu mendapat dukungan legal yang tepat untuk menyusun perencanaan dan program-program pelaksanaan serta mengemban wewenang yang diberikan. KKNi pada dasarnya dirancang dan disusun sesuai dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sehingga struktur KKNi sinkron dengan sistem

pendidikan dan pelatihan maupun sistem ketenaga-kerjaan di Indonesia. Sinkronisasi KKNI juga diharapkan terjadi dengan badan-badan yang dibentuk berlandaskan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan, pelatihan ketenagakerjaan, sertifikasi kompetensi/profesi atau pembentukan asosiasi profesi dan industri.

8. BKNI harus berperan aktif dalam membantu pengembangan sistim RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau), transfer kredit atau pindah jenis pendidikan dalam sektor pendidikan dan pelatihan. BKNI dapat menyiapkan tim pendamping bagi institusi yang membutuhkan dan memberikan kebebasan penuh bagi institusi tersebut untuk menyusun peraturan dan mekanisme yang diberlakukan secara internal di institusi masing-masing sesuai ciri khas yang dimiliki namun tetap sinkron dengan kaidah-kaidah mendasar yang dipersyaratkan oleh KKNI.
9. BKNI juga perlu berperan aktif untuk menyediakan tim pendampingan bagi perusahaan, industri, institusi bisnis atau instansi pemerintah dalam mengembangkan sistem karir atau struktur penggajian berbasis KKNI. Dalam hal proses penyetaraan kualifikasi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia atau sebaliknya tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, maka BKNI melalui bidang yang sesuai akan melakukan tindak lanjut termasuk mengeluarkan sertifikat pengakuan kesetaraan kualifikasi yang diperlukan.

Dalam pemaparan di atas di jelaskan secara jelas bahwa dalam rangka implementasi KKNI secara nasional diharapkan ada badan khusus yang

bernama Badan Kualifikasi Nasional Indonesia (BKNI). Kalau melihat peran, fungsi, tujuan dan kewenangan BKNI di atas, penulis merasa ini sudah sangat cukup secara konseptual, tinggal pelaksanaannya saja yang harus secara komprehensif dilakukan di seluruh wilayah Indonesia pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hal-hal yang disampaikan oleh ketua, kaprodi dan dosen STIT di atas mengenai kurangnya sosialisasi dan belum adanya pedoman KKNi pada perguruan tinggi seharusnya tidak terjadi jika sudah ada BKNI yang berperan aktif.

Dari segi sarana prasarana pada prodi PAI STIT Kota Pagar Alam telah memiliki gedung yang representatif dengan ruang kuliah yang sudah dilengkapi proyektor dan whiteboard. Terdapat sarana olahraga, ruang Unit Kegiatan Mahasiswa dan ruang BEM, Ruang UKS, laboratorium *micro teaching* dan Lab. Bahasa, Koperasi, kantin mahasiswa, lapangan parkir yang luas dan terdapat juga perpustakaan walaupun belum lengkap menyediakan buku-buku referensi, dan tempat ibadah. Sarana dan prasarana tersebut digunakan secara bergantian dengan prodi lain. Dari hasil pengamatan penulis, para mahasiswa belum menggunakan sarana tersebut dengan baik misalnya pengunjung perpustakaan dari kalangan mahasiswa hanya sekitar 7 sampai 15 orang saja setiap hari sementara untuk pemanfaatan tempat ibadah juga hanya beberapa mahasiswa saja yang terlihat melakukan shalat Dzuhur berjamaah di musholah.

Dari beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pada prodi PAI di STIT Kota Pagar Alam dari segi

kelengkapan dan kuantitasnya dapat dikatakan sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sedangkan sarana prasarana yang masih belum optimal adalah tersedianya jaringan internet untuk mahasiswa yang memiliki konektivitas cepat. Hal tersebut berpengaruh terhadap akses mahasiswa mengenai berbagai sumber yang didapatkan dari internet dan buku referensi perkuliahan di perpustakaan yang belum lengkap.

Dalam rangka implementasi kurikulum yang mengacu kepada KKNI dari segi sarana dan prasarana di STIT Kota Pagar Alam sudah mencukupi, tinggal dimaksimalkan saja dalam penggunaannya sehingga dapat mendukung proses perkuliahan dengan baik. Sarana prasarana yang ada juga harus di sesuaikan dengan jumlah mahasiswa dan jumlah program studi dalam sebuah perguruan tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat penulis simpulkan bahwa:

Kesiapan pengurus dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di STIT Kota Pagar Alam masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator bahwa 1). Pengurus belum pernah mengikuti workshop, pelatihan atau diklat tentang penyusunan kurikulum berbasis KKNI, 2). Sosialisasi mengenai kurikulum yang mengacu kepada KKNI pada pendidikan tinggi belum sampai pada kampus STIT Kota Pagar Alam, 3). Pengurus STIT belum mempunyai panduan penyusunan kurikulum tentang KKNI, 4). Dalam penyusunan kurikulum di STIT Kota Pagar Alam masih melihat/ mengikuti dari kampus lain yang cenderung di adopsi keseluruhan.

Kesiapan dosen dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di STIT Kota Pagar Alam tergolong masih rendah dan belum siap, hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemahaman dosen-dosen STIT tentang kurikulum yang mengacu kepada KKNI. Selain itu para dosen STIT Kota Pagar Alam tidak di berikan pemahaman terlebih dahulu mengenai kurikulum sebelum mengajar misalnya melalui workshop atau pelatihan yang di adakan oleh pihak kampus dan sistem pengajaran yang di sampaikan oleh para dosen masih cenderung secara *convensional*.

Sementara itu dari segi sarana dan prasarana dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di STIT Kota Pagar Alam sebenarnya sudah cukup memadai karena di STIT Kota Pagar Alam selain di setiap ruang kelas tersedia infocus sebagai sarana pembelajaran di sana juga terdapat laboratorium *Micro Teaching* yang dapat di gunakan sebagai sarana penunjang dalam praktik pengajaran, kemudian terdapat laboratorium Bahasa yang dapat digunakan sebagai media dalam praktik bahasa Arab dan Inggris dan juga tentunya ketersediaan gedung yang representatif akan sangat menunjang dalam implementasi kurikulum yang mengacu kepada KKNI.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman selama mengadakan penelitian mengenai kesiapan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam dalam implementasi kurikulum yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Ketua STIT Kota Pagar Alam di harapkan dapat mengambil sikap yang tegas untuk implementasi kurikulum yang mengacu kepada KKNI, dengan adanya sikap yang tegas maka akan timbul persiapan yang kongkrit dari berbagai aspek. Bagi ketua STIT juga di harapkan mampu meningkatkan sarana prasarana penunjang perkuliahan yang tersedia misalnya dengan melengkapi buku-buku referensi di perpustakaan, meningkatkan kecepatan connectivitas internet dan membuat peraturan agar para mahasiswa mampu menggunakan sarana dengan baik.

2. Bagi Ketua Prodi PAI STIT Kota Pagar Alam di harapkan dapat membuat panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang di jadikan bahan dalam menjalankan kurikulum serta di harapkan ketua prodi dapat memberikan bimbingan mengenai kurikulum pendidikan tinggi kepada para dosen sebelum mereka di berikan jadwal perkuliahan hal ini dapat di lakukan melalui pelatihan atau workshop.
3. Bagi para dosen di harapkan dapat mempelajari secara mandiri mengenai kurikulum pendidikan tinggi termasuk perkembangan kurikulum yang mengacu kepada KKNI seperti sekarang ini, sehingga dalam proses pengajaran bukan hanya sekedar mengajar tapi juga memiliki standar ketercapaian atau *learning outcome* yang jelas. Dosen di harapkan sering berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ilmiah khususnya yang berkaitan dengan kurikulum dan metode pembelajaran sehingga dosen mampu menyampaikan pembelajaran dengan metode yang inovatif. Dosen juga diharapkan mampu menggunakan sarana pembelajaran dengan baik dan maksimal sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang berbeda.